

BUNGA RAMPAI

HUBUNGAN INTERNASIONAL MASA KINI

EDITOR:
DR. SURWANDONO



Bunga Rampai Hubungan Internasional Masa Kini

Editor: Dr. Surwandono

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2017

Bunga Rampai

Hubungan Internasional Masa Kini

Penulis:

Julia Rizky Utami

Khairiyah

Khalid Juani

Muhammad Farid

Syuryansah

Tolhah

Tika Dian Pertiwi

Arief Firmansyah

Eka Fitriana

Surwandono

Desain Cover

Muhammad Faqih Jihan Insani

Tata Letak:

Jihan Art

Cetakan 1, Januari 2017

Penerbit

Magister Ilmu Hubungan Internasional, UMY

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Bantul Yogyakarta, 55183

Telp: (0274) 397656 (122)

<http://umy.ac.id>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurah untuk Alloh SWT atas segala karunia berupa kenikmatan iman, Islam untuk senantiasa meniti jalan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa teruntuk Rasulullah SAW.

Buku Bunga Rampai Hubungan Internasional Masa Kini merupakan karya mahasiswa dari sejumlah tugas mata kuliah yang terpilih untuk memperkaya proses peningkatan kualitas pembelajaran di jurusan MIHI UMY, khususnya dalam diskursus issue Hubungan Internasional Mutakhir.

Jurusan MIHI UMY memiliki komitmen untuk membangun kapasitas akademik mahasiswa melalui kemampuan melakukan publikasi ilmiah baik dalam penulisan artikel jurnal, konferensi, maupun buku. Publikasi bagi insan akademik adalah keniscayaan, karena dengan publikasi para mahasiswa akan mampu menyampaikan gagasan secara sistematis dan bertanggung jawab.

Karya akademik Bunga Rampai dalam Hubungan Internasional Masa Kini adalah buku kedua dari karya Mahasiswa MIHI yang diterbitkan. Besar harapan kami, karya mahasiswa ini dapat memberikan sumbangsih bagi pemaknaan realitas Hubungan Internasional kontemporer.

Sekali lagi, selamat untuk semua penulis.

Yogyakarta, 2 April 2017

Dr. Surwandono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pendahuluan	
Diplomasi Bencana Pada Studi Kasus Hubungan Turki - Yunani Julia Rizky Utami	1
Upaya Perdamaian Konflik Kashmir Melalui Diplomasi Bencana Arif Firmansyah I	25
Isu Lingkungan Global Dalam Perspektif Islam Kairiyyah	44
Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016 M Kholit Juani	57
Peranan Jama'ah Tabligh Di Asia Selatan Terhadap Perkembangan Jama'ah Tabligh Di Indonesia	76
Kerja Sama Sister City Antara Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan Tika Dian Pratiwi	108
Implementasi Perjanjian Indonesia Dalam Upaya Pembebasan Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi	129

Eka Fitriana	
Analisis Kritis Politik Luar Negeri Rusia Modern Muchammad Farid	147
Relevansi Politik Luar Negeri Barat Dalam Islam Syuryansyah	170

PENDAHULUAN

Dr. Surwandono

Buku Bunga Rampai Hubungan Internasional Masa Kini menampilkan sejumlah gagasan yang cerdas, segar dan menarik. Gagasan seputar musibah bencana yang selama ini dimaknai dengan makna negative dan sebagai lost factors, justru dapat dimakna secara positif sebagai social capital factors. Bencana bukan hanya sebagai sesuatu yang perlu diratapi dan berakhir dengan kenestapaan, namun justru dikelola sebagai potensi yang memiliki momentum yang unik untuk dikelola.

Dua tulisan diplomasi bencana dari Julia Rizky Utami dengan judul “Diplomasi Bencana Pada Studi Kasus Hubungan Turki – Yunani” menawarkan gagasan penting untuk menyelesaikan problem klasik antara Turki dan Yunani. Julia membangun argument secara sistematis mengapa Diplomasi bencana mampu menjadi inter-koneksi keterputusan hubungan keduanya. Bukan hanya dalam dataran relevansi, juga disampaikan dalam level mekanisme yang dapat dilakukan agar diplomasi bencana dapat efektif dalam penyelesaian konflik Turki-Yunani.

Tulisan dari Arif Firmansyah, dengan judul Upaya Perdamaian Konflik Kashmir Melalui Diplomasi Bencana, juga menawarkan gagasan yang relevan. Konflik Kashmir merupakan konflik yang sudah seusia dengan berdirinya Negara India dan Pakistan modern, di mana keduanya

mengklaim bahwa Kashmir menjadi bagian integral keduanya. Bahkan bagi Pakistan, Kashmir merupakan salah satu identitas penting dari nama Pakistan. Andaikan Kashmir lepas dari Pakistan, sesungguhnya nama Pakistan akan berubah menjadi PASTAN. P mewakili nama identitas Punjabi, A mewakili identitas Afghani, K mewakili Kashmiri, S mewakili Sindhi, Tan mewakili Baluchistan. Konflik keduanya juga telah menghasilkan pilihan sulit untuk mengorbankan derajat kesejahteraan ekonomi untuk memperoleh kedaulatan penuh melalui kebijakan militeristik. Pakistan sebagai Negara menengah harus mengeksplorasi kemampuan perangnya untuk bersaing dengan India.

Arif Firmansyah menawarkan gagasan penting, bahwa situasi kebencanaan yang sering terjadi di India dan Pakistan, semisal bencana Gempa Bumi maupun Banjir, serta Kekeringan dapat dikelola sebagai modal social menyelesaikan konflik. Bencana dapat menjadi titik di mana rasa kemanusiaan akan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan pilihan ekonomi dan politik.

Issue menarik yang juga ditawarkan buku ini adalah gagasan yang terkait dengan dunia Islam, baik dalam tataran normative sampai dengan issue kekinian, seperti issue politik dan gerakan social Islam. Tulisan Khairiyyah membahas sisi normative Islam sebagai salah satu solusi lingkungan global dalam artikelnya, Isu Lingkungan Global Dalam Perspektif Islam. Dalam pandangan Khairiyyah, Islam sebagai system

hidup memiliki pandangan yang lengkap dan memadai untuk membaca, mengelola dan mengatasi sejumlah problem lingkungan Global. Gagasan pengelolaan lingkungan global selama ini didominasi oleh gagasan dan simulasi ilmiah yang tertera dalam Protokol Kyoto. Jarang sekali membangun gagasan pengelolaan lingkungan global dengan menggunakan nalar normative keagamaan. Khairiyah menawarkan relevansi norma Islam sebagai salah satu nilai alternatif yang potensial untuk mengelola issue lingkungan Global.

Syuryansyah menulis tentang gagasan Relevansi Politik Luar Negeri Barat Dalam Islam. Studi Syuryansah menunjukkan bahwa Islam memiliki sejumlah perangkat norma yang dapat dijadikan landasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Nilai dasar Islam dalam politik luar negeri adalah nilai universalisme dan globalisme, yang dapat berperan untuk menyelesaikan problem kemanusiaan internasional yang seringkali terpencara oleh norma dasar politik luar negeri berupa kepentingan nasional. Gagasan Syuryansah ditawarkan secara obyketif dan terukur sehingga gagasan ini layak untuk dicermati.

M. Khalit Juani, menulis tentang issue pergulatan demokrasi di Turki yang berdialektika dengan kekuatan militer yang akan masuk dalam jalur politik. Logika kudeta militer dalam sejarah Turki menunjukkan logika keberhasilan. Namun, pada waktu kudeta di Turki tahun 2016, justru menunjukkan nalar yang sangat berbeda, justru berakhir dengan kegagalan.

Artikel Khalit JUnai dengan judul Kegagalan Kudeta Militer Turki, memberikan gagasan penting bahwa kemampuan regim sipil dalam memobilisasi dukungan sipil menjadi salah satu variable penting untuk menangkal nalar kudeta.

Tulisan Tolhah menawarkan gagasan seputar pertumbuhan organisasi Islam internasional, Jamaah Tabligh di Yogyakarta dengan judul, Peranan Jama'ah Tabligh Di Asia Selatan Terhadap Perkembangan Jama'ah Tabligh Di Indonesia. Gagasan penting yang ditawarkan Tolhah adalah bagaimana Jamaah Tabligh mampu berkembang di tengah kompetisi organisasi islam yang berbasis gerakan indigenous Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Tolhah menemukan strategi penting yang dilakukan Jamaah Tabligh melalui model mediated diffusion. Pilihan ini membuat ruang kompetisi antara Jamaah Tabligh dengan organisasi Islam di Yogyakarta tidak banyak menimbulkan sejumlah friksi, sebagaimana terjadi di sejumlah gerakan baru Islam di Yogyakarta.

Eka Firtiana menulis tentang Implementasi Perjanjian Indonesia Dalam Upaya Pembebasan Hukuman Mati TKI Di Arab Saudi. Gagasan sederhana Eka Fitriani diawali dari pra-kondisi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri, baik pria maupun wanita. Tidak bisa dipungkiri dari pengiriman tenaga kerja tersebut banyak yang menuai masalah dalam ranah hukum di negara penerimanya. Instrumen efektif yang dapat dipergunakan oleh Indonesia terkait dengan pembebasan

hukuman mati dapat mengeksplorasi dimensi sejarah, budaya, social dan ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Tika Dian Pratiwi, menulis artikel dengan judul, Kerja Sama Sister City Antara Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan. Kerjasama diantara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyengsangbuk-do didasarkan pada berbagai peluang yang baik. Gyeongsangbuk-do merupakan provinsi yang sangat kaya dan memiliki kemajuan industri yang pesat. Perkembangan ekonomi tumbuh dengan cepat di daerah ini setelah diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 1988. Gyeongsangbuk-do juga merupakan provinsi yang memiliki sistem pemerintahan daerah yang baik dan terkontrol secara rapi. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi Yogyakarta untuk menjalin kerjasama dengan Gyeongsangbuk-do. Ada banyak hal positif yang dapat Yogyakarta peroleh. Salah satu contohnya adalah mempelajari dan meniru sistem pemerintahan daerah Gyeongsangbuk-do, yaitu Saemul Undong yang sukses menghantarkan provinsi ini maju dengan sangat pesat.

Di sisi lain, Yogyakarta adalah provinsi yang juga mampu mendatangkan keuntungan bagi Gyeongsangbuk-do. Yogyakarta yang kaya akan nilai-nilai budaya, sumber daya alam serta sumber daya manusia tentu sangat berpotensi untuk dijadikan rekan dalam *sister city*. Hal inilah yang menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah yang baik untuk tempat berbisnis

tidak hanya bagi pebisnis asal Korea Selatan, tetapi juga bagi pemerintah Gyeongsangbuk-do.

Muchammad Farid, Analisis Kritis Politik Luar Negeri Rusia Modern. Gagasan utama Farid adalah problem syndrome Rusia sebagai Negara besar yang hendak mengulangi kebesarannya pasca bubarnya Uni Soviet setelah perang dingin membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri Republik Federasi Rusia. Diawal lahir dan berdirinya Republik Federasi Rusia pembuatan arah kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri mengacu kepada empat doktrin karakteristik Republik Federasi Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet. Pilihan kebijakan luar negeri yang tepat membuat keinginan Rusia untuk tumbuh menjadi Negara besar dan diperhitungkan dalam kancah global telah tercapai dalam kurun waktu yang singkat.

DIPLOMASI BENCANA PADA STUDI KASUS HUBUNGAN TURKI - YUNANI

Julia Rizky Utami

Pada era kontemporer saat ini, bencana bukan lagi terhitung sebagai *lost factors*. Dari sisi politik, bencana muncul sebagai modal sosial (*social capital factors*) yang digunakan negara – negara yang berpotensi untuk membentuk hubungan dengan aktor internasional. Modal sosial sendiri dimengerti sebagai potensi unik yang dimiliki oleh negara yang membantu negara lain ketika negara tersebut mengalami bencana. Negara yang memberikan tersebut selain memiliki modal sosial juga berhasil meningkatkan bargaining positionnya di dunia internasional. Dengan kepemilikan atas modal sosial, negara memiliki potensi untuk mengadakan komunikasi dan melakukan pertukaran dengan pihak lain. Secara singkat, dapat disebutkan bahwa terlepas dari dampak negatifnya, bencana di sisi lain menyebabkan terjadinya proses diplomasi.

Bencana menjadi salah satu unsur penting yang dapat menjadi alasan terbentuknya diplomasi. Hal ini terjadi karena bencana terkait dengan *velocity* (membutuhkan respon cepat) dan *proximity* (kecepatan untuk memberikan bantuan). Bencana selalu berhubungan dengan situasi

darurat (*emergency*), sehingga dibutuhkan respon yang cepat dari berbagai pihak untuk menanggapinya.¹ Di sisi lain, negara yang memberikan respon cepat untuk membantu penanggulangan bencana terutama yang terjadi di negara lain akan memiliki modal sosial yang suatu saat dapat dipertukarkan untuk kepentingan nasionalnya.

Dalam tulisan ini, hubungan antara Turki dan Yunani dianggap sebagai studi kasus yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bencana dapat digunakan sebagai alat diplomasi. Adanya bencana gempa bumi yang terjadi di kedua negara berperan sebagai katalis yang mampu meredakan ketegangan hubungan antara kedua negara yang telah terjadi berlarut – larut sejak masa pra perang dunia. Sebelum terjadinya bencana, basis – basis digagasnya diplomasi memang sudah mulai dikembangkan oleh kedua negara, namun ketika terjadi gempa bumi pada tahun 1999 di Turki dan disusul juga oleh gempa bumi yang terjadi di Yunani, diplomasi antara kedua negara semakin berjalan lancar. Fenomena ini dalam term hubungan internasional saat ini dikenal sebagai diplomasi bencana, dimana bencana berperan sebagai katalis dari diplomasi yang dilakukan oleh negara – negara. Diplomasi bencana

¹Library OHIOU.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/07/25/0277.html> diakses pada 1 Juli 2016.

dalam kasus ini mampu membawa hubungan antara Turki dan Yunani ke arah titik awal rekonsiliasi setelah kedua negara terlibat konflik berkepanjangan dan berlarut – larut.

Kajian Pustaka

Pada bukunya yang berjudul *Disaster Diplomacy – how disaster affect peace and conflict*, Ilan Kelman menyajikan *scientific summary* dan analisis terhadap adanya diplomasi bencana terbaru yang terjadi selama beberapa waktu terakhir sehingga pembaca dapat memahami penjelasan terkait diplomasi bencana secara sistematis. Sebagai permulaan, Ilan Kelman dalam buku ini menjelaskan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap komunitas manusia atau masyarakat yang melibatkan dalam jumlah besar manusia, material, ekonomi hingga kerusakan lingkungan dan berdampak pada terganggunya kemampuan manusia tersebut untuk menggunakan segala sumber daya yang ada dalam rangka untuk bertahan hidup.

Sedangkan diplomasi menurut Kelman mengarah kepada penggunaan cara – cara damai dalam kerangka *official business* diantara pemerintahan negara – negara yang berdaulat ataupun entitas pemerintah lainnya yang terlibat dalam urusan politik internasional. Dalam buku ini dijelaskan bahwa diplomasi bencana meneliti bagaimana dan mengapa aktifitas terkait dengan bencana mampu

mereduksi konflik bahkan menjadi penghubung terbentuknya kerjasama. Segala aktifitas terkait dengan bencana mengarah kepada segala sesuatu yang terjadi sebelum bencana (investigasi, proposal, kebijakan, tindakan dll) maupun sesudah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana, aktifitas yang dimaksud mengarah kepada tindakan preventif, perencanaan, mitigasi, persiapan bahkan reduksi resiko. Aktifitas pasca bencana seperti tindakan responsi, *relief*, rekonstruksi dan *recovery*.²

Dalam buku ini, Kelman memulai gagasannya dengan sebuah pertanyaan apakah bencana alam dapat mendorong timbulnya kerjasama diantara negara – negara yang bermusuhan satu sama lain? Penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa beberapa bencana alam terjadi disebabkan adanya input dari manusia. Pada umumnya, bencana alam memang terjadi secara alamiah, namun dalam perkembangannya, adanya campur tangan manusia menjadi faktor besar pendorong terjadinya bencana alam. Buku ini bahkan mengklaim bahwa keputusan manusia adalah akar penyebab dari timbulnya bencana. Bencana tidaklah natural hanya fenomena lingkungan semata, melainkan konstruksi sosial. Term bencana dalam konsep diplomasi bencana pun menjadi sangat dibatasi, karena hal itu dapat

² Kelman, Ilan. *Disaster Diplomacy-how disasters affect peace and conflict*. London and New York:2012. Routledge Taylor and Francis Group.

mengimplikasikan bahwa bencana terindikasi sangat dibutuhkan untuk melakukan diplomasi bencana. Banyak contoh kasus menunjukkan bagaimana kerjasama potensial dan peace building terbentuk pada masa pre-disaster activities. Sebagai contoh, Kuba dan Amerika Serikat mulai terlihat bekerjasama untuk memonitor badai yang menimpa kedua wilayah. Contoh lainnya yakni adanya middle east regional cooperating program yang dibiayai oleh Amerika Serikat, adanya program tersebut mempertemukan Yordania, Israel dan Otoritas Nasional Palestina untuk bekerjasama menangani assessment terkait bencana gempa bumi.

Struktur penulisan dalam buku ini terbagi menjadi beberapa *chapter*. Pada bagian pertama dan kedua, penulis menyajikan sejumlah studi kasus yang menggambarkan adanya evolusi dari diplomasi bencana disertai dengan sejumlah background dan ruang lingkupnya. Bagian ketiga, buku ini menyajikan sejumlah hipotesis yang disertai dengan rumusan masalah. Bagian keempat buku ini diulas sejumlah studi kasus untuk membuktikan hipotesis yang ada dan menguji sejumlah rumusan masalah dari berbagai sudut pandang. Bagian kelima buku ini menyajikan kajian dan kritik terhadap sejumlah pendekatan kuantitatif yang diikuti oleh tipologi kualitatif dari sejumlah studi kasus. Bagian keenam dan ketujuh buku ini memformulasi tipologi

kualitatif tersebut sehingga mampu mendeksripsikan bagaimana dan mengapa diplomasi bencana berhasil, dibentuk agar berhasil, gagal maupun dibentuk untuk mencapai kegagalan. Bab delapan buku ini menyajikan studi kasus lebih mendalam terkait diplomasi bencana. Sedangkan bab sembilan buku ini merumuskan batasan dari penelitian diplomasi bencana dan aplikasinya dalam kehidupan. Bab sepuluh menerangkan sejumlah pembelajaran yang dapat ditarik dari diplomasi bencana. Bagian kesebelas menyajikan detail tentang *future work* dan aplikasi dari diplomasi bencana. Dan pada bagian terakhir buku ini menyajikan rangkuman utuh dari gagasan besar diplomasi bencana serta menyeimbangkan perspektif yang ada pada bagian – bagian sebelumnya.

Diplomasi bencana merupakan sesuatu yang *tangible*. *Disaster related activities* secara mendalam bahkan juga dapat menanamkan pengaruh, dukungan dan memberikan imbas dalam proses diplomatik pada suatu waktu. Namun *disaster related activities* hanya dapat mensupport proses diplomasi apabila diplomasi tersebut memang sebelumnya telah terbentuk antara pihak – pihak yang terlibat dengan basis selain aktifitas yang terkait dengan bencana. Hipotesis dalam buku ini menerangkan bahwa aktifitas terkait penanganan bencana berperan sebagai katalis, bukan sebagai *creator* dari diplomasi. Bencana tidak semata – mata

membentuk kesempatan untuk melakukan diplomasi, melainkan bencana memungkinkan untuk menjadi katalis dari tindakan – tindakan diplomatik.

Hal ini didukung oleh beberapa gagasan utama. Yang pertama, jika dilihat dari jangka waktu dekat, bencana tidak selalu dapat memberikan imbas pada diplomasi. Bagaimana bencana dapat mensupport diplomasi itu tergantung dari apakah sejak awal memang basis bidang kerjasama telah terbentuk antar negara sehingga diplomasi memungkinkan untuk dilakukan terutama didukung adanya fenomena bencana. Basis tersebut dikenal dengan istilah pre-existing basis, contohnya seperti trade links, hubungan kebudayaan ataupun secret or open peace negotiation diantara negara – negara.

Yang kedua, jika dilihat dari jangka panjang, faktor non bencana pada umumnya lebih banyak memberikan imbas yang signifikan pada proses diplomasi dibandingkan dengan aktifitas terkait dengan bencana. Yang ketiga, banyak fakta menunjukkan bahwa aktifitas yang terkait dengan bencana justru memiliki *outcome* yang berbeda dari harapan ketika melakukan diplomasi bencana. Pada beberapa kasus, bencana justru membuat terjadinya eskalasi konflik, mereduksi proses diplomasi bahkan menghilangkan prospek perdamaian yang sebelumnya telah dicanangkan.

Hal tersebut sangat signifikan dengan studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini dimana diplomasi bencana pada kasus Turki – Yunani berperan sebagai katalis yang mampu meredakan ketegangan diantara kedua negara. Basis kerjasama diantara kedua negara memang sudah terbentuk sejak awal karena adanya konsen bersama terkait konflik Yugoslavia. Bencana gempa bumi pada tahun 1999 yang menimpa kedua negara dalam hal ini bersifat sebagai katalis yang mempercepat prospek kerjasama dan memperlancar hubungan serta komunikasi kedua negara.

Terlepas dari hal tersebut, term *disaster diplomacy* dalam buku ini juga terhitung signifikan dengan kondisi dunia internasional kontemporer saat ini. Terlebih karena diplomasi bencana mulai menjadi populer semenjak media massa ramai memberitakan adanya bencana di sejumlah wilayah konflik ataupun bencana yang terjadi di sejumlah negara yang umumnya dikenal memiliki *enemies*. Buku ini terhitung signifikan dalam merespon fenomena yang terjadi saat ini karena dalam buku ini juga disajikan investigasi berulang – ulang pada berbagai macam studi kasus yang berbeda dari berbagai perspektif. Ulasan diplomasi bencana dalam buku ini disajikan dengan menggali banyak studi kasus kontemporer selama beberapa waktu terakhir terutama pada tahun 2000 hingga tahun 2010. Analisis studi kasus dalam buku ini pun banyak menarik sejarah panjang

dari berbagai bidang keilmuan yang terkait dengan *disaster-related studies* dan *diplomacy-related studies*.

Kajian Dari Segi Ontologi

Sebelum terjadinya diplomasi bencana, Yunani dan Turki merupakan musuh politik tradisional sejak zaman kekaisaran Byzantium dan Ottoman. Dua negara yang secara geografis bertetangga ini terus menerus terlibat dalam pertikaian. Jika ditarik dari sisi kesejarahan, konflik antara kedua negara berawal ketika sekitar tahun 1200 SM, wilayah Turki di sepanjang pantai Anatolia dikuasai oleh suku Aiolia dan suku Ionia Yunani. Anatolia kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Akhemeniyah dari Persia lalu kemudian jatuh ke tangan Alexander The Great pada tahun 334 SM, yang menyebabkan meningkatnya homogenitas kebudayaan dan helenisasi di wilayah tersebut.³ Setelah kematian Alexander pada tahun 323 SM, Anatolia kemudian menjadi bagian dari Republik Romawi pada pertengahan abad ke-1 SM. Di bawah kekuasaan Romawi, bahasa Anatolia dan budaya setempat telah punah digantikan oleh bahasa Yunani. Bizantium lalu menjadi ibu kota baru Kekaisaran Romawi dan berubah nama menjadi

³ Kinross, Patrick. *The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire*. Morrow.1977.

Roma Baru.⁴ Setelah terjadinya pembagian permanen kekuasaan kekaisaran Romawi, Konstantinopel kemudian menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang akan memerintah sebagian besar wilayah Turki hingga Akhir Abad Pertengahan.

Adanya perbedaan agama, etnis dan kebudayaan di kedua wilayah yang semula merupakan satu kesatuan great kingdom tersebut kemudian memicu munculnya konflik berkepanjangan antara kedua negara. Bahkan setelah beberapa abad kemudian, Turki dan Yunani tercatat beberapa kali terlibat dalam perang terbuka, seperti pada perang Yunani – Turki pada tahun 1897 dan perang Yunani – Turki pada tahun 1919 – 1922 yang juga dikenal dengan Perang Asia Kecil.⁵ Pada masa kontemporer saat ini, konflik perbatasan dan perebutan teritorial baik di Aegea maupun Cyprus mengemuka sebagai konflik berkepanjangan yang masih melibatkan Turki dan Yunani.

Cyprus khususnya, diklaim baik Yunani dan Turki sebagai bagian dari teritorial mereka. Cyprus merupakan sebuah pulau yang berada di Laut Tengah dan

⁴ Indonesia. Yunani titik pijak dunia barat. <http://indonesiaindonesia.com/f/12475-yunani-titik-pijak-dunia-barat-modern/> diakses pada 1 Juli 2016.

⁵McCarthy, Justin. *The End of Ottoman Anatolia, in Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire*. New York Univ. Press, 1983.

masyarakatnya terdiri atas dua komposisi etnis yakni etnis Yunani yang beragama kristen dan etnis Turki yang beragama islam. Komposisi etnis yang kontradiktif dan latar belakang sejarah panjang menimbulkan konflik etnis yang berkepanjangan di Siprus antara keturunan Yunani beragama Kristen dan keturunan Turki beragama Islam. Pasca terjadinya perang dunia, perpecahan dalam internal Siprus terus memanas. Kubu Siprus – Yunani menginginkan agar Siprus berintegrasi dengan Yunani. Namun kubu Siprus – Turki yang dipimpin oleh Fazil Kucuk berbalik menuntut agar Siprus diserahkan saja kepada Turki.⁶ Akhirnya, pada 1960 resmi didirikan Republik Siprus yang mewadahi dua etnis, dua bahasa, dan dua kebudayaan yang dipimpin oleh Uskup Makarios (Siprus-Yunani) terpilih sebagai Presiden dan Fazil Kucuk (Siprus-Turki) terpilih sebagai wakil presiden.⁷ Namun, konflik etnis pun masih terus berkecamuk karena tak efektifnya pemerintahan yang terbentuk. Turki kemudian menginvasi Siprus bagian utara pada tanggal 20 Juli 1974 dan mengusir mayoritas penduduk Yunani dari wilayah tersebut. 60.000 orang Turki lalu didatangkan dari negara

⁶ Global Issues. The Cyprus Crisis. <http://www.globalissues.org/article/114/the-cyprus-crisis> diakses pada 1 Juli 2016

⁷ http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/eropa/eropa/siprus_dan_ue.html-[diakses](http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/eropa/eropa/siprus_dan_ue.html) pada 1 Juli 2016. Eropa.

induk untuk merubah keseimbangan demografi bagian utara Cyprus. Akhirnya pada 15 november 1983, di proklamirkan berdirinya *Turkish Republic of Northern Cyprus* (TRNC).⁸

Isu perebutan wilayah antara Yunani dan Turki kemudian menjadi sebuah masalah kontemporer yang berlarut – larut. Dalam perkembangannya, sebuah titik balik yang dramatis kemudian terjadi ketika Yugoslavia terpecah dalam konflik internal. Notabene, secara geografis Yugoslavia berbatasan wilayah langsung baik dengan Turki maupun Yunani. Pecahnya konflik di Yugoslavia menyebabkan Yunani dan Turki kemudian memiliki concern yang sama untuk mengatasi masalah kemanusiaan terutama akibat membludaknya pengungsi Yugoslavia yang menuju Turki dan Yunani. Namun ironisnya, pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat melayangkan tuduhan bahwa Turki dan Yunani merupakan dalang di balik konflik yang terjadi di Yugoslavia.⁹

Merasa berada pada posisi yang sama – sama tersudutkan oleh dunia internasional, untuk menghindari

⁸ Uslu, Nasuh. *The Cyprus question as an issue of Turkish foreign policy and Turkish-American relations, 1959–2003*. Nova Publishers. 2003.

⁹ Herningtyas, Ratih. Surwandono. *Modul Pelembagaan Kapitalisasi Bencana Alam Melalui Diplomasi Bencana*. Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2014.

resiko terjebak dalam sanksi internasional, pada akhirnya Menteri Luar Negeri Turki, Ismail Cem dan Menteri Luar Negeri Yunani, George Papandreou, untuk pertama kalinya melakukan komunikasi dan berdiskusi secara langsung tanpa misi diplomatik melalui sambungan telepon.¹⁰ Setelah beberapa kali menjalin komunikasi melalui telepon, kedua menteri luar negeri tersebut pun menemui kecocokan personal. Mereka kemudian menginisiasi diadakannya pertemuan diplomatik antara kedua negara. Ministerial meeting antara kedua perwakilan negara kemudian diadakan. Namun di tengah pembahasan dan pertemuan diplomatik tersebut, pada Agustus 1999, gempa bumi dalam skala besar mengguncang Izmit di Turki yang memakan korban hingga 17000 jiwa.¹¹ Gempa bumi tersebut terjadi pada 17 Agustus pada pukul 3 dini hari waktu setempat di barat laut Turki. Getarannya berkekuatan 7,6 sr. Peristiwa tersebut berlangsung selama 37 detik dan membuat sekitar satu setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Kota terdekatnya Izmit mengalami kerusakan yang sangat serius.

Kasus di atas apabila dianalisis dengan perspektif Ilan Kelman terkait pre-disaster activity dalam kerangka diplomasi bencana tentunya sangat signifikan. Hal ini

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kapan Lagi. Article. http://www.kapanlagi.com/h/0000161476_print.html diakses pada 1 Juli 2016.

dikarenakan, menurut Kelman, diplomasi bencana pada dua negara yang berkonflik hanya dapat dilakukan apabila sejak awal memang telah terbentuk basis komunikasi dan kerjasama antara kedua negara yang notabenenya bertikai. Antara Yunani dan Turki, sebelum terjadinya bencana, memang telah terbentuk sejumlah proses diplomasi dasar karena adanya konsen yang sama atas konflik Yugoslavia. Bencana gempa bumi yang terjadi pasca terbentuknya basis dasar kerangka diplomasi antara kedua negara kemudian berperan sebagai katalis yang mempercepat dan mempermudah dilakukannya komunikasi dan diplomasi antara kedua negara.

Kajian Dari Segi Epistemologi

Pasca terjadinya gempa bumi dalam skala besar di tengah pertemuan diplomatik kedua negara yang mengguncang Izmit di Turki dan memakan korban hingga 17000 jiwa, Menteri Luar Negeri Turki, Ismail Cem, kemudian menelepon Kedutaan Besar Yunani di Istanbul untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi bencana nasional di Turki. Karena adanya basis komunikasi dan diplomasi yang sebelumnya telah terbentuk antara kedua negara sebelum terjadinya bencana, 15 menit setelah dilakukan konfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Turki tersebut, Menteri Luar Negeri Yunani, George Papandreou kembali

menelepon Ismail Cem dan menawarkan bantuan darurat. Tim tanggap darurat bencana Yunani, EMAK, segera berangkat menuju Izmit dan memberikan pertolongan darurat. Pada hari berikutnya, media Yunani memberitakan keprihatinan Yunani atas gempa bumi yang menimpa Izmit, Turki. Masyarakat Yunani kemudian menggalang dana solidaritas bencana secara massif untuk segera disalurkan ke Turki.¹²

Beberapa waktu kemudian, belum sebulan berlalu sejak terjadinya gempa bumi di Izmit, Ibukota Yunani yakni Athena, sebaliknya diguncang juga oleh bencana gempa bumi dalam skala besar. Gempa berkekuatan 5,9 sr menyebabkan kerusakan serius dan menewaskan hingga 143 jiwa.¹³ Pasca bencana yang menimpa Yunani tersebut, respon yang mengejutkan kemudian datang dari Turki yang merasa telah dibantu oleh Yunani pada bencana gempa bumi sebulannya. 2 jam sejak bencana gempa bumi yang menimpa Yunani, AKUT, sebagai tim tanggap darurat bencana Turki, berkoordinasi dengan Pemerintah Yunani dan telah tiba di Athena untuk memberikan pertolongan darurat.

¹² Clogg, Richard. *A Concise History of Greece*. Cambridge University Press.

¹³ Liputan 6. Gempa Yunani. <http://m.liputan6.com/global/read/2054366/gempa-64-sr-yunani-turki-dirasakan-di-bulgaria-270-cedera> diakses pada 1 Juli 2016.

Sejak terjadinya bencana gempa bumi yang menimpa kedua negara, adanya ketegangan yang sebelumnya terjadi antara Yunani dan Turki perlahan mulai mengarah ke arah rekonsiliasi. Adanya bencana tersebut dalam hal ini berperan sebagai katalis yang memperlancar proses diplomasi dan prospek hubungan kedua negara, terutama karena sejak awal memang telah terbentuk basis diplomasi antara Turki dan Yunani sebelum terjadinya gempa bumi. Karena dibutuhkan respon cepat dalam hal penanggulangan bencana, Turki dan Yunani yang notabeneanya bertetangga, mengesampingkan konflik masa lalu mereka dan bahu membahu saling membantu pasca terjadinya bencana yang menimpa kedua negara.¹⁴ Pada akhirnya, pasca terjadinya gempa bumi tersebut, komunikasi antara keduanya masih terus terjalin dan hubungan baik antara Turki dan Yunani semakin terus dibina. Hingga hari ini, civil society antara kedua negara juga sangat berperan aktif dalam mengakselerasi kesepahaman dan re-approchement kedua negara yang sekian lama terlibat dalam konflik berkepanjangan.

Dari segi epistemologi, dapat dianalisis bahwa diplomasi bencana pada kasus Turki – Yunani dilakukan

¹⁴ Deutsch Welle. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3242595,00.html> diakses pada 1 Juli 2016.

pada level pemerintah pusat. Komunikasi yang dilakukan masing – masing perwakilan negara melalui menteri luar negeri baik Yunani maupun Turki sebelum terjadinya bencana, selama terjadinya bencana dan pasca terjadinya bencana semakin mempertegas analisis ini. Hal ini dapat dilihat contohnya pada saat menteri luar negeri masing – masing negara melakukan respon cepat melalui telepon untuk saling memberikan bantuan darurat dalam rangka penanganan bencana. Basis diplomasi yang dilakukan kedua negara sebelum terjadinya bencana semakin dipercepat prosesnya pasca terjadinya bencana. Pelaksanaan diplomasi bencana pada kasus ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat kedua negara dapat disebutkan sebagai contoh keberhasilan dari diplomasi bencana dalam rekonsiliasi konflik. Pada akhirnya, pasca terjadinya bencana tersebut, antara kedua negara hingga saat ini masih terus melakukan sejumlah komunikasi dan diplomasi.

Kajian Dari Segi Aksiologi

Pasca adanya diplomasi bencana antara Turki dan Yunani, hubungan kedua negara yang notabeneanya merupakan musuh politik sejak masa pra kolonial ini semakin membaik dan menunjukkan prospek yang melegakan. Hubungan perdagangan dan perekonomian antara kedua negara pun berkembang dengan pesat. Bahkan

tercatat selama beberapa tahun terakhir, sekitar 170 perusahaan Yunani berinvestasi di Turki. Kedua negara pun terlibat kerjasama dalam proyek pembukaan gas bumi bersama.¹⁵ Saat ini, hubungan antara masing – masing kepala pemerintahan kedua negara pun semakin membaik.

Pemerintahan Yunani pada beberapa waktu lalu juga memberi dukungan kuat atas usaha Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Yunani menganggap sengketa dapat diselesaikan dari meningkatnya stabilitas regional yang akan terjadi bila Turki menjadi anggota Uni Eropa. Adanya prospek perbaikan hubungan antara kedua negara menunjukkan bahwa diplomasi bencana yang dilakukan sejak terjadinya gempa bumi pada tahun 1999 berujung pada keberhasilan karena mampu merekonsiliasi konflik yang sebelumnya terjadi antara Turki dan Yunani. Sejak terjadinya dua gempa bumi dahsyat yang menghantam Yunani dan Turki pada 1999, kedua negara segera saling membantu dengan mengirimkan berbagai bantuan darurat. Pembicaraan – pembicaraan diplomatik pasca bencana pun terus dilakukan dan menghasilkan serangkaian langkah membangun kepercayaan, yang mampu mengurangi ketegangan di antara kedua negara.

¹⁵Common Ground News. Article.
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=28444&lan=ba&sp=0>
diakses pada 1 Juli 2016

Pada tahun 2010, Turki juga menyatakan niatnya untuk menghapus Yunani dari Dokumen Kebijakan Keamanan Nasional (MSGB), yang mengindikasikan bahwa Turki tak lagi menganggap Yunani sebagai ancaman paling berbahaya baginya.¹⁶ Menteri Luar Negeri Turki saat itu juga menyatakan bahwa Yunani dan Turki kerap mengadakan dialog untuk mengakhiri pertempuran udara jarak dekat yang sering terjadi di atas wilayah – wilayah di Laut Aegea, yang sering mengorbankan nyawa para pilot.¹⁷ Selain itu, Biara Sumela Kristen Ortodoks di Turki juga dibuka kembali bagi masyarakat untuk pertama kalinya dalam 88 tahun terakhir. Pembukaan biara tersebut untuk kegiatan ibadah dilakukan setelah pemerintah Turki mencabut larangan penyelenggaraan kebaktian di tempat itu.

Prospek resolusi konflik kedua negara pasca dilakukannya diplomasi bencana juga ditunjukkan dari diadakannya serangkaian kegiatan oleh Dewan Kerjasama Strategis yang dibentuk untuk mempercepat kerjasama bilateral antara Turki dan Yunani. Dewan ini terdiri atas sepuluh menteri Turki dan tujuh menteri Yunani. Dewan

¹⁶Tempo.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2001/08/27/SEL/mbm..html>
diakses pada 1 Juli 2016.

¹⁷Sindo

News.

International.

<http://international.sindonews.com/read/1073636/41/pesawat-tempur-yunani-dan-turki-kejar-kejaran-di-laut-aegea-1451561424> diakses pada 1 Juli 2016

tersebut pada pertemuan perdananya di Athena menandatangani 22 kesepakatan dan perjanjian kerjasama dalam isu – isu perlindungan lingkungan (termasuk perlindungan keragaman hayati, pertukaran pengalaman dan keterampilan), pendidikan (termasuk perubahan dalam buku – buku pelajaran sejarah yang melestarikan perseteruan kedua Negara) dan pariwisata dengan pengembangan paket perjalanan bersama dan kerjasama dalam pariwisata budaya.¹⁸

Diplomasi bencana antara kedua negara terbukti membawa sisi kemanfaatan dari banyak bidang, terutama karena diplomasi bencana yang dilakukan mampu memperbaiki tegangnya hubungan antara kedua negara. Sejak tahun 1999, pengembangan hubungan Turki – Yunani telah mencapai tingkat penting. Kerjasama strategis tingkat tinggi antara kedua negara bergerak maju ke semua bidang. Konsultasi politik antara kedua negara juga terus dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik dan menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi kedua negara.

¹⁸ TRT. Perbincangan Turki Yunani.
<http://www.trt.net.tr/melayu/dunia/2016/02/28/perbincangan-turki-yunani-441091> diakses pada 1 Juli 2016

Kesimpulan

Diplomasi bencana antara Turki dan Yunani pasca bencana gempa bumi yang melanda kedua negara pada tahun 1999 terbukti mampu merekonsiliasi konflik antara kedua negara. Bencana gempa bumi yang terjadi dalam hal ini berperan sebagai katalis yang mempercepat proses diplomasi antara kedua negara yang notabeneanya berkonflik. Basis diplomasi sejak awal telah dilakukan oleh kedua negara sebelum terjadinya bencana karena kedua negara memiliki fokus yang sama terkait dengan adanya konflik yang berkecamuk di Yugoslavia. Adanya bencana gempa bumi yang melanda kedua negara dan membutuhkan respon cepat, terlebih yang terjadi ketika kedua negara tengah mengadakan pertemuan diplomatik, membuat baik Turki dan Yunani mengesampingkan permasalahan dan konflik masa lampau mereka dan fokus pada penanganan darurat terkait bencana.

Diplomasi yang telah dikembangkan sebelum terjadinya bencana dan pada saat bencana pun kembali dilanjutkan pasca bencana. Hal tersebut berdampak pada perbaikan hubungan kedua negara dan terbentuknya kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pada kasus ini, adanya bencana gempa bumi 1999 yang menyebabkan dilakukannya diplomasi bencana merupakan titik balik

penting dalam upaya rekonsiliasi konflik antara kedua negara. Berkat diplomasi bencana tersebut, hingga saat ini, hubungan baik antara kedua negara masih terus terbina dalam kerangka kerjasama yang menguntungkan satu sama lain.

REFERENSI

- Common Ground News. Article.
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=28444&lan=ba&sp=0> diakses pada 1 Juli 2016
- Deutsch Welle. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3242595,00.html> diakses pada 1 Juli 2016.
- Global Issues. The Cyprus Crisis.
<http://www.globalissues.org/article/114/the-cyprus-crisis> diakses pada 1 Juli 2016.
- Ilan Kelman. *Disaster Diplomacy-how disasters affect peace and conflict*. London and New York:2012. Routledge Taylor and Francis Group.
- Indonesia. Yunani titik pijak dunia barat.
<http://indonesiaindonesia.com/f/12475-yunani-titik-pijak-dunia-barat-modern/> diakses pada 1 Juli 2016.
- Justin McCarthy. *The End of Ottoman Anatolia, in Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire*. New York Univ. Press, 1983.
- Kapan Lagi. Article.
http://www.kapanlagi.com/h/0000161476_print.html diakses pada 1 Juli 2016.
- Library OHIOU.
<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/07/25/0277.html> diakses pada 1 Juli 2016.
- Liputan 6. Gempa Yunani.
<http://m.liputan6.com/global/read/2054366/gempa->

64-sr-yunani-turki-dirasakan-di-bulgaria-270-cedera diakses pada 1 Juli 2016.

Nasuh Uslu. *The Cyprus question as an issue of Turkish foreign policy and Turkish-American relations, 1959–2003*. Nova Publishers. 2003.

Patrick Kinross. *The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire*. Morrow.1977.

Ratih Herningtyas. Surwandono. *Modul Pelembagaan Kapitalisasi Bencana Alam Melalui Diplomasi Bencana*. Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2014.

Richard Clogg. *A Concise History of Greece*. Cambridge University Press.

Sindo News. International.
<http://international.sindonews.com/read/1073636/41/pesawat-tempur-yunani-dan-turki-kejar-kejaran-di-laut-aegea-1451561424> diakses pada 1 Juli 2016.

Static. Eropa.
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/eropa/eropa/siprus_dan_ue.html diakses pada 1 Juli 2016.

Tempo.
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2001/08/27/SEL/mbm..html> diakses pada 1 Juli 2016.

TRT. Perbincangan Turki Yunani.
<http://www.trt.net.tr/melayu/dunia/2016/02/28/perbincangan-turki-yunani-441091> diakses pada 1 Juli 2016.

UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK KASHMIR MELALUI DIPLOMASI BENCANA

Arif Firmansyah I

Secara Historis, istilah Kashmir digambarkan sebagai sebuah lembah di sebelah selatan pegunungan Himalaya. Secara Politis, istilah Kashmir digambarkan sebagai daerah yang lebih luas yang mencakup wilayah Jammu-Kashmir dan Ladakh yang relative rendah dan sangat subur dikelilingi oleh lembah-lembah dan dialiri sungai yang sangat banyak. Kashmir merupakan wilayah administrasi India yang memiliki penduduk muslim hampir 77,11% dari total penduduk (Suwarno, 2012). Meskipun merupakan daerah administrasi India, Negara Pakistan sangat ingin menjadikan wilayah Kashmir sebagai bagian dari wilayah administrasi negaranya sejak kedua Negara merdeka dari jajahan kolonial Inggris. Oleh karena itu, wilayah Kashmir merupakan garis depan konfrontasi antara Pakistan dan India sejak kemerdekaan dari Inggris dengan telah terjadinya tiga perang antara kedua pihak pada tahun 1947, 1965 dan tahun 1999.

Negara modern Jammu dan Kashmir mencakup area seluas 86024 mil persegi (sebelum 1947) memperluas dari 32deg 78' untuk 36deg 58' N dan 73deg 27' untuk 80deg 72' E. termasuk seluruh wilayah Jammu, Ladakh, Gilgit, Hunza,

Punial dan Yasin. Sementara Negara kecil Chitral yang letaknya di sebelah barat laut Gilgit digunakan sebagai daerah untuk membayar upeti kepada penguasa Kashmir. Disebabkan oleh upaya keras dari Maharaja Gulab Singh yang merupakan pendiri dinasti Dogra Hindu di Kashmir dan Kashmir memiliki bentuk Negara seperti sekarang pada pertengahan abad ke-19. Keindahan dan iklim yang menyehatkan di lembah telah dikenal sejak zaman kuno. Mitologi sejarah didukung oleh penelitian geologi yang mengkonfirmasi bahwa lembah tersebut awalnya adalah sebuah danau besar yang disebut Satisar (tanah dewi Sati, istri dewa Siwa) dan erairannya di pendak di dekat Del Gate Srinagar. Dalam kata kata Sir Francis Younghusband "The huge lake must have been twice the length and three times the width of the lake of Geneva, completely encircled by snowy mountains as high, and higher than Mount Blank, while in the immediately following glacial period, mighty glaciers came wending down to the Sindh, Lidder, and other valleys even to the edge of water" (Dhar, 1984). Oleh karena itu wilayah Kashmir dikenal dengan kesuburannya dan keindahan alamnya yang juga merupakan salah satu lokasi yang strategis untuk menghasilkan pendapatan dari sector pariwisata.

Kemudian, konflik antara India dan Pakistan telah terjadi sejak colonial Inggris meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1947 yang juga merupakan tahun kemerdekaan

India dan Pakistan. Kedua Negara tersebut memiliki kepentingan yang sama terhadap wilayah Kashmir yang menyebabkan tiga kali konflik antara kedua Negara. Konflik pertama terjadi pada tahun 1947, konflik ini ditandai dengan status akhir dari Kashmir setelah kemerdekaan India dan Pakistan ketika pemerintah kolonial Inggris mengeluarkan kebijakan yang membebaskan seluruh Negara bagian untuk bergabung dengan India ataupun Pakistan sesuai dengan kondisi demografi dan Geografi. Lokasi Kashmir yang terletak ditengah-tengah India dan Pakistan dan dipimpin oleh Maharaja serta mayoritas penduduknya merupakan Muslim membuat Maharaja sedikit dilematis dalam menentukan untuk bergabung dengan kedua Negara. Pada konflik pertama ini sebanyak 1500 tentara dari Negara India dan Pakistan meninggal dunia (John, 2010).

Konflik kedua terjadi pada tahun 1965, konflik ini digagas oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan percaya bahwa setelah kekalahan India dari China, pemerintah India tidak bisa dan tidak mau membela terhadap sebuah kampanye militer di Kashmir dan pemerintah Pakistan juga mulai khawatir dengan semakin kerasnya usaha-usaha pemerintah India untuk mengintegrasikan Kashmir menjadi wilayahnya. Konflik ini juga disebabkan oleh munculnya persepsi bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah Kashmir tidak puas dengan kepemimpinan pemerintah India (John, 2010).

Konflik terakhir terjadi pada tahun 1999 yang juga disebut sebagai perang Kargil. Konflik ketiga ini dipicu oleh kegiatan dari angkatan bersenjata Pakistan dan Kashmir militant terdeteksi di pegunungan Kargil dimana kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri maneuver bersenjata (John, 2010). Pemerintah Pakistan mengupayakan untuk membahas kasus Kargil pada KTT Lahore tahun 1999, Kedua Perdana Menteri bertemu di Lahore Nawaz Sharif dari Pakistan dan Bahari Vajpayee Atal dari India. KTT Lahore sendiri diyakin bisa mengurangi tensi tinggi antara kedua pemerintah yang terjadi setelah peristiwa Kargil dan alasan lainnya yaitu untuk menginternasionalisasikan konflik Kashmir antara India dan Pakistan dan untuk mendapatkan perhatian lebih dari dunia global. Kemudian rencana perdamaian muncul dari Kepala Staf TNI, Gen Pervez Musharraf dan Lt Gen Mohammed Aziz, kepala staf umum. Namun, mereka diperoleh hanya 'dalam prinsip' kesepakatan, tanpa detail dari Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan. Kemudian, operasi militer Angkatan Darat India yang juga disebut sebagai operasi Vijay terjadi pada tahun 1999. Angkatan Darat India 's dimobilisasi ke wilayah Kashmir Pakistan dengan perlindungan udara yang disediakan oleh pesawat dan helikopter. Vijay operasi dalam Jammu dan Kashmir sebagai bagian dari distrik Kargil adalah upaya infanteri-artileri bersama untuk menghapus Angkatan bersenjata Pakistan dari Northern Light Infanteri

(Perpusnas) yang telah terganggu di garis kontrol (LoC) untuk wilayah India dan telah mengambil puncak gunung dan garis-garis penunangan lainnya.

Pada tahun 2001, setelah konflik ketiga berakhir dan tensi antarapemerintah India dan Pakistan tetap tinggi setelah penyeragan pada Majelis Kashmir di Srinagar dan menyebabkan 38 orang terbunuh. Setelah serangan terjadi, Farooq Abdullah, kepala menteri di administrasi Kashmir India menyerukan pemerintah India untuk memulai operasi militer besar-besaran terhadap kamp-kamp pelatihan Pakistan. Selanjutnya untuk meredakan tensi antara keduabelah pihak, presiden Pakistan dan perdana menteri India bertemu di kota Agra India untuk membahas inti dari konflik antara India dan Pakistan akan tetapi mengalami kegagalan. Kemudian pada KTT ke-12 SAARC di Islamabad tahun 2004, kedua belah pihak melakukan pembicaraan kembali mengenai konflik tersebut dan ini ditandai sebagai awal dari proses dialog antara pemerintah India dan Pakistan dimana akhirnya pertemuan bilateral dilakukan diberbagai level pemerintahan termask kementrian luar negeri dan pejabat pejabat militer.

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik antara pemerintah India dan Pakistan adalah melalui upaya diplomasi bencana, pada 2001 gempa bumi berkekuata tinggi terjadi di wilayah barat India dimana hamper 20.000 orang meninggal dunia dan paling para

terjadi di wilayah Gujarat. Kemudian kedua beahpihak bertemu untuk membahas bencana tersebut dan pemerintah Pakistan menawarkan bantuan dan juga disambut baik oleh pemerintah India dengan menerima bantuan tersebut. Hubungan kedua Negara mengalami peningkatan pada saat gempa dan Tsunami terjadi di wilayah Asia dan membunuh hamper 10.00 orang di India dan pada tahun 2005 ketika gempa bumi berkekuatan 7,6 mengguncang Kashmir dan membunuh hampir 70.000 orang di Pakistan termasuk wilayah Kashmir Pakistan dan 10.000 orang India meninggal dunia dan kedua Negara bergerak cepat dalam mengatasi bencana termasuk beberapa bantuan dating dari dunia internasional. Beberaapa ilmuan juga percaya bahwa bencana tersebut merupakan salah satu upaya untuk menawarkan perdamaian antara India dan Pakistan melalui Diplomasi Gempa Bumi.

Studi Pustaka

Telah banyak akademisi yang membahas tentang diplomasi bencana diantaranya yaitu Dr. Surwandono dan Ratih Hernigtyas MA dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Pelembagaan Kapitalisasi Bencana Alam Melalui Diplomasi Bencana. Tulisan tersebut menjelaskan tentang peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam mengkapitalisasi bencana alam sebagai modal kerjasama internasioal oleh pemerintah daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia

sebagai Negara yang sangat rawan terjadi bencana bisa menggunakan bencana tersebut sebagai salah satu form baru dalam menjalin kerjasama internasional. Sebagai salah satu form soft diplomacy juga maka dibutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan bencana sebagai salah satu alat untuk meraih kepentingan nasional negaranya.

Selanjutnya dalam tulisan tersebut dijelaskan beberapa bentuk diplomasi bencana alam yang memiliki 2 bagian yaitu diplomasi intra-negara dan antar Negara. Diplomasi bencana intra-negara yang berhasil yaitu pada kasus konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia, dalam kasus bencana di Aceh, bencana dijadikan alat untuk menjalin perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam hal ini gempa bumi dan tsunami yang besar yang saat itu melanda wilayah Asia sempat menghambat proses perjanjian damai yang sebelumnya telah dirancang oleh kedua belah pihak, kemudian setelah bencana tersebut akhirnya rekonstruksi damai dibuat dengan bantuan dari pemerintah Finlandia dan Aceh Monitoring Team. Dan yang berbentuk antar Negara yaitu konflik antara Turki dan Yunani.

Tulisan kedua ditulis oleh Ilan Kelman tentang Disaster Diplomacy "how disaster affect peace and conflict". Dalam buku Disaster Diplomacy Ilan Kelman mendeskripsikan bagaimana Bencana Alam bisa menjadi

salah satu Soft Power untuk meraih kepentingan nasional dan perjanjian damai antar Negara. Di dalam buku ini juga, Ilan Kelman menyajikan berbagai studi kasus dalam bentuk Disaster Diplomacy di beberapa Negara yang rawan akan bencana alam dan mendeskripsikan bagaimana kegagalan dan kesuksesan diplomasi bencana yang coba diterapkan untuk mengakhiri beberapa konflik di berbagai beahan dunia. Selajutnya, dalam bukunya Ilan Kelman juga membahas tentang kendala-kendala yang menjadikan diplomasi bencana gagal di aplikasikan dan bagaimana diplomasi bencana berkembang dari tahun ke tahun.

Diplomasi bencana mulai menjadi perhatian dan mengalami perkembangan bagi peneliti ketika salah satu Negara yang sedang berkonflik mengalami bencana alam hingga akhirnya dijadikan kesempatan untuk secara soft power melakukan perjanjian perdamaian. Untuk itu, buku Ilan Kelman ini menganalisis bagaimana dan mengapa bencana bisa mengurangi konflik dan merangsang kerjasama baru antara Negara yang terlibat. Sebelumnya menurut UNISDR bencana merupakan gangguan serius dari fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan perluasan manusia, bahan material, ekonomi dan kerugian lingkungan dan dampaknya melebihi kemampuan komunitas untuk mengatasi dengan sumber dayanya sendiri.

Selanjutnya sebagai gabungan dari dua konsep Diplomasi dan Bencana, menurut Ilan Kelman Diplomasi Bencana merupakan studi tentang bagaimana dan mengapa bencana alam berkontribusi atau tidak terhadap perdamaian atau konflik yang diteliti sebelum atau sesudah bencana. Dalam konteks sebelum bencana, diplomasi bencana ini berbicara tentang pencegahan, mitigasi, dan upaya untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa. Kemudian dalam konteks setelah bencana diplomasi bencana berbicara tentang bagaimana konflik dan perdamaian dipengaruhi oleh bencana alam. Selanjutnya Ilan Kelman menjelaskan diplomasi bencana berdiskusi tentang peran dari aktifitas terkait bencana alam tidak hanya dalam hubungan internasional, namun juga aktifitasnya terkait dengan kasus konflik politik dalam sebuah Negara merdeka.

Menurut UNISDR diplomasi bencana alam mengeksplorasi bagaimana dan mengapa pengurangan dampak bencana, baik selama pra-bencana termasuk pencegahan dan mitigasi bencana dan pasca-bencana termasuk respond dan pemulihan berkontribusi atau tidak bagi kerjasama dan perdamaian. Aspek dari diplomasi bencana sebenarnya sudah lama dipelajari dan di aplikasikan sebagaimana Olson menjelaskan sejarah dari literatur diplomasi bencana tapi masih dalam persektif Amerika pada tahun 1925 dan saat itu adalah bencana dalam proses demokratisasi.

Selanjutnya dalam bukunya Ilan Kelman juga menerangkan beberapa contoh studi kasus tentang diplomasi bencana, antara lain bencana Tsunami Aceh dan Sri Lanka pada tahun 2004, bencana badai Katrina tahun 2005, gempa bumi di Turki tahun 1999 dan sebagainya.

Tulisan ketiga ditulis oleh Dr. Surwandono dan Ratih Herningtyas MA dengan judul Diplomasi Bencana Alam sebagai sarana untuk meningkatkan Kerjasama Internasional. Tulisan tersebut mengkaji bagaimana isu bencana di Indonesia dapat dimodifikasi menjadi modal sosial untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, politik dan sosial budaya di daerah rawan bencana. Indonesia sangat rentan dengan bencana. Beberapa bencana terakhir dan paling menghancurkan adalah gempa bumi disusul tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa tengah pada 2006, dan erupsi merapi di Gunung Merapi dan Jawa Tengah pada 2011.

Indonesia adalah negara yang secara faktual sangat rawan oleh terjadinya bencana alam. Dalam laporan UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), sebagai sebuah badan PBB yang menangani perihal strategi penanggulangan bencana global, pada tahun 2010 mempublikasikan "The Asia Pacific Disaster Report 2010", disebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah korban meninggal akibat bencana alam kedua terbesar di Asia Pasifik, dalam rentang waktu 20 tahun

terakhir sebanyak 191.164 jiwa. Selain itu, dalam laporan ini juga dipaparkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita Indonesia mencapai US\$ 22,5 miliar. Lebih jauh lagi Bappenas dalam laporannya juga melansir bahwa bencana alam di Indonesia hingga tahun 2007 saja telah menimbulkan pengeluaran pemerintah sebesar US\$ 12 triliun, atau sekitar Rp. 110 triliun.

Bencana alam menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan di Indonesia mengingat posisi Indonesia yang berada pada pertemuan 4 lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia; Lempeng Australia; Lempeng Pasifik; dan Lempeng Filipina, sangat berpengaruh pada intensitas kebencanaan geologis di Indonesia. Adanya pertemuan lempeng-lempeng dunia yang terus aktif bergerak ini berimplikasi pada munculnya rantai kegunungapian yang melintang dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, ke Maluku. Akibat aktivitas tektonik dan vulkanik ini bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, letusan lava dan gas gunung api menjadi sering terjadi di Indonesia. Arnold, seorang peneliti geologis asal Amerika Serikat, menuliskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kegempaan tertinggi di dunia, 10 kali lebih tinggi dibanding Amerika Serikat. Dari semua bencana alam di Indonesia semenjak 15 tahun terakhir hanya gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 yang ditetapkan pemerintah sebagai “bencana nasional”. Hal ini dikarenakan baik Pemkab, Pemkot, dan

Pemprov Aceh sudah tidak mampu menangani bencana dengan skala massif ini, dengan lebih dari 180.000 korban jiwa dan kerugian ekonomi di atas Rp. 45 trilyun.

Pembahasan

Menurut UNISDR bencana merupakan gangguan serius dari fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan perluasan manusia, bahan material, ekonomi dan kerugian lingkungan dan dampaknya melebihi kemampuan komunitas untuk mengatasi dengan sumber dayanya sendiri. Selanjutnya sebagai gabungan dari dua konsep Diplomasi dan Bencana, menurut Ilan Kelman Diplomasi Bencana merupakan studi tentang bagaimana dan mengapa bencana alam berkontribusi atau tidak terhadap perdamaian atau konflik yang diteliti sebelum atau sesudah bencana. Dalam konteks sebelum bencana, diplomasi bencana ini berbicara tentang pencegahan, mitigasi, dan upaya untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa. Kemudian dalam konteks setelah bencana diplomasi bencana berbicara tentang bagaimana konflik dan perdamaian dipengaruhi oleh bencana alam. Selanjutnya Ilan Kelman menjelaskan diplomasi bencana berdiskusi tentang peran dari aktifitas terkait bencana alam tidak hanya dalam hubungan internasional, namun juga aktifitasnya terkait dengan kasus konflik politik dalam sebuah Negara merdeka.

Menurut UNISDR diplomasi bencana alam mengeksplorasi bagaimana dan mengapa pengurangan

dampak bencana, baik selama pra-bencana termasuk pencegahan dan mitigasi bencana dan pasca-bencana termasuk respond dan pemulihan berkontribusi atau tidak bagi kerjasama dan perdamaian (Kelman, 2012).

Upaya untuk menyelesaikan konflik Kashmir beberapa kali dilakukan oleh pemerintah India dan Pakistan melalui beberapa KTT baik itu yang bersifat local maupun regional. Ketika gempa bumi melanda India dan Kashmir maka Diplomasi Bencana bisa diaplikasikan sebagai bentuk form perjanjian damai baru antara pemerintah India dan pemerintah Pakistan menurut Kelman ada beberapa kategori dalam Diplomasi Bencana yaitu diantaranya *Avoiding forcing, focusing on Disaster, not Diplomacy, Informant network, Multiple level/tracks, Multi-way process, Science and Symbolism.*

Avoiding forcing mengacu pada bahwa diplomasi bencana tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa di aplikasikan pada kasus tertentu. Sebagaimana proses diplomasi lainnya komunikasi yang berkelanjutan dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dan untuk menghindari miskomunikasi dan salah kaprah. *Focus on Disaster, not Diplomacy* berarti bahwa menunda untuk menghubungkan kegiatan terkait bencana alam terhadap diplomasi, pendekatan seperti ini sangat jelas akan menghambat diplomasi bencana itu sendiri akan tetapi pendekatan ini akan memungkinkan membentuk kerjasama bencana yang

selanjutnya akan menjadi landasan diplomasi. Kolaborasi dalam aktifitas bencana tanpa adanya harapan dimasa depan bisa menubuhkan kepercayaan, koneksi baru, dan ilustrasi sukses.

Informal networks mengacu kepada komunikasi dan interaksi jauh dari bentuk formal. Itu bisa saja efektif dalam mengaplikasikan Diplomasi Bencana yang kemudian menjadi acuan kerjasama yang baru. Multiple Level/tracks sebagai salah satu acuan bahwa diplomasi bencana biasanya mengalami kegagalan. Apabila diplomasi bencana hanya dipimpin oleh pemerintah berdaulat, kemudian orang-orang bisa merusak usaha tersebut seperti contoh kasus di Sri Lanka. Multi-way process dibutuhkan dalam usaha mengsucceskan upaya diplomasi bencana, dalam diplomasi bencana diperlukan pertukaran informasi dan komunikasi antara aktor yang terlibat didalamnya membuat konsesi dan pertukaran akan sangat dibutuhkan dalam kesuksesan diplomasi bencana. Yang terakhir yaitu dengan Science yang merupakan beberapa derajat untuk jaringan informal. Pertukaran ilmiah dan teknis disemua tingkatan pemerintahan maupun swasta selain individu mengambil inisiatif, jaringan informal ini telah sering menyediakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lainnya (Kelman, 2012).

Pada bencana Gempa Bumi tahun 2005, pemerintah India dan Pakistan berkolaborasi untuk merespon bencana alam tersebut dengan mengurangi hambatan dan batasan di

Line of Control. Ditandai dengan memudahkannya beberapa anggota keluarga untuk berinteraksi secara bebas dan mudah dan pemerintah India membuka lima lokasi di Line of Control untuk memudahkan pasukan pemberi bantuan untuk melintasi daerah tersebut dengan mudah dimana sebelumnya wilayah Line of Control begitu memiliki penjagaan ketat dan begitu terlarang bagi masyarakat biasa. Dengan adanya peristiwa tersebut beberapa media local dan internasional memberikan dukungannya terhadap Diplomasi bencana tersebut. Bencana gempa bumi membawa Kashmir menjadi mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional dan membantu membuat Line of Control lebih berpori sehingga bisa mengatasi perpecahan dan permusuhan yang diakibatkan oleh perbatasan tersebut. Diplomasi Gempa Bumi secara signifikan bisa mendorong proses perdamaian di Kashmir.

Setelah gempa bumi terjadi, pemerintah India dan Pakistan telah setuju untuk menyelesaikan seketika mengenai Kashmir dengan menarik mundur pasukan dari Kashmir dan pembukaan Line of Control begitu penting bagi kedua pemerintah dalam upaya mencari perdamaian dalam kasus Kashmir, akan tetapi pembukaan tersebut bisa saja menimbulkan konflik baru diantara pemerintah India dan Pakistan. Lebih jauh lagi ketika upaya Diplomasi Bencana dilakukan kedua belah pihak, kekerasan dan konflik masih berlangsung di kedua bagian Negara termasuk di Kashmir.

Setelah Gempa Bumi terjadi, menteri pendidikan Kashmir India disandera pada 18 oktober dan serangan bom di New Delhi menewaskan hampir 50 orang seminggu setelah penyanderaan tersebut sementara beberapa daerah di Pakistan mengalami beberapa serangan bom bunuh diri yang mengakibatkan kerusakan yang besar.

Sebagi salah satu bentuk Soft Power, diplomasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah India dan Pakistan untuk mengupayakan perdamaian terkait sengketa Kashmir merupakan langkah yang penting apalagi setelah gempa bumi yang begitu besar mengguncang Kashmir dan dibukanya Line of Control untuk mempercepat bantuan bagi korban jiwa di Kashmir. Akan tetapi pada kasus Kashmir ini dimana konflik telah berlangsung lama dan beberapa upaya perdamaian senantiasa gagal dan mengalami kebuntuan maka Diplomasi Bencana pun sama seperti upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pemerintah mengalami kegagalan, namun dengan terjadinya bencana di Kashmir pada 2005 sedikit meredakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana antara pemerintah India dan Pakistan saling membantu dalam pemukiman pasca bencana dan sama sama memberikan bantuan pada bencana alam yang terjadi baik di Gujarat maupun di Kashmir.

Sebagaimana menurut Kelman dalam *Disaster Diplomacy*, diplomasi bencana antara India dan Pakistan mengenai sengketa Kashmir termasuk kategori Multi-way

proses dimana dibutuhkan peran dari semua actor yang terlibat untuk kemudian bekerjasama mengatasi konflik tersebut akan memudahkan mencari titik temu untuk upaya perdamaian sengketa Kashmir. Sebagaimana bentuk diplomasi yang lainnya, untuk mengsucceskan diplomasi bencana seperti yang dilakukan pemerintah Turki dan Yunani dan pemerintah Amerika dan Kuba. Dengan kondisi penduduk Kashmir yang beragam dan jumlah organisasi-organisasi yang begitu banyak dan berbeda-beda menjadi salah satu penghambat suksesnya diplomasi bencana antara pemerintah India dan Pakistan. Konflik antara India dan Pakistan ini tidak sesimple konflik antar Negara lainnya, dimana banyak kepentingan dari actor-aktor yang terlibat, erlebih adanya beberapa militant grup yang lebih memilih untuk menjadikan Kashmir menjadi Negara yang berdaulat dan merdeka dari India maupun Pakistan.

Kesimpulan

Sengketa Kashmir yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan India dan Pakistan dari pemerintah colonial Inggris, menjadikan sukar untuk diselesaikan secara singkat melalui upaya apapun, perlu adanya kesadaran dari semua pihak yang terlibat untuk memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Beberapa KTT yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun oleh SAARC selaku organisasi regional di Asia Selatan senantiasa

mengalami kegagalan dan kebuntuan yang megakibatkan konflik tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

Kemudian ketika bencana Gempa Bumi terjadi di Gujarat dan Kashmir, Diplomasi Bencana dilakukan oleh pemerintah India dan Pakistan lagi-lagi mengalami kebuntuan. Dimana proses atau upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut hanya sampai pada titik pembukaan Line of Control sebagai upaya melancarkan bantuan kepada para korban bencana yang terjadi di Kashmir pada tahun 2005.

Diplomasi Bencana tentunya masih memiliki beberapa hambatan dalam upayanya menjadi salah satu bentuk yang diplomasi yang bisa digunakan terutama pada beberapa Negara dengan potensi bencana yang tinggi. Tentunya ketika semua elemen pendukung dari Diplomasi Bencana bisa bekerjasama dalam mengupayakan perdamaian melalui Diplomasi Bencana maka diplomasi tersebut bisa jadi merupakan salah satu bentuk diplomasi yang efektif dimasa mendatang.

REFERENSI

- Dhar, P. L. (1984, June). *Kashmir the Crown of India*. Retrieved July 4, 2016, from koausa.org:
<http://www.koausa.org/Crown/history.html>
- John, P. (2010). *Global Security.org*. Retrieved July 04, 2016, from Kashmir:
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kashmir.htm>
- Kelman, I. (2012). *Disaster Diplomacy*. New York: Routledge.
- Suwarno. (2012). *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta: Ombak.

ISU LINGKUNGAN GLOBAL *DALAM PERSPEKTIF*
ISLAM
Kairiyyah

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 164 yang berbunyi "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering) nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang

dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Maka perlu diteliti dengan cermat untuk memperoleh pengetahuan lengkap tentang kerumitan yang terdapat dalam lingkungan hidup, agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan setepat mungkin. Dapat mempertahankan produktivitas, dapat menghindarkan kerusakan, dapat menjaga kelestarian demi generasi penerus yang akan mewarisi lingkungan hidup beserta aneka sumber dayanya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang dibebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.¹

¹ 1983, Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta

Menyadari manusia dicipta dan dibangun dari komponen-komponen tanah dan oleh karena itu manusiapun bertanggung jawab sebagai pembangun, pemelihara dan pemakmur tanah. Karena pembangunan itu sendiri adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan menjangkau menjangkau semua segi lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang secara strategi mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan.

Kajian Pustaka

Menurut Budiharjo dan Sudjarto pengertian pembangunan berkelanjutan adalah : kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut UNEP (United Nation Environmental Program) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Menurut *Brutland Report* dalam sidang PBB tahun 1987,

pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut *sustainable development* merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam *Stockholm United Nation Conference on Human Enviromental* pada tahun 1972 atau dikenal sebagai Deklarasi Stockholm adalah sebagai berikut : segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial,

lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan².

Pembahasan

Dewasa ini masalah pembangunan keberlanjutan (sustainability issues) merambah di semua bidang kehidupan manusia, isu sustainable development diawali dari pernyataan pentingnya kesadaran segenap pihak tentang berbagai isu lingkungan global. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.³ Brundtland dalam (Budihardjo & Sujarto, 1999).

Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini sekaligus

² <http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-pembangunan-berkelanjutan.html>

³ Brundtland dalam Budihardjo & Sujarto, 1999

menjadi tantangan konsep pembangunan ekonomi neoklasikal yang merupakan konsep pembangunan konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa *sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumberdaya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil/produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan.

Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau

perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.⁴ Ayat –ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

A. Surat Ar Rum [30] ayat 41-42 tentang Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42)

Isi kandungan Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Kecerobohan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia

⁴ Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko, 1999, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni, Bandung

itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

⁵ Departemen Agama RI, 1985, Alqur'an dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, Jakarta.

B. Surat Al A'raf [7] Ayat 56-58 tentang Peduli Lingkungan

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A'raf : 56-58)

Isi Kandungan :

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu

diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan, hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain (lihat QS Al Qasas : 4).⁶

Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus.

⁶ A. Hasjmy, 1974, *Dustur Da'wah Menurut Alqur'an*, Bulan Bintang, Jakarta

Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, Dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.⁷

Kesimpulan

Isu lingkungan telah menjadi isu yang sangat krusial di bahas di dunia Internasional dan menjadi topik yang hangat untuk di perbincangkan. Dalam makalah ini penulis berusaha mengaitkan antara isu lingkungan global dengan perspektif islam. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan salah satu konsep untuk menangani isu lingkungan global. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

⁷ ibid

Dalam Al-qur'an juga telah terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan suruhan untuk menjaga lingkungan yang terdapat dalam Surat Ar Rum ayat 41-42 tentang Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi dan Surat Al A'raf ayat 56-58 tentang Peduli Lingkungan. Berdasarkan penjabaran di atas dan Ayat yang terkandung dalam Al-qur'an maka dapat kita simpulkan bahwa Islam sangat peduli terhadap isu lingkungan hingga ada ayat yang mengatur hal tersebut, dan bagaimana seharusnya kita sebagai khalifah di muka bumi ini dapat mengelola alam dengan sebaik-baiknya serta mengambil manfaatnya dan menjaga kelestariannya.

REFERENSI

- Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup, 1983,
Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta
- Brundtland dalam Budihardjo & Sujarto, 1999
- Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko, 1999, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni, Bandung
- Departemen Agama RI, 1985, Alqur'an dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, Jakarta.
- Hasjmy, 1974, Dustur Da'wah Menurut Alqur'an, Bulan Bintang, Jakarta

Internet

<http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-pembangunan-berkelanjutan.html>

http://www.kau.edu.sa/Files/121/Researches/56961_27272.pdf

KEGAGALAN KUDETA MILITER TURKI
TAHUN 2016
M Kholit Juani

Turki telah mengakhiri rezim militer dan mengalahkan ideologi kudeta sejak terpilihnya Erdogan sebagai pemimpin baru di Turki. Selain itu, Turki dalam era kepemimpinannya yang baru telah menetapkan berbagai reformasi maupun kebijakan-kebijakan baru yang lebih cenderung mengurangi campur tangan militer dalam sistem pemerintahannya. Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan ini tidak hanya untuk kepentingan partainya saja namun juga untuk seluruh rakyat. Turki telah mendapatkan kemenangan yang demokratis dari rakyat.

Atas kemenangannya ini terdapat berbagai dimensi dan perubahan yang mendasar dan telah menjadi konsekuensi dari sebuah amandemen konstitusi Turki, yang mana amandemen tersebut telah membuat Turki mengalami pembaharuan. Dimensi-dimensi yang telah mengalami perubahan tersebut antara lain pertama, diakhirinya campur tangan militer dalam sistem politik dan pemerintahan di Turki, sehingga tugas dan kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, maka Dewan Permusyawaratan Tertinggi Militer tidak lagi dapat melindungi para

perwiranya yang terkena kasus kejahatan ketika dilakukan investigasi, sehingga mereka hanya bisa mengajukan tuntutan hukum di hadapan pengadilan sipil.

Kedua, adanya penghapusan mengenai peraturan perundangan pasal 15 yang bersifat temporer dan konstitusi kudeta pada tahun 1982, dimana terdapat larangan dalam pengajuan tuntutan hukum terhadap para pelaku dan otak dari kudeta militer pada tahun 1980, yang memberikan kewenangannya terhadap para korban dari kudeta tersebut untuk dapat mengajukan tuntutan hukum kepada mereka yang diadukan ke pengadilan. Dengan dihapusnya pasal ini secara tidak langsung juga telah menghambat aksi kudeta militer terhadap demokrasi ataupun upaya apapun untuk melarang kehendak rakyat.

Ketiga, amandemen konstitusi tersebut telah membatasi dan mengurangi secara signifikan beberapa point penting serta campur tangan pengadilan seperti yang terjadi pada lembaga Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Konstitusi melalui demokrasi sebagai bagian dari dirinya; yaitu dengan penambahan anggota baru pada masing-masing lembaga tersebut. Dengan penambahan anggota dalam lembaga tersebut maka akan merubah perimbangan kekuatan didalamnya.

Keempat, dengan perubahan Amandemen Konstitusi ini maka akan melindungi partai-parti politik dari ancaman pembubaran yang sewenang-wenang.

Pembubaran partai ini menjadi tanggung jawab parlemen dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Pembubaran dapat dilakukan ketika partai tersebut melakukan tindakan anarkisme dan melawan konstitusi. Kelima, amandemen konstitusi ini telah membentangkan beberapa perubahan besar terhadap anak-anak, kaum perempuan, dan para lansia dari belunggu Mahkamah Konstitusi yang telah lama tertanam dalam diri mereka, serta telah menghapuskan larangan penggunaan jilbab, memperkeras suara Adzan maupun pembacaan surat-surat Al-Quran. Singkatnya, pada dasarnya amandemen konstitusi yang telah dilaksanakan pada September 2010 telah melahirkan Turki dalam periode baru dari segi keamanan, militer, pengadilan, dan politik (Taghian, 2015).

Dengan adanya berbagai perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Turki ini tentu saja terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan atas sistem pemerintahan yang baru tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu ketegangan antar lembaga, yang pada akhirnya terjadilah kembali kudeta militer yang dilakukan oleh sekelompok pemimpin militer Turki untuk menggulingkan Erdogan. Aksi ini telah terjadi tepatnya pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan ketegangan antara militer Turki dengan pemerintah Turki. Namun, aksi ini tidak berlangsung lama, berkat dukungan yang kuat dari

rakyat atau pendukung Erdogan, aksi Kudeta ini dapat digagalkan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 24 jam.

Banyak yang berspekulasi bahwa aksi kudeta militer ini didalangi oleh Fethullah Gullen yang pada waktu terjadinya aksi kudeta militer tersebut sedang berada di Amerika Serikat. Namun, banyak pula yang beranggapan bahwa kudeta militer yang terjadi pada Juli 2016 tersebut hanyalah skenario Erdogan tentang kekuatan dan kekuasaan Erdogan sehingga dapat memunculkan spekulasi baru pada rakyat Turki maupun di mata dunia dan menjadikan dirinya sebagai Presiden seumur hidup, dengan keberhasilan Erdogan dalam menggagalkan kudeta militer tersebut akan menambah kekuatan besar bagi Erdogan berupa dukungan lebih yang berasal dari rakyat maupun negara lain (Aini, 2016).

Kajian Pustaka

Tabel I: *Literature Review*

Nama	Judul	Hasil
Miftachul Choir Al Ayyubi	Militer dan Politik : Studi Kasus Kudeta Militer pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir Tahun 2013	Dalam setiap negara yang menjalankan demokrasi, kudeta dianggap sebagai hal yang melanggar nilai-nilai yang ada pada demokrasi. Kudeta menjadi tindakan yang ilegal karena secara paksa mengambil kekuasaan dari pemerintah yang secara demokratis sudah terpilih lewat pemilu. Tentara yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengaman negara, namun malah menjadi penentu

Nama	Judul	Hasil
		kebijakan. Membuat demokrasi yang baru saja dijajaki mesir menjadi tidak sempurna dan mencederai demokrasi secara sesungguhnya.
Afif Pratama Putra	Perbandingan Upaya Freedom of Justice Party (FJP) Mesir dan Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Turki dalam Menghadapi Ancaman Kudeta Militer	- Pemerintahan sipil (FJP) yang terbentuk dari pemilu demokratis pertama dalam sejarah mesir harus kandas karena dibubarkan oleh MK. Hal ini berkebalikan dengan AKP di Turki, dimana setelah memenangi pemilu pertama mereka sejak tahun 2002 berhasil mempertahankan kekuasaan sipil

Nama	Judul	Hasil
		<p>mereka dari rongrongan intervensi militer melalui usaha-usaha kudeta yang beberapa kali dilakukan oleh militer.</p> <p>- Erdogan yang memimpin AKP mampu menjaga eksistensi kekuasaan mereka dalam pemerintahan.</p> <p>- sejak FJP berkuasa pemerintahan Mursi menghilangkan hak istimewa militer dan minim upaya depolitisasi militer. Sedangkan AKP dimana Erdogan mampu mengurangi kewenangan istimewa militer</p>

Nama	Judul	Hasil
		namun tetap memberikan hak pengambilan keputusan politik terkait lingkungan ancaman kepada militer dan berupaya melakukan depolitisasi militer
Syarif Taghian	Penghancuran berhala sekularisme Attaturk : Setengah Abad Kudeta	Dalam sejarah Turki menunjukkan bahwa telah terjadi empat kali kudeta militer yang dimulai sejak tahun 1960, 1971,1980, dan 199

Kerangka Berfikir

Seperti yang telah dijelaskan di atas dan berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah tersebut, disini penulis menggunakan teori perdamaian demokratik atau *democratic peace theory*. Teori perdamaian demokratik merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa dengan adanya sistem demokrasi pada suatu negara

maka dengan sadar negara tersebut akan berusaha untuk menghindari konflik dan lebih memilih perdamaian, terkecuali perang/konflik karena terpaksa dan untuk melindungi diri. Pemahaman ini pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant pada tahun 1795 silam (Mtholyoke, 2014).

Dnegan menggunakan teori tersebut, penulis berusaha mengkaitkannya dengan kudeta militer yang terjadi di Turki baru-baru ini. Turki yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya cenderung untuk menggunakan cara-cara yang lebih halus atau sederhana untuk menghadapi hal tersebut. Turki lebih memilih untuk menggunakan kekuatan rakyat untuk menggagalkan proses kudeta yang sedang berlangsung dibanding harus melawan aksi kudeta militer dengan cara perang. Hal ini terlihat dengan aksi rakyat atas dukungan Erdogan sebagai pemimpin negara untuk turun langsung dan berkumpul memenuhi titik-titik di suatu kawasan tertentu untuk memblokade meluasnya serangan dari aksi kudeta militer yang terjadi.

Pembahasan

Turki merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam perkembangannya, telah banyak perubahan-perubahan baru ynag tercipta dari para pemimpin baru Turki. Perkembangan-perkembangan

tersebut tercipta atas terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Turki. Perubahan yang membawa dampak positif bagi Turki bahkan sampai kancah internasional. Namun terjadinya perubahan-perubahan tersebut juga sering kali membawa dampak negatif oleh Turki yang mendorong terjadinya aksi anarkis maupun kudeta militer.

a. Sejarah Kudeta Militer Turki

Aksi kudeta militer yang terjadi di Turki ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi Turki. Sebelumnya telah beberapa kali terjadi aksi kudeta militer Turki sebelum kepemimpinan Erdogan. Aksi kudeta militer ini pertama kali terjadi pada tanggal 27 Mei 1960. Walaupun pada masa tersebut telah banyak berbagai perkembangan maupun kemajuan dalam sektor ekonomi, namun kelompok sekuler dengan senantiasa selalu menentang kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan yang di putuskan dalam sistem pemerintahan Turki. Sehingga kelompok-kelompok tersebut melakukan konspirasi dan provokasi terhadap pihak militer, yang kemudian mengadakan demonstrasi, serta menimbulkan terjadinya banyak kekacauan dalam masyarakat Turki itu sendiri, yang kemudian hal ini mendorong militer untuk turun tangan.

Pada tahun 1965, partai Keadilan (*Adelet Partisi*) berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif. Partai

tersebut dipimpin oleh Suleyman Demirel, sang penguasa bendungan. Suleyman mendapatkan julukan tersebut karena dalam pemimpinannya berfokus pada bidang tersebut. Atas keberhasilannya dalam membangun infrastrukturnya, maka Suleyman mendapatkan popularitasnya atas rakyat Turki yang bangga akan kinerjanya selama memimpin Turki. Hal ini juga mendorong Suleyman menjadi semakin eksis dalam dunia perpolitikan dan membawanya menuju puncak kekuasaan (Taghian, 2015).

Kekuasaan yang diperoleh Suleyman hanya bertahan hingga tahun 1970. Setelah itu, ia kehilangan kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena adanya kekacauan dalam kalangan kelompok muslim yang bersitegang karena berdebat untuk menentukan siapa yang lebih berhak dalam mewarisi partai tersebut. Hal ini mendorong terjadinya kudeta militer yang kedua kalinya di Turki, yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1971.

Kemudian pada tanggal 12 September 1980, terjadilah kudeta militer yang ketiga di Turki dengan kondisi dalam negerinya yang tidak jauh beerbeda. Kudeta militer yang ketiga ini lebih bersifat kedaerahan, yang artinya Turki harus melawan pemberontakan yang berasal dari suku Kurdi di sisi lain negara tersebut. Selain itu, suasana politik yang terjadi di tingkat regional kawasan Turki juga sedang mengalami pergolakan, dimana sedang

terjadi revolusi islam di Iran, terjadinyaperang teluk antara Iran denan Irak, dan pergolakan-pergolakan internasional lainnya (Taghian, 2015).

Kudeta yang ketiga ini menimbulkan kesan yang mendalam bagi ranah politik Turki. Dalam kudeta militer kali ini, militer semakin memperkuat eksistensinya didalam panggung politik Turki. Meskipun ada undang-undang yang melarang adanya campur tangan militer dalam sistem politik di Turki, namun peraturan itu tidak pernah bisa diterapkan secara maksimal.

Selanjutnya pada tanggal 28 february 1997, terjadi kembali kudeta militer yang keempat. Kudeta militer yang terjadi di Turki kali ini dikenal dengan sebutan "*kudeta post modern setelah kudeta*". Kudeta tersebut terjadi dimana ketika pihak militer mengerahkan semua pasukannya untuk menurunkan senjata berlapis baja ke jalan-jalan di Ankara dan memaksa perdana menteri yang ketika itu dijabat oleh Necmettin Erbakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya (Taghian, 2015).

b. Gagalnya Kudeta Militer Turki 2016

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya Turki dalam menggagalkan kudeta militernya pada Juli 2016 kemarin, kudeta militer yang berlangsung singkat tersebut dapat dikalahkan karena terdapat

beberapa faktor yang sangat mempengaruhi atas kegagalan kudeta militer tersebut, faktor-faktor tersebut ialah;

Pertama, Adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki. Kudeta militer yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer dan pejabat tinggi terlibat lainnya terjadi dini hari pada tanggal 15 Juli 2016, yang dimana pada waktu kejadian tersebut Erdogan sebagai pemimpin negara tersebut sedang tidak berlibur dan tidak berada di wilayah tersebut. Namun Erdogan berjanji dan akan berupaya untuk menggagalkan kudeta militer tersebut. Dengan datangnya presiden Erdogan kembali ke Istanbul pada 16 Juli 2016 sekaligus menjadi pertanda bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok tersebut telah berhasil digagalkan (pratama, 2016).

Hal ini tak lepas dari adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki terhadap pemimpin negaranya tersebut. Selama berada di luar kota, presiden Erdogan selalu berusaha untuk terus berkomunikasi dan mengetahui info terbaru mengenai peristiwa tersebut. Presiden Erdogan juga meminta rakyat Turki untuk tidak takut ataupun panik dengan adanya kudeta militer tersebut. Erdogan meminta dukungan dari masyarakat Turki dan memintanya untuk turun ke jalan dan saling bekerjasama untuk menggagalkan upaya perebutan kekuasaan tersebut.

Pada 16 Juli dini hari, terdapat sekitar 30 anggota polisi pro-kudeta meletakkan senjata mereka karena telah

terkepung oleh pasukan polisi bersenjata yang berada di pihak lainnya di lapangan Taksim, Istanbul. Sementara itu, banyak jet-jet tempur dari para pendukung kudeta terbang rendah, yang menyebabkan terjadinya getaran dan kerusakan di gedung-gedung di kawasan tersebut. Menyusul hal tersebut, kelompok pro-pemerintahan kembali menangkap beberapa anggota pelaku kudeta militer di beberapa wilayah lainnya.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki ini menimbulkan sebuah momentum dimana para pelaku kudeta militer ini kehilangan kesempatannya untuk melakukan kudeta militer. Berkat komunikasi dan hubungan yang baik antara Erdogan dengan rakyatnya telah membuat rakyat Turki tidak bersembunyi dan mengikuti perintah Erdogan untuk bersama turun ke jalan dan melawan ancaman kudeta tersebut. Mereka membanjiri sepanjang jalan dan lapangan di wilayah tersebut, serta mengibarkan bendera-bendera Turki dan menyerukan dukungannya terhadap pemerintahannya yang sekarang (pratama, 2016).

Kedua, belum berhasilnya faksi militer pelaku kudeta megambil alih obyek vital di Turki. Serangan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah militer di turki atas kudetanya telah mendapatkan perlawanan sengit dari kelompok maupun masyarakat yang pro pemerintah. Mereka saling membahu untuk memblokade jalan dan

berkumpul di titik-titik penting di beberapa wilayah di Turki. Perlawanan dari masyarakat Turki terhadap pihak kudeta militer tersebut dibantu oleh sejumlah militer yang masih atau berada di posisi pro-pemerintahan, akibatnya, serangan kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut dapat di blokade dan tidak dapat memasuki kawasan-kawasan penting maupun obyek-obyek vital yang dimiliki oleh Turki, seperti gedung Parlemen, Istana Kepresidenan, dan sebagainya, walaupun beberapa diantaranya telah dikuasai oleh para pelaku pro-kudeta, namun hal tersebut belum mampu untuk merebut kekuasaan.

Ketiga, tidak adanya dukungan yang kuat dari negara asing. Keberhasilan kudeta militer sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu logistik, penguasaan media, dan adanya dukungan dari negara lain. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak ada, maka kudeta militer yang dilakukan akan mengalami tingkat resiko kegagalan yang cukup tinggi. Dengan adanya dukungan ataupun intervensi dari negara lain, secara tidak langsung akan menambah kekuatan atau power suatu pelaku kudeta untuk mendapatkan keinginannya.

Hal ini sama ketika kudeta militer yang sedang berlangsung di Turki pada Juli 2016 silam. Kurangnya perhitungan serta dukungan dari negara asing seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, maupun Uni Eropa

menyebabkan kudeta militer yang dilakukan dapat dengan mudah digagalkan oleh kelompok pendukung pemerintahan. Upaya dan kerja keras serta adanya pengaruh yang kuat dari pemimpin Turki merupakan hasil yang nyata dalam keberhasilannya menggagalkan kudeta militer tersebut. Akibatnya, banyak anggota militer maupun anggota parlemen yang pro-kudeta dan hakim maupun orang-orang yang dianggap terlibat dalam aktivitas kudeta tersebut mendapatkan hukuman hukumannya (Arifan, 2016).

Dalam kejadian kudeta militer tersebut telah memakan korban sedikitnya 63 dari pasukan pro-pemerintahan dan 104 tentara yang berasal dari pro kudeta meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 8000 lebih anggota militer dan hakim ditangkap karena diduga ada hubungannya dengan tindakan kudeta militer yang sempat berlangsung tersebut.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya pemberontakan atau kudeta militer di Turki tahun 2016 kemarin bukan merupakan tindakan kudeta untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali tindakan kudeta militer di Turki yangdi lakukan oleh sekelompok anggota yang ingin melawan dan merebut kekuasaan. Tindakan kudeta militer

turki tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1960. Kemudian terjadi kudeta yang kedua pada tahun 1971 karena terjadinya pergolakan antar umat muslim tentang perebutan pewaris partai yang didirikan oleh Adnan Menderes. Kudeta militer yang ketiga terjadi pada tahun 1980, dimana dengan kondisi politik dalam negeri yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Selanjutnya terjadi kudeta militer yang keempat pada tahun 1997, dimana pihak militer meminta perdana menteri Necmettin untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kemudian terjadilah peristiwa kudeta militer yang terakhir pada Juli 2016 kemarin, dimana dalam kudeta ini meminta Erdogan sebagai pemimpin negara tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun aksi kudeta militer tersebut dapat dengan mudah digagalkan oleh pemerintah Turki dikarenakan kuatnya dukungan dari rakyat terhadap pemerintahannya yang sekarang, mereka berani turun langsung kejalan untuk melawan aksi kudeta militer tersebut. Selain itu, tidak berhasilnya kelompok pro-kudeta menguasai obyek-obyek penting dari Turki seperti gedung-gedung penting serta bandara dan lain sebagainya juga menjadi salah satu faktor kegagalan kudeta militer turki. Dan kelompok pro kudeta tersebut juga tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari negara lain untuk membantu merebut kekuasaan.

REFERENSI

- Arifan. 2016. *Kegagalan dan Keberhasilan Sebuah Kudeta*.
Retrieved from: Jurnal muslim;
<http://www.jurnalmuslim.com/2016/07/keberhasilan-dan-kegagalan--sebuah-kudeta.html?m=1>
- Aini, Nur. 2016. *Presiden Erdogan dituding sengaja buat kudeta militer palsu*. Retrieved from: Republika Internasional ;
<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/presiden-erdogan-dituding-sengaja-buat-kudeta-militer-palsu>
- Mundir, M.pd. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Guba, E.G., and Lincoln, Y.S. 1988. "Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry Methodologies?" In *Qualitative Approaches to Evaluation in Education. The Silent Scientific Revolution*, New York: Preager, hal 80-115.
- Indonesia, Jurnal (2016). *Tanpa Adanya Dukungan Dari Rakyat, Kudeta Telah Gagal*. Jakarta: Jurnal Media Pratama
- Mtholyoke, *Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch*. Retrieved from
<http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>

Suharsono. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Budaya

Taghian, Syarif. 2015. *Erdogan, Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: Pustala Al-Kautsar.

PERANAN JAMA'AH TABLIGH DI ASIA SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN JAMA'AH TABLIGH DI INDONESIA

Tulisan ini akan menjelaskan tentang Peranan Jamaah Tabligh di Asia Selatan yakni di India, Bangladesh dan Pakistan terhadap perkembangan Jamaah Tabligh di wilayah Yogyakarta pada 2010-2015 dengan melakukan difusi-difusi yang ada yakni relational diffusion, nonrelational diffusion, dan mediated diffusion karena untuk melihat proses dan bentuk aktivisme transnasional yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh di Yogyakarta terhadap Geopolitik di Yogyakarta.

A. Strategi Jama'ah Tabligh Terhadap Kondisi Perpolitikan Di Wilayah Yogyakarta 2010-2015

Dalam masalah perpolitikan yang berada Yogyakarta maka dalam menyebarkan ajarannya Jamaah Tabligh lebih mengedepankan menggunakan cara Mediated Diffusion dan Nonrelation Diffusion. Mediated Diffusion yang dilakukan Jamaah Tabligh adalah dengan menggunakan pemimpinnya atau biasa disebut dengan Dewan Syuro untuk berhubungan dengan pemerintah hal ini karena Kyai atau Ulama di Indonesia masih memiliki kekuatan social politik yang sangat kuat.

Peran sosial politik kyai dalam sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kyai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur kepemimpinan informal, khususnya kyai.¹

Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kyai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber “fatwa” terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kyai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran ganda kyai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada

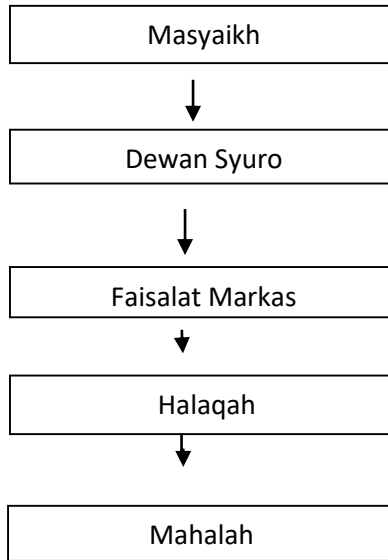
¹ Miftah Faridl dalam Jurnal “*Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*” tahun 2007.

akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelurusan akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku social politik yang diperankannya.²

Hal inilah yang membuat Jamaah Tabligh lebih memilih Mediated Diffusion karena pengaruh kuat seorang Kyai atau Ulama, oleh sebab itu Jamaah Tabligh pun memiliki Ulama atau Kyai yang tercatat dalam struktur organisasinya. Dalam hal organisasi pun jamaah Tabligh tidak bersifat hirarki karena mereka mampu berkomunikasi langsung dengan yang ada di India, dan berikut susunan organisasi Jamaah Tabligh yang tidak tertulis secara langsung, Hal ini juga merupakan urutan komunikasi langsung dengan Masyaikh yang ada di IPB, Jamaah Tabligh Yogyakarta tidak menggunakan komunikasi modern sebagaimana menurut Sidney Torrow bahwa gerakan Transnasional sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era Globalisasi ini dalam berkomunikasi dengan berbagai level kelompok tersebut. Tidak halnya demikian dengan Jamaah Tabligh karena mereka berkomunikasi dengan Masyaikh yang ada di IPB di lakukan setiap dua tahun sekali, hal ini sekaligus melaporkan perkembangan Jama'ah Tabligh yang ada di Yogyakarta. sebagaimana penulis gambarkan dibawah ini:

² Ibid

Gambar 3: Susunan dalam Jamaah Tabligh



Strategi yang kedua yang diterapkan Jamaah Tabligh selain Mediated Diffusion ialah Nonrelation Diffusion, strategi Nonrelation Diffusion adalah dengan mengundang para elit pemerintah Yogyakarta dalam pengajian akabar yang biasa digelar oleh Jamaah Tabligh dalam menjaga eksistensinya dikalangan pemerintah Yogyakarta. Hal ini dikarenakan di era modern ini kelompok keagamaan bukan hanya sekedar membahas masalah keagamaan, tetapi juga membahas ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Hal itu dibuktikan dengan sejarah Indonesia yang digerakkan atas nama kelompok agama yang merupakan bentukan dari

diskusi-diskusi ataupun pengajian keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok tersebut. Selain itu juga terdapat segi negatif dari munculnya kelompok-kelompok pengajian keagamaan tersebut yaitu radikalisasi keagamaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok islam garis keras.

Pengajian menempati posisi sentral dalam berjalannya suatu kelompok sosial, karena pengajian merupakan salah satu proses pentransferan (sosialisasi) nilai atau norma-norma kelompok terhadap para anggota baru, agar nantinya dapat diinternalisasikan oleh anggota baru tersebut yang nantinya dijadikan standar pedoman dan perilaku. Pengajian dapat meningkatkan assobiyah (solidaritas) anggota karena berbagai persamaan baik itu ideologi, cita-cita, maupun musuh bersama. Namun dewasa ini fungsi pengajian tidak hanya sebatas itu, tetapi terdapat juga fungsi laten lainnya, seperti fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Pengajian tidak lagi mutlak sebagai tempat penyaluran atau bentuk tindakan rasionalitas nilai dari anggotanya.

Strategi Jamaah Tabligh terhadap perpolitikan Yogyakarta lebih bersikap lembut, hal ini juga karena politik yang berada di Yogyakarta terhadap organisasi-organisasi keagamaan cenderung pasif. Oleh sebab itu strategi Jamaah Tabligh sangat jauh dari kata politik yang

sesungguhnya sebagaimana menurut Ramlan Surbakti bahwa pengertian politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.³ Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa politik merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik.

Dari pendapat tersebut penulis simpulkan bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian aturan-aturan dan keputusan yang tadi ditetapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah ditengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh kemajemukan / kebhinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik oleh karena itu perlunya di tegakkan tata tertib sehingga dapat diharapkan dengan

³ Surbakti, Ramlan. 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm.1

penegakan tata tertib tersebut tidak akan terjadi perpecahan antar masyarakat.

Namun bagi Jama'ah Tabligh yang ada di Yogyakarta mereka sangat menghindari Politik dan bahkan mungkin Jama'ah Tabligh yang ada di Yogyakarta ini anti dan tidak mau peduli apa yang terjadi di Yogyakarta, bahkan ketika penulis memwawancari narasumber yakni Pak Iftironi yang merupakan cucu dari K.H. Ahmad Dahlan yang masih merupakan keturunan Kraton Yogyakarta beliau hanya menggelengkan kepala ketika ditanya apakah beliau akan masuk dalam arus politik di Yogyakarta.

Pak Iftironi juga terlihat kurang begitu suka berbicara mengenai politik, begitu juga penulis bertanya mengenai kondisi politik Yogyakarta dengan Ustad Tartusi yang merupakan karkun Jama'ah Tabligh yang ada di kompleks Masjid Al Barokah daerah Wirobrajan. Penulis melihat adanya ketakutan Jama'ah Tabligh mengenai Politik, hal ini sebagaimana yang dikatakan pak Iftironi yang penulis nilai sebagai Amir Jama'ah Tabligh regional DIY-Jateng mengenai politik "Politik hanya akan menimbulkan konflik sebagaimana Muhammad Ilyas

sebagai pendiri Jama'ah Tabligh melihat karena Politik India menjadi terpecah belah.”⁴

Hal ini bisa dimengerti karena memang sejak awal abad XIII sampai dengan pertengahan XIX dinasti Islam berkembang di India. Masa pengaruh politik Islam telah dimulai sejak awal abad VIII ketika Muhammad bin al-Qasim diutus Khalifah al-Walid I menyerbu daerah Sind mulai tahun 708 M.⁵ Walaupun belum menguasai seluruh India, Qasim telah berhasil menancapkan pengaruh politik Islam di daerah Punjab. Sejak masa itu politik Islam terus merangsek di India. Dinasti Ghazni yang berkembang sejak tahun 961 M berpusat di Afghanistan menjadi kekuatan politik kedua yang berpengaruh di India, dan dinasti Ghuri adalah pengaruh politik ketiga dalam sejarah kerajaan Islam di India. Akhir Dinasti Ghuri menandai mulainya kekaisaran Islam di India ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi oleh Kutbu'ddin Aibak (1206-1211). Sejak saat itulah dinasti Islam berkembang di India sampai dengan tahun 1857.⁶

⁴ Wawancara dengan Pak Iftironi pada 2 juni 2016 di masjid AL Itihad Yogyakarta

⁵ M Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Grafies Production, 2003), hlm. 12, yang dikutip oleh Supardi, *Perkembangan dan Peninggalan Dinasti Moghul di India 1525-1857*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY), hlm. 2.

⁶ Supardi, *ibid.*, hlm. 2.

Konflik yang disebabkan karena persoalan agama di Asia Selatan sangatlah khas. Di wilayah ini minimal ada 4 agama yang saling bertemu dalam posisi konflik yang cenderung latent yakni Islam, Hindu, Budha dan Nasrani. Variasi konflik Islam-Islam (Sunni-Syi'ah-Ahmadiyyah) di Pakistan, Islam-Hindu di India atau India dengan Pakistan, Srilangka, Budha-Hindu di Nepal, dan konflik yang melibatkan agama Nasrani mulai tidak tampak. Konflik yang melibatkan agama Nasrani pernah terjadi sehingga melahirkan agama baru yang mengakomodasi prinsip-prinsip ke 4 agama besar yang kemudian menjadi agama Sikh yang didirikan oleh Guru Nanak. Ataupun dalam batas tertentu kelahiran tradisi Ahmadiyyah oleh Ghulam Mirza Ahmad juga tidak lepas sebagai dialektika konflik agama di Asia Selatan.⁷

Secara Umum, konflik hegemoni antara orang-orang nasionalis Islam dengan orang-orang nasionalis Hindu yang terjadi di India berlangsung dalam waktu yang lama (1857-1947). Kendatipun demikian, akar-akarnya telah lama terjadi sejak muslim masuk ke wilayah ini. Tetapi, periode 1857-1947 merupakan bentuk konflik hegemoni yang bercorak modern yang di dalamnya unsur-unsur barat mulai terlibat. Sekalipun yang sangat mengristal kemudian

⁷ Surwandono dan Sidiq Ahmadi, 2011, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 71.

adalah konflik antara orang-orang nasionalis Islam dan Hindu di India, konflik itu dapat difragmentasikan dalam tiga periode. Pertama, periode 1857-1899 yang dapat disebut sebagai periode sebab-sebab pendorong munculnya konflik hegemoni. Kedua, Periode 1900-1942 yang merupakan periode proses pecahnya konflik terbuka yang mencakup sejumlah kronologi dan rangkaian konflik hegemoni antara orang-orang nasionalis Islam dan Hindu. Ketiga, periode 1942-1947 yang disebut sebagai periode upaya penyelesaian konflik hegemoni.⁸

Pecahnya konflik hegemoni antara orang-orang nasionalis Islam dan Hindu yang terjadi pada 1900-1942 diawali oleh munculnya upaya-upaya konspirasi dan agitasi orang-orang nasionalis Hindu terhadap masyarakat muslim. Peristiwa ini berlangsung antara 1900-1913. Selanjutnya, seiring dengan terus berkembangnya upaya-upaya konspirasi dan agitasi yang dilakukan oleh orang-orang nasionalis Hindu, dalam rentang waktu 1906-1924, perjalanan konflik hegemoni antara orang-orang nasionalis Islam dan Hindu banyak diwarnai oleh munculnya respon masyarakat muslim India berupa pendirian organisasi-organisasi sosial politik. Pendirian organisasi sosial politik inilah yang menjadi landasan bagi lahirnya gerakan

⁸ Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, 2006, *Islam di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh*, Bandung: Humaniora, hlm. 164-165.

nasionalisme kalangan masyarakat muslim untuk melawan upaya-upaya konspirasi dan agitasi orang-orang nasionalis Hindu seperti Liga Muslim, Gerakan Khilafah dan Jamiyatul Ulama-I Hindi.⁹

Oleh sebab itu kenapa Jama'ah Tabligh sangat menjauhi politik yang bisa berujung pada konflik yang berkepanjangan, tapi dalam Jama'ah Tabligh tidak melarang anggotanya berpolitik atau menjadi anggota parpol manapun tapi ketika sudah masuk dalam kelompok Jama'ah Tabligh tidak boleh membawa-bawa politik atau mengajak anggota lainnya untuk mengikuti kemauan mereka masuk dalam dunia politik.

Jamaah Tabligh bukannya menghindar sepenuhnya tapi juga melakukan dakwah pada pemerintah, strategi ini biasanya disebut dengan dakwah khusus sebagai bentuk dakwah yang dikhususkan kepada kelompok atau orang-orang tertentu seperti keluarga, saudara, teman dekat dan tokoh masyarakat. Model strategi Jamaah Tabligh ini dimulai dari lingkungan keluarga terdekat, anak, istri, pembantu rumah tangga, karib terdekat sampai kepada tokoh masyarakat. Dakwah kepada keluarga dilakukan dengan cara mengajak anggota keluarga untuk melaksanakan shalat, berpuasa, mengajari membaca al-

⁹ Ibid. Hlm 165

Quran, mengikuti pengajian dan sebagainya. Sebab menurut pandangan kelompok Jamaah Tabligh pertama kali yang harus didakwahi adalah anggota keluarga terlebih dulu, setelah itu baru ke teman dekat, masyarakat umum dan seterusnya.

Selanjutnya, strategi Jamaah Tabligh yang bersifat khusus ini disampaikan kepada umara (pemimpin pemerintahan – mulai dari yang paling bawah ketua RT sampai kepala negara), ulama, ustadz, mualim, DKM (tokoh-tokoh agama), ju'amma (tokoh masyarakat), dan khudama (orang yang pernah khuruj) dan sebagainya. Dakwah model ini telah dicontohkan oleh Rasulullah, ketika beliau mendakwahi pembesar-pembesar negeri di dunia untuk menyeru masuk Islam, melalui pengiriman surat kepada raja-raja, seperti kepada Heraklius pembesar Rumawi, raja Kisra di penguasa Persia, dan kepada Muqauqis pembesar Kopti Mesir. Masalahnya, di mana perbedaan dakwah nabi dengan kelompok Jamaah Tabligh. Bedanya, kalau dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang belum menganut Islam, sedangkan kelompok Jamaah Tabligh yang didakwahi itu orang-orang yang telah beragama Islam. Jadi mengajak orang Islam untuk menjaga ke-Islamannya, meluruskan tauhidnya, menguatkan iman dan taqwa kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah tertentu. Dan yang paling penting mengajak kepada para

umaro, ulama, ju'ama dan khudama untuk meluangkan waktu barang beberapa hari melakukan perjalanan khuruj.

B. Strategi Jamaah Tabligh Terhadap Masyarakat Yogyakarta Yang Memiliki Tingkat Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang Berbeda-Beda Pada 2010-2015

Yogyakarta yang merupakan kota yang memiliki tingkat ekonomi, sosial dan penuh dengan nilai-nilai kebudayaan yang sangat begitu kental yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kesehariannya, sehingga dalam hal agamapun lebih kental bercampur dengan nilai budayannya atau biasa disebut dengan kejawen sebgaimana penulis jelaskan dalam bab III.

Strategi yang digunakan Jamaah Tabligh menurut analisa penulis dalam tingkatb ekonomi, sosial dan budaya yg berbeda-beda adalah dengan menggunakan metode Relation Diffusion dan Nonrelation Diffusion. Dengan Strategi Relation Diffusion Jamaah Tabligh adalah dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki Jamaah Tabligh karena keberadaan Jama'ah Tabligh di Yogyakarta akan sangat sulit berkembang karena terbentur nilai-nilai budaya yang ada, sebagaimana yang di kata para Orang tua (Ulama) Jama'ah Tabligh (Masyaikh) "biarkan mereka dengan budayannya tugas jama'ah adalah memberikan dakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW maka mereka

akan kembali kepada ajaran yang benar".¹⁰ Namun dalam realita yang ada banyak anggota Jama'ah Tabligh yang diusir atau tidak boleh bermukim disuatu wilayah untuk melakukan Khuruj atau kerja dakwah diuar kampungnya sebagaimana penulis jelaskan pada bab II pada sub bab Khuruj, hal ini bisa terjadi karena kehati-hatian masyarakat Yogyakarta yang takut akan adanya gerakan teroris atau gerakan radikal hal ini bisa di jumpai di wilayah Bantul yang dimana banyak anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan Khuruj dilarang untuk bermukim di daerah tersebut.

Menurut penulis, padangan sebgai masyarakat Yogyakarta yang beranggapan bahwa Jama'ah Tabligh sebagai Terorisme sangat berlebihan karena tindakan yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh jauh dari tindakan terorisme, sebelum lebih jauh maka penulis lebih dulu akan menjelaskan tentang terorisme dan teroris, agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai terorisme dan teroris. Sebenarnya terorisme dan teroris memiliki makna yang berbeda, namun penulis akan menjelaskna terlebih dahulu mengenai terorisme. Walau Definisi tentang terorisme sangat sulit dirumuskan. Adrianus Meliala mengatakan,¹¹ bahwa terorisme sulit didefinisikan karena tidak berbentuk,

¹⁰ Ibid

¹¹ www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul. (diakses pada 10 Oktober 2014)

fluktuasi tergantung konteks sejarah dan geografi, tidak ada definisi universal, berbeda dengan kejahatan, revolusi, dan perang. Sebutan terorisme juga sering dipakai untuk merendahkan pihak lain. Pendapat tersebut sesuai dengan beberapa pendapat ahli lain, seperti Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk merumuskan suatu pengertian identik, yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme.

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut keilmuan, seperti sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional, dan hukum. Oleh karena itu, sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup keseluruhan aspek dan dimensi terorisme. Namun, beberapa ciri utamanya dapat ditentukan, yaitu:

Eksplorasi rasa gentar atau ngeri manusia.

Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik.

Adanya unsur pendadakan dan kejutan.

Mempunyai tujuan dan sasaran.

Atas dasar ciri-ciri utama aksi terorisme tersebut, berikut ini adalah beberapa pendapat tentang definisi

terorisme. Dalam sebuah artikel di Bulletin Balitbang Dephan, disebutkan beberapa definisi terorisme, yaitu:¹²

Konvensi PBB tahun 1937 :

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

US Department of Defense tahun 1990 :

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000 :

Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terorisme adalah kekerasan terorganisir yang menempatkan

¹² [http://buletinlitbang.dephan.go.id./](http://buletinlitbang.dephan.go.id/) Loudewijk F. Paulus, "Terorisme." *Buletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002*. (diakses 10 Oktober 2014)

kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus sebagai alat pencapaian tujuan dengan ciri-cirinya, sebagai berikut :

Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.

Menggunakan kekerasan.

Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.

Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Pelaku tindak kejahatan terorisme disebut teroris. Meskipun istilah ini jelas, maknanya menjadi kabur ketika harus disebut siapa mereka dan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai terorisme. Dalam kepustakaan, terorisme adalah orang, atau orang-orang, yang tanpa hak dan wewenang absah melakukan tindakan menakutkan, mengancam, membahayakan keselamatan, dan bahkan membunuh orang (orang) lain. Jadi, "teroris" dalam pengertian ini adalah orang atau sekelompok orang yang bertindak di luar institusi resmi.

Dari uraian diatas jelas sekali jika Jama'ah Tabligh dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Yogyakarta tahun 2010-2015 tidak pernah manakut-nakuti masyarakat, mengancam apalagi menghilangkan nyawa orang lain, bahkan mengiming-imingi dakwah dengan mudah dicerna sebagaimana menyampaikan hal-hal kecil dalam ibadah. Dalam kebudayaan yogyakartapun mereka bisa melebur tapi tidak menghilangkan identitas mereka yang suka memelihara jenggot, menggunakan jubah dll. Namun jika orang yang pertama kali terjun ke dakwah jama'ah Tabligh mereka yang biasa berkecimpung dalam dunia seni dan budaya bisa meninggalkannya karena merasa apa yang mereka lakukan adalah bukan contoh dari Rasulullah.¹³

Strategi Relation Diffusion yang dilakukan Jamaah Tabligh kepada masyarakat Yogyakarta menggunakan strategi dakwah umum yaitu dakwah yang disampaikan kepada masyarakat umum yang memiliki latar belakang berbeda-beda, berbeda karena status sosial, profesi pendidikan, etnis, usia dan sebagainya. Model dakwah ini sesungguhnya lebih heterogen karena sasaran dakwahnya heterogen. Heterogenitas sasaran dakwah sangat alamiah, dan dakwah berlaku secara universal.

¹³ Wawancara dengan Ustad, Tartusi mantan musisi klasik di Masjid Al Barakah Wirobrajan pada 16 Mei 2016

Strategi ini memperjelaskan seruan dakwah itu berlaku untuk semua manusia, baik yang sudah Islam maupun yang belum menyatakan diri masuk Islam. Namun masalahnya, apakah kelompok Jamaah Tabligh melakukan dakwah kepada orang-orang di luar Islam? Berdasarkan pengakuannya, mereka baru mengajak kepada kaum muslimin untuk meluruskan aqidah mereka, menjaga amalan-amalan lahir maupun bathin agar mereka selamat dunia dan akhirat. Jadi, secara aqidah sasaran dakwah Jamaah Tabligh adalah sama yaitu kaum muslimin. Namun secara kultural, struktural dan sosial, mereka berbeda-beda. Dengan perbedaan latar belakang tersebut, maka strategi dakwah yang mereka lakukan adalah dengan cara menerapkan tahapan-tahapan dakwah, yakni: (1) tahap ta'aruf, (2) tahap ta'aluf, (3) tahap tarqib, dan (4) tahap tasykil.¹⁴

Pertama, tahap ta'aruf adalah tahap perkenalan. Perkenalan dilakukan di saat jamaah berjauhlah mendatangi rumah-rumah kaum muslimin. Mereka bersilaturahmi dan memperkenalkan diri satu persatu, menjelaskan kedatangan mereka dan berdialog. Perkenalan ini dimasukkan agar warga setempat mengetahui kehadiran mereka di kampung halamannya. Bahwa

¹⁴ Wawancara dengan Pak Iftironi pada 2 juni 2016 di masjid AL Itihad Yogyakarta

kehadiran mereka bukan untuk apa-apa, tetapi hanya mengajak kaum muslimin untuk datang ke masjid memperbanyak ibadah. Setelah warga mengetahui maksud kedatangan mereka, warga tidak akan bertanya-tanya apalagi curiga. Kalau warga simpatik dengan ajakan jamaah dan mempunyai waktu luang, maka mereka akan mengikutinya. Walau kebanyakan warga setempat tidak mengikuti seruan jamaah, paling tidak mereka tidak menghalangi gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Para Da'i leluasa untuk mengajak kaum muslimin beribadah di masjid dan mereka aman dalam berdakwah. Persoalan umat mau mengikuti atau tidak, itu persoalan lain dan resiko dari sebuah perjuangan.

Kedua, tahap ta'aluf yakni tahap sambung hati, sambung hati ini dapat dilakukan di rumah warga atau di masjid. Sambung hati menurut pemahaman jamaah adalah silah al-fikri dan silah al-qalbi. Silah al-fikri yaitu berdiskusi dengan seseorang tentang agama dengan cara yang baik, halus, santun dan lemah lembut (*almauidzhah hasanah*). Sedang silah al-qalbi maksudnya dari silah al-fikri tadi tidak hanya menyentuh pikiran tetapi harus menyentuh hati. Hati seseorang menjadi damai, tenang dan sejuk ketika didatangi oleh kelompok jamaah. Inilah tujuan ta'aluf kelompok jamaah agar orang-orang yang dikunjungi merasa tenang dan tenang, sehingga hatinya semakin

terbuka dan sadar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah.

Ketiga, tahap tarqib yaitu tahap menyampaikan janji Allah. Tahap ini disampaikan ketika ta'lim di masjid. Para jamaah masjid diingatkan bahwa Allah berjanji akan memberikan pahala, ampunan dan surga kepada kepada orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.

Strategi kedua yang dilakukan Jamaah Tabligh dengan situasi ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda-beda adalah dengan Nonrelation Diffusion adalah dengan menggunakan sosial media, penulis melihat ada sebagian anggota Jamaah Tabligh menggunakan kecanggihan teknologi sebagai strategi penyebaran dakwahnya.

Media sosial yang sering digunakan adalah Instagram, penulis sering mendapati teman-teman dari Jamaah Tabligh yang berada di Yogyakarta menggunakan Instagram, salah satu contohnya adalah Sakti Al Jogjawy. Mantan pentolan band Shaila On 7 ini sering memposting prihal-prihal yang berkaitan dengan aktifitas Jamaah Tabligh sebagai contoh tentang indahnya makan secara berjamaah, memilihara jenggot dan lain-lain. Bukan hanya memlalui Instagram penulis juga menjumpai ada hal-hal mengenai Jamaah Tabligh misalnya ada di YouTube atau

juga blog-blog pribadi karena anggota dari Jamaah Tabligh berasal dari berbagai kalangan dan profesi.

C. Strategi Jama'ah Tabligh Dalam Persaingan Antar Kelompok Agama Islam di Yogyakarta pada 2010-2015

Strategi Jama'ah Tabligh dalam persaingan dengan kelompok Agama Islam di Yogyakarta menggunakan strategi Relation Diffusion, Nonrelation Diffusion dan Mediated Diffusion. Strategi Relation Diffusion Jamaah Tabligh dalam persaingan dengan kelompok Agama Islam lainnya adalah dengan menyebarkan paham-paham Jamaah Tabligh, salah strategi Relation Diffusion yakni tidak akan berafiliasi dengan organisasi Islam manapun di Yogyakarta ini walau ada yang menginginkan Jama'ah Tabligh untuk berafiliasi dengan kelompok Islam mereka,¹⁵ menurut penulis ini bukan sesewatu yang berlebihan karena setiap kelompok Islam memiliki Ideologi sendiri dan ingin mempertahankannya bahkan ingin mengembangkannya dalam masyarakat yang ada di sekitar khususnya dalam wilayah Yogyakarta dalam mempertahankan eksistensinya.

¹⁵ Wawancara dengan Pak Iftironi pada 2 juni 2016 di masjid AL Itihad Yogyakarta

Hambatan yang dirasakan jama'ah Tabligh dalam perkembangannya selain masyarakat Yogyakarta yang kurang menerima gerakan Transnasional ini karena kewajiban khuruj yang dianggap kurang mengena di hati masyarakat jogja dan mulai banyaknya organisasi atau kelompok-kelompok Islam yang mulai tumbuh di Yogyakarta, baik dari organisasi yang berorientasi pada politik atau Khilafah, yang berorientasi pada dakwah kultural atau organisasi transnasional lainnya.

Jamaah Tabligh memiliki ciri khas sendiri baik verbal maupun non-verbal Strategi Relation Diffusion, Komunikasi nonverbal yang selalu digunakan kelompok Jamaah Tabligh meliputi dua hal, yakni simbol yang tumbuh dan menempel dalam tubuh seseorang seperti memelihara jenggot, dan simbol yang berbetuk asesoris seorang muslim, seperti peci, pakaian gamis, dan parfum, serta simbol yang menunjukkan keakraban dan kebersamaan, seperti duduk bersimpuh merapatkan barisan dan makan bersama dalam satu nampan dan berjabat tangan.

Kebiasaan memelihara Jenggot bagi kelompok Jamaah Tabligh merupakan implementasi kecintaannya kepada Rasulullah SAW. karena Rasulullah juga memeliharanya. Jenggot sebagai simbol atau identitas seorang muslim. Dengan jenggot, diharapkan sikap dan

perbuatan kita terjaga dari perbuatan maksiat. Karena orang yang berjengkot akan sangat malu kalau berbuat jahat. Menurut salah seorang anggota Jamaah Tabligh, jenggot menjadi kontrol diri buat seorang muslim untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama.

Kemudian Strategi Relation Diffusion Lainnya dari Jamaah Tabligh memalui simbol non-verbal yang berbentuk asesoris adalah peci, pakaian gamis, dan parfum. Peci yang biasa dipakai Jamaah Tabligh adalah berbentuk bulat dan lonjong. Sedangkan baju gamis adalah pakaian jubah panjang berlengan panjang biasanya berwarna putih. Pakaian ini dipakai bersama selanan panjang di atas mata kaki. Pakaian ini diyakini oleh anggota Jamaah Tabligh dapat mendukung kebersihan dan keberhasilan dakwah. Peci dan baju jubah ini, sama halnya dengan jenggot sebagai identitas muslim yang bermakna sebagai kontrol diri. Dengan memakai Peci dan baju gamis diharapkan dapat memelihara sikap dan perilakunya sesuai dengan syariat Islam. Jika, sikap dan perbuatan selaras dengan ajaran Islam, maka dakwah yang diperjuangkannya akan berjalan dengan baik. Karena dakwah tidak hanya disampaikan dengan bentuk tabligh bi al-lisan tetapi juga dengan sikap dan perbuatan yang baik dakwah bi al-amal. Jadi pakaian yang dipakai kelompok Jamaah Tabligh sebagai bentuk strategi dakwah non-verbal atau dakwah bi al-amal.

Kemudian simbol nonverbal yang lain yang biasa diperlihatkan oleh Jamaah Tabligh adalah kebiasaan makan bersama dalam satu nampan dan jabatan tangan yang erat. Makan bersama dalam satu nampan sebagai tradisi kelompok jamaah untuk menunjukkan kesederhanaan, kebersamaan dan keakraban. Mereka selalu makan dengan penuh khidmat, tertib, tenang dan teratur. Di samping makan dalam satu nampan sebagai simbol kesederhanaan dan keakraban. Tetapi juga lebih ekonomis dan ngirit serta tidak perlu membutuhkan alat makan yang banyak. Menurut pandangan seorang Jamaah Tabligh. Kalau makan dalam satu napan rame-rame banyak keuntungan dan hikmah yang dapat kita ambil, yakni dapat memunculkan ikatan batin diantara sesama jamaah, menunjukkan sikap tawadhu (rendah hati) dan tidak sombong. Selain itu, menurut pengakuan Munawar makan bersama seperti itu sebagai media untuk menumbuhkan kasih sayang diantara jamaah dan anggota keluarga, dan meningkatkan hubungan baik dan persaudaran.

Terakhir, simbol nonverbal yang ditampilkan kelompok Jamaah Tabligh, ketika bersalaman dengan orang lain, selalu menggenggam erat-erat tangan yang disalami, sambil mengumbarkan senyum seadanya. Jabat tangan ala Jamaah Tabligh tersebut sebagai simbol ikramul muslim – memulyakan sesama muslim. Menurut pendapat salah seorang anggota jamaah, jabat tangan model ini merupakan

media untuk saling mendoakan diantara sesama muslim, dan meningkatkan persaudaraan.

Demikianlah proses penyebaran Jamaah Tabligh yang ada di Yogyakarta yang memberikan contoh serta adanya ikatan-ikatan secara sosial dan personal yang didasari oleh kesamaan kepercayaan, budaya, bahasa, keluarga, maupun tempat asal di antara orang-orang tersebut. Ikatan-ikatan ini kemudian membentuk sebuah jaringan yang terdiri dari orang-orang yang saling mempercayai karena adanya berbagai kesamaan tersebut sehingga bersedia meniru aksi-aksi satu sama lain. Namun, karena terbentuk dari ikatan-ikatan personal.

Perbedaan Jamaah Tabligh dengan kelompok agama Islam ialah ajaran yang disampaikan ialah Pesan dakwah yang selalu disampaikan oleh kelompok Jamaah Tabligh sebagai Strategi Relation Diffusion, terdiri atas tiga materi pokok, yakni: “wahdaniyat, akhirat dan risalah.”¹⁶

Pertama, wahdaniyat diartikan sebagai pengakuan akan eksistensi Ke-Esaan dan Kebesaran Allah SWT. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, tempat kita memohon dan bergantung kepada-Nya. Dengan mengakui ke-Esaan, dan kebesaran Allah SWT, maka orang merasa

¹⁶ Wawancara dengan Pak Iftironi pada 2 juni 2016 di masjid AL Itihad Yogyakarta

bahwa kita itu kecil di hadapan Allah SWT. Dan dengan mengakui kehebatan dan kekuasaan Allah, maka kita merasa hidup ini selalu diawasi Allah. Karena merasa diawasi Allah, maka hidup kita selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, serta berupaya meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Pesan kedua, yang sering disampaikan oleh Jamaah Tabligh ialah mengingatkan akhirat dan kematian. Karena dua term ini, menurut pandangannya adalah harus terus diingatkan kepada seluruh umat, dengan sering diingatkan, orang akan selalu mengingat akhirat dan kematian. Sebab kematian dan akhirat adalah pasti. Oleh karena itu pesan dakwah ini mengajak kita sadar, bahwa kematian sedang mengintai kita. Untuk itu jangan kita lengah sedikit pun untuk tidak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan berusaha keras untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Persiapan yang mulia menghadapi kematian yaitu meningkatkan iman dan taqwa serta memperbanyak amal shaleh. Sebab, hanya iman dan amal shaleh yang setia menemani kita menghadap sang Khalik Allah SWT. yang lainnya akan kita tinggalkan, seperti harta, tahta, jabatan, anak, istri dan sebagainya.

Ketiga, materi lain yang selalu didengungkan Jamaah Tabligh ke semua lapisan umat adalah mengajak orang untuk mengambil bagian khuruj berdakwah karena

Allah. Sebab tugas berdakwah atau bertabligh itu kewajiban semua muslim dan muslimah yang sudah balligh. Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa, "Para ulama berlainan pendapat dalam menetapkan hukum menyampaikan dakwah Islam itu. Ada yang menetapkan sebagai kifayah (kewajiban kolektif) dan ada pula yang menetapkannya sebagai fardu ain. Mereka sama-sama mendasarkan pendapat mereka pada suarah Ali Imran ayat 104. Kata minkum dalam ayat ini ada yang menganggap mengandung pengertian tab'id (bagian), sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Ada pula yang menganggapnya sebagai za'idah (tambahan), sehingga hukumnya menjadi fardu ain.

Strategi kedua yakni Nonrelation Diffusion adalah dengan mengunakan media, dalam hal ini Jamaah Tabligh lebih condong menggunakan media social sebagai upaya menjaga eksistensinya dalam persaingan dengan gerakan kelompok Islam lainnya. Strategi ini telah penulis sampaikan diatas pada sub bab "Strategi Jamaah Tabligh Terhadap Masyarakat Yogyakarta Yang Memiliki Tingkat Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang Berbeda-Beda Pada 2010-2015" yakni sering memposting prihal-prihal yang berkaitan dengan aktifitas Jamaah Tabligh sebagai contoh tentang indahnya makan secara berjamaah, memelihara jenggot dan lain-lain. Bukan hanya memlalui Instagram penulis juga menjumpai ada hal-hal mengenai Jamaah

Tabligh misalnya ada di YouTube, Facebook, Twitter atau juga blog-blog pribadi karena anggota dari Jamaah Tabligh berasal dari berbagai kalangan dan profesi sehingga ada kemungkinan ada yang bisa bermain media social terutama pada kalangan anak muda dari Jamaah Tabligh dalam menjaga eksistensinya dalam persaingan dengan kelompok Agama Islam lainnya.

Strategi Mediated Diffusion Jamaah Tabligh dalam menjaga keberadaanya di Yogyakarta yakni dengan mengandeng tokoh Agama semisal Ustad yang sikap netral atau mendukung Jamaah Tabligh, hal ini juga karena pengaruh tokoh Ulama atau Kyai di Indonesia sangat begitu kental sebagaimana penulis jelaskan diatas pada Sub bab “Strategi Jama’ah Tabligh Terhadap Kondisi Perpolitikan Di Wilayah Yogyakarta 2010-2015” penulis Menjelaskan tentang peran Kyai atau Ulama dalam masyarakat Indonesia yakni Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kyai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber “fatwa” terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kyai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya.

Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran ganda kyai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelurusan akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku social politik yang diperankannya.

Jamaah Tabligh sering mengundang tokoh Agama yang Netral sebagaimana mengundang Ustad Arifin Ilham dimana beliau diajak mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh dari Mulai mengisi ceramah, makan bersama sehingga beliau memberikan kesan yang didapatkan selama berada dengan Jamaah Tabligh. Hal ini yang menjadikan Jamaah Tabligh bisa berkembang atau bertahan dengan adanya persaingan dengan kelompok agama Islam lainnya di Yogyakarta ini.

REFERENSI

- Tarrow, Sidney, *The New Transnational Activism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Porta, Donatella Della (editor), *Democracy In Social Movements*, New York : Martin's Press, 2009.
- Wiktorowicz, Quintan (editor), *Islamic Activism : A Social Movement Theory Approach*, Indianapolis : Indiana University Press, 2004.
- Rubin, Barry (editor), *Revolutionaries and reformers : contemporary Islamist movements in the Middle East*, New York : State University of New York, 2003.
- Rubin, Barry (editor), *Guide to Islamist movements*, New York : M.E.Sharpe, 2010.
- Ramadan, Tariq, *Islam and the arab awakening*, New York : Oxford University Press, 2012.
- Armajani, Jon, *Modern Islamist movements : history, religion, and politics*, UK : Wiley-Blackwell, 2012.
- Hefner, Robert. W, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, Princeton University Press, Princeton, 1985
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Bunga Rampai)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994
- Alamsyah M.Dja'far dalam jurnal "Memahami Gerakan Islam Transnasional" diterbitkan Agustus 2009

- Azyumardi Azra dalam jurnal "Muhammadiyah: Tantangan Islam Transnasional" dalam kumpulan jurnal Maarif vol 4 no.2 – desember 2009
- Muaz. A dalam jurnal "membincang gurita islam transnasional"
- Dina Y. Sulaeman dalam jurnal "Pemetaan Konflik Mesir"
- Puspitasari, Irfa. 2012. Dalam kuliah umum "Strategi Mobilisasi Masyarakat Sipil Global", Surabaya : Universitas Airlangga
- Supriyadi, Agus. Dalam presentasi dengan tema "gerakan islam transnasional dan pengaruhnya di Indonesia".
- Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

KERJA SAMA *SISTER CITY* ANTARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN GYEONGSANGBUK-DO, KOREA SELATAN

Tika Dian Pratiwi

Pada tahun 2016 ini, genaplah 11 tahun Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do menjalin kerja sama *sister city*. Gyeongsangbuk-do adalah wilayah yang berada di pantai Timur Korea Selatan dan berdekatan langsung dengan Jepang. Berikut adalah peta wilayah Korea Selatan, dimana tanda merah menunjukkan wilayah Gyeongsangbuk-do.¹



(Sumber gambar: Google)

¹ Mapnall. 2016. *Peta Gyensang Utara*. Diakses dari http://www.mapnall.com/id/Peta-Gyeongsang-Utara_1104294.html, pada 24 April 2016, pukul 18.00 WIB.

Kerjasama diantara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do didasarkan pada berbagai peluang yang baik. Gyeongsangbuk-do merupakan provinsi yang sangat kaya dan memiliki kemajuan industri yang pesat. Perkembangan ekonomi tumbuh dengan cepat di daerah ini setelah diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 1988.² Gyeongsangbuk-do juga merupakan provinsi yang memiliki sistem pemerintahan daerah yang baik dan terkontrol secara rapi. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi Yogyakarta untuk menjalin kerjasama dengan Gyeongsangbuk-do. Ada banyak hal positif yang dapat Yogyakarta peroleh. Salah satu contohnya adalah mempelajari dan meniru sistem pemerintahan daerah Gyeongsangbuk-do, yaitu Saemul Undong yang sukses menghantarkan provinsi ini maju dengan sangat pesat.

Di sisi lain, Yogyakarta adalah provinsi yang juga mampu mendatangkan keuntungan bagi Gyeongsangbuk-do. Yogyakarta yang kaya akan nilai-nilai budaya, sumber daya alam serta sumber daya manusia tentu sangat berpotensi untuk dijadikan rekan dalam *sister city*. Hal inilah yang menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah yang baik untuk tempat berbisnis tidak hanya bagi pebisnis asal Korea Selatan, tetapi juga bagi pemerintah Gyeongsangbuk-do.

² Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), hlm: 51.

Terbukti, hasil kerjasama antara Gyeongsangbuk-do dan Yogyakarta adalah adanya pabrik rambut palsu, industri *lingerie* dan *real estate* asal Korea Selatan di Indonesia.

A. Berbagai Aspek Kerjasama yang Dilakukan

Berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 25 Februari 2005, terdapat berbagai program kerjasama yang disepakati, yaitu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri serta investasi. Akan tetapi, setelah penandatanganan tersebut, Yogyakarta mengalami bencana gempa bumi. Hal ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kerjasama. Berbagai rencana kegiatan yang telah disusun oleh Tim Teknis atau '*joint committee*' terpaksa ditunda selama dua tahun hingga keadaan Yogyakarta pulih kembali. Meski demikian, terdapat beberapa kerjasama Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do yang sejauh ini sudah berhasil terlaksana, yaitu³:

1. Yogyakarta mengirim 16 orang pada bulan Mei hingga Juni untuk mengikuti kegiatan *Saemaul International Academy* 2008 di Kyungwoon University, Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan.

³ Takdir Ali Mukti, Op.cit, hlm: 264-266.

2. Provinsi Gyeongsangbuk-do memberikan bantuan dalam bentuk prasarana fisik, yaitu Gedung Saemul di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, terdapat pula program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Saemul tersebut.
3. Mahasiswa dari Korea Selatan melakukan bakti sosial di bidang kesehatan dalam kegiatan *Korean Youth Saemaul Volunteer* pada tahun 2009 di Desa Kampung, Gunung Kidul. Kegiatan ini juga sekaligus meresmikan penggunaan Gedung Saemul di desa tersebut.
4. Kegiatan bakti sosial oleh para mahasiswa dari Korea Selatan dalam *Korean Youth Saemaul Volunteer* kembali diadakan pada 18 hingga 30 Juli 2011 di Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
5. Yogyakarta mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan *Saemul International Academy* 2011 di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan.
6. Fasilitasi kerjasama dan bisnis antara pengusaha di Yogyakarta dan Korea Selatan yang menghasilkan investasi dari Korea Selatan seperti pabrik rambut palsu, industri *lingerie* dan *real estate*.
7. Pada tahun 2008 Yogyakarta mengirim Sdr. Imam, seorang tenaga PNS dari Biro Kerjasama untuk

mengikuti kursus Bahasa Korea selama 6 bulan, di Korea.

8. Para pengusaha yang berasal dari Korea Selatan dan Yogyakarta saling berinteraksi melalui inisiasi kontak-kontak bisnis.
9. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan delegasi DPRD Gyeongsangbuk-do pada 20 September 2011 dan menghasilkan Nota Kesepahaman antara kedua lembaga parlemen daerah tersebut.

Selain kerjasama yang telah dipaparkan dalam poin-poin di atas, pada tahun 2015 lalu, Yogyakarta melalui Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Provinsi Gyeongsangbuk-do kembali melakukan kerjasama. UGM yang diwakili Rektornya, Prof.Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., sedangkan Gyeongsangbuk-do diwakili oleh Gubernurnya, Mr. Kim Kwan-Yong meresmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemaul Undong. Peresmian tersebut berlangsung di Fakultas Filsafat UGM dan turut dihadiri pula oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.



Gambar: UGM bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pemrov Gyeongsangbuk-do Resmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemul Undong.

Adanya kerjasama ini dilatarbelakangi sejumlah persamaan antara Indonesia dan Korea Selatan. Salah satunya adanya semangat gotong royong dengan semangat *social entrepreneurship* dalam gerakan Saemaul Undong di Korea Selatan sama dengan nilai-nilai Tri Sakti di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Pusat studi Tri Sakti dan Saemaul Undong diinisiasi oleh Fakultas Filsafat, Fakultas ISIPOL, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kehutanan UGM bekerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan. Pusat studi ini ditujukan sebagai wadah para peneliti dan mahasiswa untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka

mendukung dan meningkatkan pembangunan kapasitas masyarakat pedesaan. Melalui pusat studi ini diharapkan mampu menciptakan akademisi yang berkualitas terkait Tri Sakti dan Saemaul Undong. Selain itu, pusat studi tersebut juga ditujukan untuk menggerakkan masyarakat desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa.⁴

Peresmian pusat studi Trisakti tersebut juga sekaligus bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun kerjasama *sister city* antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do. Perayaan tersebut digelar di Yogyakarta pada 31 Agustus hingga 2 September 2015. Berbagai mata acara dilangsungkan untuk memeriahkan perayaan tersebut, salah satunya adalah pertunjukan kesenian berupa tarian kipas khas Korea Selatan dan tari-tarian khas Yogyakarta.

Puncak perayaan tersebut dilangsungkan pada hari Selasa, 1 September 2015 di dua tempat, yaitu di UGM dan Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Pada hari tersebut, Gubernur Gyeongsangbuk-do juga memberi kuliah khusus mengenai Saemul Undong di Fakultas Filsafat UGM. Terdapat pula penandatanganan reafirmasi kerjasama antar Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do. Peresmian pusat studi Trisakti dan Saemul Undong juga dilakukan pada hari

⁴ UGM. 2015. *UGM-Pemprov Gyengsangbuk Do Resmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemul Undong*. Diakses dari <http://ugm.ac.id/id/berita/10372-ugm-pemprov.gyeongsangbuk.do.korsel.resmikan.pusat.studi.tri.sakti.dan.saemaul.undong>, pada Jumat, 27 Mei 2016, pukul 19.10 WIB.

tersebut. Puncak acara pada malam hari diisi dengan jamuan makan malam dan dilengkapi dengan pementasan kesenian dari Korea Selatan dan tarian dari Yogyakarta. Rangkaian perayaan ini akhirnya ditutup pada 2 September 2015 dengan *field trip* ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah.

B. Proses Administrasi Pembentukan Kota Kembar Antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do

Kronologis kerjasama antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do bermula saat Mr. Sang-Gon Kim dan Mr. Lee Jung Woo selaku *Staff of International Trade Division* dari Provinsi Gyeongsangbuk-do melakukan kunjungan ke BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 Januari 2001. Kedatangan dua perwakilan Gyeongsangbuk-do tersebut bertujuan untuk menyampaikan surat dari gubernur Gyeongsangbuk-do kepada gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang isinya berupa perkenalan dan rencana adanya kemungkinan kerjasama. Kedatangan dua perwakilan Gyeongsangbuk-do tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan peninjauan yang dilakukan oleh Mr. Sang-Gon Kim beserta krunya ke Proyek Pembangunan Pantai Selatan. Setelah melakukan peninjauan Mr. Sang-Gon Kim menyatakan rasa tertariknya untuk bergabung dalam Program Pengembangan Pantai Selatan tersebut.⁵

⁵ Takdir Ali Mukti, Op.cit, hlm: 266.

Setelah berbagai proses negosiasi melalui surat dan telepon, akhirnya delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta bertolak ke Gyeongsangbuk-do untuk menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pada 9 September 2003. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Paku Alam IX selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Gyeongsangbuk-do pada waktu itu, Lee, Eui Geun. Proses selanjutnya terjadi pada 17 Februari 2004, Gubernur Gyeongsangbuk-do menyampaikan keinginannya untuk melakukan kunjungan balasan ke Yogyakarta pada Maret 2004 guna membicarakan dan menandatangani kerjasama *sister city*. Keinginan tersebut disampaikan melalui surat dari warga negara Korea Selatan, Abdul Nasir, selaku *Honorary Advisor of Gyeongsangbuk-do for International Cooperation*. Tahapan selanjutnya, pada 27 hingga 31 Januari 2005 Delegasi Tim *Advance* Gyeongsangbuk-do melakukan kunjungan balasan ke Daerah Istimewa Yogyakarta guna membahas draf MoU.⁶

Penandatanganan MoU pada akhirnya dilakukan pada tanggal 25 Februari 2005 di Kraton Yogyakarta, oleh masing-masing gubernur dari kedua belah pihak, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Lee, Eui Geun. Sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00-18.00 WIB negosiasi tentang nama persetujuan kerjasama kedua provinsi belum *deal*. Yogyakarta menginginkan penggunaan

⁶ Ibid, hlm: 262

istilah *Memorandum of Understanding* atau MoU, sedangkan Gyeongsangbuk-do menyarankan nama persetujuannya adalah *agreement* dengan alasan bahwa MoU adalah '*non legal binding*'. Permasalahan ini akhirnya dapat diatasi melalui *lobby-lobby* pada tingkat yang lebih tinggi.⁷

C. Faktor Pendukung: Nilai Saemul Undong Terkandung Dalam Kerja Sama Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do

Negeri Ginseng, Korea Selatan tidak hanya terkenal dengan produk-produk elektroniknya seperti Samsung dan juga LG. Ataupun produk mobilnya seperti, Hyundai, dan KIA. Korea Selatan juga terkenal dengan budaya atau "cara hidup" nya yang mengusung nilai Saemaul Undong. Gerakan masyarakat baru ini menjadi *trend* yang dibawa ke pedesaan di Afrika, India, Tiongkok, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, seperti Indonesia. Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan Korea bahkan membanggakan Saemaul Undong ini dalam Forum dan Award Pelayanan Publik PBB di Seoul.

Saemaul dilandasi nilai-nilai *diligently* (ketelatenan), *selfhelp* (menolong diri sendiri), serta *cooperation* (kerja sama) dari warga desa, dengan dipancing bantuan pemerintah. Dengan adanya Saemul Undong, kini Korea berhasil menjadi negara maju dan negara pendonor. Korea Selatan

⁷ Ibid, hlm: 263

juga tercatat dalam "20–50 Club" atau negara berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa dengan pendapatan per kapita lebih dari USD 20.000 (pendapatannya USD 33.000). Korea bangkit dari kemiskinan absolut dengan pendapatan USD 79 pada 1960.⁸

Gerakan Saemaul ini teretus ketika Presiden Park Chung-hee melakukan kunjungan ke bekas lokasi banjir pada 1969. Ketika itu ia mendapati warganya berhasil memulihkan desa meski hanya diberi bantuan yang sedikit oleh pemerintah. Jalanan dibangun menjadi lebih lebar serta tembok dan atap dibangun dengan bahan yang lebih baik. Dari hal ini teretuslah pemikiran bahwa kemajuan bisa dipercepat jika semangat warga desa untuk maju disokong pemerintah. Pada awalnya, Presiden Park menyusun kerangka konsep Saemaul Undong dalam edisi Inggris pada 26 April 1972 dan hanya terdiri dari tujuh halaman. Dalam konsep tersebut, Saemaul Undong digambarkan sebagai upaya untuk hidup lebih baik, yaitu rakyat terentaskan dari kemiskinan, pendapatan meningkat, tetangga bersahabat dan saling menolong, serta desa menjadi permai.⁹

Saemaul Undong adalah kampanye pembangunan mental dan revolusi mental. Gerakan ini tidak didorong dengan pidato, tetapi dengan tindakan dan praktik.

⁸ Rumah Suluh. *Saemul Undong Gerakan Desa Membangun di Korea Selatan*. Diakses dari <http://www.rumahsuluh.or.id/saemaul-undong-gerakan-desa-membangun-di-korea-selatan-1/>, pada 12 Juni 2016, pukul 11.45 WIB.

⁹ Ibid.

Filosofinya, bertindak dulu, baru diteorikan. Realisasi dari konsep ini kemudian diwujudkan pada 1970, ketika itu pemerintah mengirimkan 335 sak semen masing-masing ke 33.267 desa. Proyek dasar diprioritaskan, seperti memperlebar jalan desa, memperbaiki atap rumah, membuat pagar, sumur umum, serta memelihara sungai dan jembatan kecil. Hasilnya sangat memuaskan, dengan partisipasi warga menyediakan tenaga kerja dan tanah, sebanyak 16.600 desa mencapai harapan lebih dari yang ditargetkan, mandiri membangun dengan sukses. Hasil nyata dari Saemul Undong juga berupa pengembangan pabrik pengolahan, *greenhouse* untuk mengatasi musim dingin, mengadopsi alat pertanian bermesin, beternak, dan budi daya ikan dengan intensif, membangun perpustakaan, serta fasilitas lain. Indikator paling nyata keberhasilan Saemaul Undong adalah pendapatan setahun keluarga petani di desa mencapai pendapatan empat tahun buruh di kota pada 1974.

Di bawah ini adalah beberapa lampiran foto yang menggambarkan aktivitas Saemul Undong di Korea Selatan. Gambar-gambar tersebut diperoleh dari: (<https://desakodasari.wordpress.com/2014/02/15/mengenal-saemaul-undong-gerakan-pembangunan-pedesaan-di-korea-selatan/> yang diakses pada 12 Juni 2016, pukul 11.36 WIB).



Gambar: Kegiatan Saemul Undong di Korea dengan memperbaiki jembatan



Gambar: Perbaikan atap rumah



Gambar: Aktivitas pelebaran jalan

Praktek-praktek nyata yang telah diterapkan di Korea Selatan, akhirnya dirumuskan dalam tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah memicu kemampuan menolong diri sendiri dengan spirit ketelatenan, kemandirian, dan kerja sama. Kedua, secara demokratis warga memilih proyek yang bisa menguntungkan desa, bisa dipraktikkan, dan partisipasi sukarela. Ketiga, konsisten menerapkan prinsip mengutamakan dukungan ke desa yang kebanyakan untuk membangkitkan kemampuan menolong diri sendiri dan semangat kompetisi warga desa.

Nilai Saemul Undong ini juga menjadi unsur penting dalam kerja sama *sister city* antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do. Salah satunya adalah pembangunan Gedung Saemul di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kerjasama

ini tidak hanya dilihat dari bangunan fisiknya saja, tetapi juga penanaman nilai Saemaul Undong dengan budaya gotong royong yang ada di Indonesia.

Konsep pembangunan Saemaul Undong yang ada di Korea pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan konsep gotong royong yang ada di Indonesia. Semangat Saemaul Undong menitikberatkan pada prinsip ketekunan, swadaya, dan kerjasama. Hal inilah yang berhasil membawa Korea Selatan berada di titik sukses seperti saat ini. Sebelum adanya nilai Saemaul Undong, Korea Selatan merupakan negara yang miskin, terlebih masyarakat di pelosok desanya. Dengan demikian, hingga saat ini semangat Saemaul Undong merupakan pondasi dalam pembangunan ekonomi di Korea Selatan.¹⁰

Semangat gotong royong dengan semangat *social entrepreneurship* dalam gerakan Saemaul Undong di Korea Selatan juga hampir sama dengan nilai-nilai Tri Sakti di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Dengan adanya kerjasama, Indonesia patut mencontoh prinsip pembangunan di Korea Selatan yang berbasis Saemaul Undong dengan membangun bangsa dari pedesaan.¹¹

Realisasi kerjasama terkait Saemul Undong juga dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan

¹⁰ UGM. 2015. *UGM-Pemprov Gyeongsangbuk-do Korsel Resmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemaul Undong*. Op.cit.

¹¹ Ibid

Korea Selatan dalam bidang pembangunan daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi dan Wakil Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea, Chung Chae Gun. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan di kantor Kemendes PDTT yang disaksikan langsung oleh Menteri Desa dan PDTT, Marwan Jafar.¹²

Kerjasama ini dilakukan dalam lima sektor sekaligus dan diputuskan secara tertulis. Kerjasama tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan masyarakat pedesaan menggunakan model pemberdayaan masyarakat Saemul Undong, program peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Kerjasama juga ada dalam bentuk penelitian dan pembelajaran bersama mengenai pembangunan desa dan daerah tertinggal serta transmigrasi.

D. Realisasi dan Evaluasi

Kerjasama yang telah terjalin selama sebelas tahun antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do terbilang sukses. Tidak ditemukan hambatan berarti yang mengganggu kerjasama antar kedua

¹² Liputan 6. 2015. *Indonesia-Korsel Jalin Kerjasama Pembangunan Daerah*. Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2301499/indonesia-korsel-jalin-kerja-sama-pembangunan-daerah>. pada 12 Juni 2016, pukul 10.40 WIB.

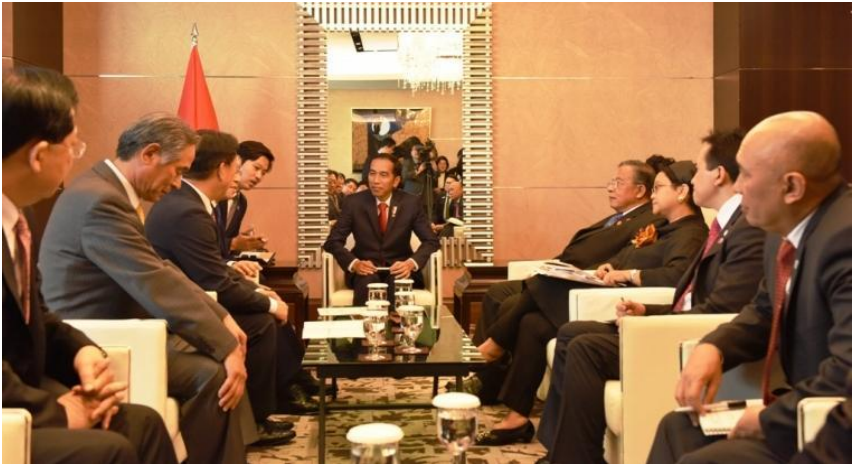
provinsi ini. Hal tersebut dibuktikan dengan terus berlangsungnya kerjasama *sister city* hingga saat ini. Bahkan kerjasama terus bertambah dan diperbarui dalam berbagai sektor. Kerjasama ini juga mempererat jalinan persahabatan tidak hanya bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do, tetapi meliputi skala yang lebih luas, yaitu persahabatan antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan. Laju investasi dan bisnis juga semakin lancar dan meningkat antara kedua provinsi dalam beberapa sektor, seperti jasa, industri barang serta perdagangan.¹³

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat bantuan fisik Gedung Saemaul bernilai milyaran rupiah. Program yang masih bertahap tersebut nilainya akan mencapai Rp. 5 milyar yang bisa digunakan untuk membiayai berbagai program yang dilaksanakan di gedung tersebut. Namun demikian, bantuan yang paling besar dan berharga sebenarnya terletak pada semangat Saemaul Undong yang diadopsi oleh masyarakat di Desa Kampung, Gunungkidul dari Korea Selatan. Dengan adanya semangat Saemaul Undong, masyarakat di desa tersebut dapat merubah pola pikir serta cara kerjanya dalam membangun desa. Hal ini tentu memberikan harapan baik bagi kemajuan desa tersebut di kemudian hari.

Program Semaul Undong tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Dalam

¹³ Takdir Ali Mukti, op. cit. Hlm: 266

kunjungannya ke Korea Selatan pada 17 Mei 2016, Presiden Jokowi disambut baik oleh Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Kim Kwan-Yong, di Charlton Suite, Hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik kerja sama *Sister City* antara Provinsi Gyeongsangbuk-do dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan berharap program Saemul Undong terus ditingkatkan.¹⁴



Gambar: Presiden Jokowi ketika bertemu dengan Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-Do, Kim Kwan-Yong, di Charlton Suite, Hotel Lotte, Seoul, Korea Selatan

(Sumber:

<http://www.harnas.co/2016/05/18/gyeongsangbuk-do-dan-yogyakarta-kerja-sama-sister-city>)

¹⁴ Harnas. 2016. *Gyeongsangbuk-do dan Yogyakarta Kerjasama Sister City*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2016/05/18/gyeongsangbuk-do-dan-yogyakarta-kerja-sama-sister-city>, pada 12 Juni 2016, pukul 10.20 WIB.

Pada kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mendukung adanya peluang yang baik antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do serta mendorong peningkatan investasi dari Provinsi Gyeongsangbuk-do tidak hanya ke Yogyakarta, namun ke Indonesia secara keseluruhan terutama di bidang *water treatment system*, teknologi informasi, dan industri elektronik. Respon positif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini menjadi iklim yang baik bagi para pengusaha Korea Selatan untuk membuka dan melakukan bisnis di Indonesia. Pada pertemuan di negeri ginseng tersebut, salah satu pengusaha dari Gyeongsangbuk-do yang menjadi anggota delegasi memuji kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini.

REFERENSI

- Ali Mukti, Takdir. (2013). *Paradiplomacy. Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: The Phinisi Press.
- Desa Kodasari. 2014. *Mengenal Saemul Undong Gerakan Pembangunan Pedesaan di Korea Selatan*. Diakses dari <https://desakodasari.wordpress.com/2014/02/15/mengenal-saemaul-undong-gerakan-pembangunan-pedesaan-di-korea-selatan/>, pada 12 Juni 2016, pukul 11.36 WIB.
- Harnas. 2016. *Gyeongsangbuk-do dan Yogyakarta Kerjasama Sister City*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2016/05/18/gyeongsangbuk-do-dan-yogyakarta-kerja-sama-sister-city>, pada 12 Juni 2016, pukul 10.20 WIB.
- Liputan 6. 2015. *Indonesia-Korsel Jalin Kerjasama Pembangunan Daerah*. Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2301499/indonesia-korsel-jalin-kerja-sama-pembangunan-daerah>. pada 12 Juni 2016, pukul 10.40 WIB.
- (2016). *Peta Gyengsang Utara*. Diakses dari http://www.mapnall.com/id/Peta-Gyeongsang-Utara_1104294.html, pada 24 April 2016, pukul 18.00 WIB.
- Rumah Suluh. *Saemul Undong Gerakan Desa Membangun di Korea Selatan*. Diakses dari <http://www.rumahsuluh.or.id/saemaul-undong-gerakan-desa-membangun-di-korea-selatan-1/>, pada 12 Juni 2016, pukul 11.45 WIB.

UGM. (2015). *UGM-Pemprov Gyeongsangbuk-do Korsel Resmikan Pusat Studi Tri Sakti dan Saemaul Undong*. Diakses dari <http://ugm.ac.id/id/berita/10372-ugm-pemprov.gyeongsangbuk.do.korsel.resmikan.pusat.studi.tri.sakti.dan.saemaul.undong>, pada 22 April 2016, pukul 17.00 WIB

IMPLEMENTASI PERJANJIAN INDONESIA DALAM UPAYA PEMBEBASAN HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI

Eka Fitriana

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri, baik pria maupun wanita. Hal tersebut yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain dalam bidang pengiiiman tenaga kerja. Tenaga kerja yang dikirim oleh Indoenesia seringkali menempati sektor kerja buruh atau pembantu rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri dari pengiriman tenaga kerja tersebut banyak yang menuai masalah dalam ranah hukum di negara penerimanya. Dimana hal tersebut banyak melibatkan pemerintah kedua negara tersebut sering melakukan banyak negosiasi dalam menyelesaikan kasus hukum yang di alami oleh warga negara masing-masing.

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama dalam pengiriman tenaga kerja adalah negara bagian timur tengah yakni Arab Saudi. Dimana sekitar 1,01 juta jiwa berada di negara Arab Saudi. Dengan dinamika pasang surut jumlah, yakni dimana kadang jumlah tersebut bisa naik dan bisa juga turun. Kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri, di

negara Arab Saudi dan memang tenaga kerja Indonesia terkenal dengan keramahan dan kepatuhannya sehingga Arab Saudi banyak mengimpor TKI di negaranya dengan jumlah gaji yang relatif murah. Dengan begitu Indonesia merupakan yang dijadikan Arab Saudi sebagai ladang tenaga kerja. Sedangkan di pihak Indonesia karena biaya pengiriman yang relatif murah dan Arab Saudi merupakan negara yang menerima TKI.

Selain itu bahwa hubungan bilateral yang terjalin antara Arab Saudi dan Indonesia sudah terlain cukup lama yakni dengan berjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, untuk terus menjaga hubungan baik tersebut maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama secara resmi melalui perjanjian. Pada 24 November. 1970 lahir perjanjian Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia yang ditandatangani di Jeddah oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui UU No.9 tanggal 18 September 1971 LN No.77 tambahan LN No.2972.¹ Hal itu yang kemudian membuat keduanya banyak melakukan kerjasama yang antara lain salah satunya adalah dalam bidang pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dari perjanjian

¹ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/699/jbptunikompp-gdl-raturayant-34921-8-unikom_r-i.pdf

tersebut yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kedua negara dalam melakukan kerjasama. Sehingga kedua negara tersebut sudah terikat perjanjian dan diaplikasikan dalam hukum maupun UU negara masing-masing, agar keduanya mendapatkan keuntungan di masing-masing negara.

Di bawah ini merupakan data-data tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dari tahun ke tahun, seperti di bawah ini:

Tabel Penempatan TKI dari Tahun 2011 s/d 2014

No.	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1.	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2.	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3.	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4.	2014	429.872	247.610	58	182.262	42

Sumber: Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014

dan pengiriman ke Arab Saudi pada sekitar tahun 2014 tercatat oleh BNP2TKI sejumlah 44.325 jiwa.² Dan di antaranya banyak dari jumlah tersebut yang bermasalah.dengan jumlah data tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dalam hukum salah satu datanya adalah pada tahun 2011 sebagai contoh, yakni antara lain sebagai berikut: Abdul Azizi, Ahmad Azizi Hartiti, Muhammad Rusyidi Muhyi Jamil alias Mursyidi, Saeful Mubarak Haji

² <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang5>

Abdullah, Muhammad Daham Arifin (sedang dalam proses pengadilan), dan Sam'ani bin Muhamad Niyan. Keenam TKI ini berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan, dan sedang berada di Penjara Umum Mekkah sejak akhir November 2006. Para TKI ini divonis hukuman pancung karena dituduh berkelompok membunuh dan mengubur warga negara Pakistan Zubair bin Hafiz Ghul Muhammad. Ety binti Toyib Anwar. Wanita asal Majelengka, Jawa Barat, ini tengah berada di Penjara Thaif. Ia diancam vonis qishash, tetapi dimaafkan dari hukuman mati. Namun, sampai saat ini belum diketahui kabarnya. Ia dituduh berkelompok dengan warga negara India, Abu Bakir, untuk meracuni majikannya Faisal Abdullah Al Ghamdi pada tahun 2002. Jamilah binti Abidin Rofii Wanita asal Cianjur, Jawa Barat, ini berada di Penjara Umum Mekkah sejak Maret 2007.

Ancaman hukumannya adalah dengan membayar diyat. Jamilah dituduh membunuh majikan bernama Salim Al Ruqi. Menurut pengakuan Jamilah, majikannya itu berusaha memerkosanya di daerah Riyadh Dhahir, Mekkah. Siti Zainab binti Duhri Rupa Perempuan asal Malang, Jawa Timur, ini berada di Penjara Umum Madinah. Ancaman hukuman yang diperolehnya adalah qishash. Ia dituduh membunuh istri majikan Hurah binti Abdullah. Saat ini, kasus yang menimpa Siti masih menunggu status anak laki-laki korban yang belum berusia dewasa. Suadiah binti Sumidi Perempuan asal Malang, Jawa Timur, ini berada di

Penjara Umum Mekkah. Ia dijatuhi ancaman hukuman mati atas dugaan terlibat sihir. Satinah binti Jumadi Perempuan asal Semarang, Jawa Tengah, ini diancam hukuman qishash karena dituduh membunuh istri majikan Nura Al Garib dan mengambil uang sejumlah 37.970 riyal Saudi. Warnah binti Warta Niing dan Sumartini binti Manaungi Galisun Kedua wanita asal Karawang, Jawa Barat, dan asal Moyo Utara, Sumbawa, ini mendapat ancaman hukuman qishash karena dituduh melakukan sihir terhadap anak majikan yang baru berusia tiga tahun. Mereka berada di Penjara Malaaz. Nurkoyah binti Marsan alias Nuriyah Perempuan asal Rengasdengklok, Jawa Barat, ini mendapat ancaman hukuman pancung karena dituduh membunuh anak majikan. Ahmad Fauzi bin Abu Hasan Lelaki asal Bangkalan, Madura, Jatim, ini berada di Penjara Umum Mekkah. Keluarga memaafkan, tetapi harus membayar diyat. Ia dituduh membunuh sesama WNI. Darmawati binti Tarjani Perempuan asal Tapin, Kalimantan Selatan, ini berada di Penjara Bremen. Ia telah divonis hukuman mati karena membunuh dan memutilasi WNI, Amnah binti Ahmad. Hafidz bin Kholil Sulam Lelaki asal Madura, Jawa Timur, ini sedang berada di Penjara Umum Mekkah. Ia mendapat ancaman hukuman mati karena membunuh pamannya WNI, Mohammad Husin Ali Mukalim. Hanan binti Muhammad Mahmud Perempuan asal Madura, Jawa Timur, ini berada di Penjara Umum Jeddah. Saat ini ia

tengah menjalani proses persidangan. Hanan dituduh membunuh suaminya, Yahya Muhammad Jabir. Sulaimah binti Misnadin Perempuan asal Pontianak ini sedang berada di Penjara Bremen. Ia membayar diyat dan sedang proses persidangan. Sulaiman dituduh membunuh orangtua majikan, Zahbah Al Ghamdi. Tuti Tursilawati binti Warjuki Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, ini berada di Penjara Thaif dan sedang menjalani proses sidang. Ia membunuh majikan karena sering melakukan pelecehan seksual padanya. Masamah binti Raswa Wanita asal Cirebon ini sedang berada di Penjara Tabuk. Ia dituduh membunuh bayi majikan dan sampai saat ini belum ada ancaman hukumannya. Emi binti Katma Mumi Perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat, ini dipenjarakan di Dammam. Emi dituduh membunuh anaknya sendiri dan saat ini tengah menjalani proses persidangan. Tarsini binti Tamir Perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, ini dituduh meracuni anak majikan. Ia dituntut hukuman mati Halimah binti Tarma Ami Wanita asal Malangbong, Jawa Barat, ini berada di penjara Malaz karena dituduh membunuh anak majikan Sultan Al Harbi. Ancaman hukuman untuknya sampai saat ini belum ada.³

3

<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/24/18333261/25.daftar.nama.tki.di.penjara.arab.saudi>

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap warga negara atau tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri seperti Arab Saudi tidak lepas dari jerata hukum di negara yang di tempatinya, jika memang terbukti warga negara maupun tenaga kerja tersebut melakukan kesalahan dalam ranah hukum, seperti pembunuhan dan pencurian. Akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum negara yang ditempatinya sesuai kebijakan hukum negara tersebut. Sehingga kemudian banyak cara atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia yang terjerat hukuman mati yang berada di Arab Saudi dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan syarat memulangkan tenaga kerja yang bermasalah atau terjerat hukum di Arab Saudi. Dengan melakukan berbagai alternatif resiko yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia, salah satunya ialah membayar denda atau diyat kepada pemerintah Arab Saudi sejumlah yang di tentukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai cara dalam membebaskan TKI tersebut.

Kajian Pustaka

Dari Jurnal Strategi Negosiasi (Strategic Negotiation) Oleh: Drs. Agus Guntur Pm, Mm. Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau disingkat BATNA, yaitu langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh

seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Arbono (2005) memberi Contoh ; Bila pasal mengenai besarnya pesangon yang harus diberikan dalam proses PHK yang diajukan pihak pengusaha tidak dapat disepakati oleh pihak serikat pekerja, maka negosiator dari pihak pengusaha mempunyai dua pilihan, yaitu mencoba untuk melakukan trade off dengan pasal mengenai penambahan cuti atau meninggalkan perundingan, bila tidak ada tanda-tanda positif dari pihak perunding pihak serikat pekerja untuk mau beranjak dari posisinya saat ini.

Dari Jurnal ILO (Negosiasi Efektif Sebuah Panduan Praktis) oleh: Robert Heron dan Caroline Vandenabeele Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan.

People Negotiate all the time (Roy J. Lwecki, 2003). Dalam proses negosiasi, bukan hanya perselisihan antara sesuatu dan sesuatu saja yang memerlukan negosiasi. Dalam pengambilan keputusan saja diperlukan negosiasi, bahkan dalam tahapan komunikasi intra personal. Sesuai dengan alasan diperlukannya komunikasi menurut Lewicki, yaitu untuk (1) Untuk menciptakan sesuatu yang baru baik secara kelompok atau individu, atau (2) Untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan.

Pembahasan

A. Ontologi

Keefektifitasan perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam upaya pembebasan, peringanan hukuman serta perlindungan TKI yang bekerja di negara Arab Saudi, dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab keberhasilan dalam mengimplementasikan. Kemudian keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan terus-menerus kerjasama dalam bidang penyediaan TKI oleh Indonesia dan lapangan pekerjaan oleh negara Arab Saudi itu sendiri. Dimana faktor yang pertama mengenai keberhasilan dan keefektifitasan perjanjian tersebut adalah: bahwa pertama, negara yakni Indonesia dan Arab Saudi mempunyai kesamaan dalam bidang agama. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah bentuk kesamaan baik itu berupa budaya, agama yang sama dan mayoritas kemudian hal tersebut yang membuat sebuah hubungan kerjasama kedua negara dapat berlangsung lama. Tidak dipungkiri bahwa proses pembebasan tersebut atau perlindungan TKI tersebut yang dilakukan Arab Saudi sebagai bentuk kesaamaan tersebut.

Kedua adalah kesamaan kepentingan dan kebutuhan kedua negara. Seperti yang kita tahu bahwa Arab Saudi sangat membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia sebagai pekerjanya untuk di tempatkan di

bagian bawah atau buruh. Dengan pembayarannya yang lebih rendah. Sehingga kemudian kebutuhan banyak pekerja yang berasal dari Indonesia kemudian Arab Saudi juga berkewajiban dalam melindungi TKI yang berada di negaranya. Sedangkan Indonesia yang notabene mempunyai warga negara yang sangat banyak dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Dimana ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang maka lapangan pekerjaan di luar negeri seperti Arab Saudi sebagai salah satu tujuan kerja. Dengan gaji yang cukup tinggi.

Selain itu faktor yang ketiga adalah terletak pada sejarah kerjasama yang telah terjalin cukup lama antar kedua negara tersebut yakni Arab Saudi dan Indonesia khususnya dalam bidang keagamaan yakni terkait pengiriman jamaah haji dan umroh. Selain dari pengiriman TKI bahwa kedekatan atau sejarah kerjasama antar keduanya yang dapat mempererat hubungan dengan mematuhi perjanjian yang telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut. Dimana mengenai pembebasan TKI yang akan di hukum mati, keringanan hukuman dan serta perlindungan TKI atas dasar pembuatan hukum tentang ketenagakerjaan yang pro terhadap tenaga kerja dari Indonesia.

Sehingga bahwa mengapa perjanjian tentang perlindungan TKI di Arab Saudi berhasil, itu karena sejarah

kerjasama antar keduanya. Selain itu pula bahwa keberhasilan negosiasi yang dilakukan kedua negara tersebut mengenai pembebasan hukuman mati kepada warga negara Indoensia yang terjerat kasus hukum di Arab Saudi, yakni memang Indonesia menyanggupi adanya pembayaran denda atau Diyat yang diajukan oleh pemerintah Arab saudi. Diyat tersebut merupakan uang tebusan jika pihak korban menyetujuinya atas pembebasan bersyarat bagi para tenaga kerja Indonesia yang terjerat kasusu hukum tersebut.

B. Epistemologi

Proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi yakni diawali dengan proses perundingan di bawah ini merupakan runtutan atau alur dari tatacara negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan TKI asal Semarang yang akan di hukum mati atas dasar pembunuhan majikannya di kota Gaseem. Pada saat itu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini merupakan salah satu contoh dari awal perundingan hingga kemudian TKI tersebut dibebaskan bersyarat oleh pemerintah Arab saudi.

Pada awalnya yakni bahwa sebagaimana kita ketahui pemerintah mengutus Mantan Ketua Satdas TKI Maftuh Basyuni berangkat ke Arab Saudi untuk membantu

proses negosiasi dengan pihak Arab Saudi terkait hukuman pancung Satinah. Saat keberangkatan ke Arab Saudi, Maftuh Basyuni dibekali tambahan uang sebesar 1 juta real sebagai tambahan 4 juta real uang diyat yang dititipkan di pengadilan Arab Saudi sebelumnya. Selain itu, Maftuh juga dibekali surat dari Presiden SBY kepada Raja Arab Saudi yang berisi permohonan penundaan hukuman pancung bagi Satinah. Sejak awal, misi ini direncanakan untuk berunding terlebih dahulu dengan pihak keluarga korban, Nusa Al Gharib mengenai pembayaran uang diyat. Apabila keluarga korban tersebut tetap meminta pembayaran 7 juta real dan dibayar secara sekaligus, maka Maftuh Basyuni akan menemui Gubernur Gaseem, Prince Aisal Bin Bandar Bin Abdul Azis Al-Saud.

Gubernur Gaseem selama ini cukup membantu beberapa kali penundaan hukuman pancung. Dengan menemui Gubernur Gaseem itu, diharapkan dapat membantu lagi untuk perpanjangan waktu pembayaran diyat 7 juta real tersebut. Dimana pada saat itu perundingan dengan pihak keluarga korban tidak berhasil, dan mereka tetap menuntut 7 juta real. Padahal sebelumnya melalui pengacara di Arab Saudi, keluarga korban bersedia menerima 5 juta real, dan sisanya dapat dicicil. Perubahan sikap keluarga korban itu dikarenakan melihat reaksi masyarakat Indonesia yang terus mendesak pemerintah agar membebaskan Satinah, dan membayarkan diyatnya.

Selain itu, juga dikarenakan ada sebagian kelompok masyarakat dari pihak Indonesia yang melakukan pengumpulan dana untuk Satinah.

Dengan keadaan yang demikian sehingga membuat pemerintah langsung melaksanakan rapat kabinet terbatas dipimpin MENKOPOLHUKAM dan dihadiri MENLU, Kepala BNP2TKI dan DIRJEN Bina Penta KEMENAKERTRANS. Rapat dipimpin Menkopolhukam memutuskan untuk diyat sebesar 7 juta real segera dibayarkan. Dalam hal pembayaran itu, pemerintah tetap hanya menyelesaikan 3 juta real sebagaimana yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan, 1 juta real dari Asosiasi PJTKI dan dermawan Arab Saudi. Sedangkan tambahan 3 juta realnya merupakan sumbangan dari pengusaha di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Menkopohukam menetapkan kebijakan, bahwa penanganan masalah TKI yang terancam hukuman mati untuk dipertimbangkan membuat desk di kantor Menkopolhukam. Desk tersebut terdiri dari beberapa figur terkemuka yang selama ini banyak terlibat di Satgas TKI. Untuk langkah selanjutnya, Maftuh Basyuni akan menemui Gubernur Gaseem untuk menyampaikan surat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan permohonan penundaan pembayaran yang akan ditransfer secepatnya. Setelah itu, baru

pembebasan Satinah akan diurus sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku di Arab Saudi.⁴

Dalam negosiasi pada kasus pembebasan TKI yang bermasalah di Arab Saudi Indonesia banyak meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan mematuhi aturan administrasi yang diwajibkan bagi pihak Indonesia. Selain itu juga bahwa pihak Arab Saudi juga mengimplementasikannya dalam perlindungan TKI dengan perjanjian tidak adanya moratorium yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia

C. Aksiologi

Dalam proses negosiasi dari mulai pertemuan yang dilakukan oleh kedua negara yakni Arab Saudi dan Indonesia tersebut terdapat beberapa manfaat adanya tatacara yang dilakukan, dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerjasama antar keduanya. Dan dimana keduanya mempunyai kesamaan dalam kepentingan dan kebutuhan nasionalnya masing-masing negara tersebut. Manfaat yang diperoleh dari adanya sebuah negosiasi adalah pengambilan jalan damai dengan mengutamakan kesepakatan, atau dalam islam musyawarah yang kemudian menciptakan kesepakatan bersama. Kemudian kesepakatan-kesepakatan yang dirumuskan oleh kedua belah pihak tersebut juga dipatuhi oleh kedua belah pihak atau

⁴ <http://www.lensaindonesia.com/2014/04/05/ini-lika-liku-satinah-lolos-hukuman-mati-terima-kasih-pak-sby.html>

negara tersebut. Dimana hal tersebut yang membuat kedua negara dapat meneruskan hubungan kerjasama tanpa salah satu pihak atau negara melakukan konfrontasi atas negara lain.

Selain itu juga bahwa manfaat dari proses negosiasi tersebut dapat memperbaiki silaturahmi dan memperbaiki hubungan kerjasama antar kedua negara. Terutama negara yang berselisih. Disamping itu juga bahwa proses dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara maupun lebih dapat meningkatkan komitmen dalam kerjasama antar negara. Dalam hal ini bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih dapat membangun perserikatan dan dapat membangun kekuatan baru dalam bidang hubungan kerjasama. Dengan adanya perjanjian yang diratifikasi, dapat menciptakan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak atau pihak-pihak yang lain dalam melakukan kerjasama. Selain itu juga berawal dari proses perundingan, perjanjian hingga adanya ratifikasi akan menciptakan norma baru dalam hukum internasional.

1. Kesimpulan

Pada hakekatnya bahwa sebuah perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan hubungan kerjasama adalah merupakan implementasi dari sebuah kesepakatan keduanya yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang di ratifikasi oleh keduanya. Sehingga sebagai suatu bentuk komitmen antar kedua

negara atau lebih dan kepatuhan negara-negara serta menghormati negara-negara dengan membuat perjanjian, meratifikasi dan mengimplementasikan sesuai kewajiban merupakan suatu kehormatan bagi negara-negara yang terlibat dalam proses perjanjian tersebut.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa implementasi suatu perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia, dalam upaya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Dimana kedua sepakat atas perjanjian yang keduanya buat, dan perjanjian tersebut berjalan sangat efektif. Yakni ditandai dengan pemulangan TKI Indonesia yang terjerat kasus hukum, yang akan dihukum mati di negara Arab Saudi. Akan tetapi dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan membayarkan diyat atau uang tebusan maka pemerintah Arab Saudi bersedia membebaskan warga negara Indonesia tersebut. Pada akhirnya atas kesepakatan dan perjanjian yang keduanya buat, menciptakan kerjasama yang berkelanjutan tanpa adanya konfrontasi dari pihak manapun.

Hal tersebut membuktikan bahwa negosiasi yang dilakukan berhasil antar kedua negara tersebut. Dimana kedua negara tersebut bersedia dengan ketentuan yang tertulis dengan perjanjian yang keduanya sepakati. Oleh karena itu bahwa proses negosiasi hingga pengimplementasian sebuah perjanjian harus didasarkan

pada kepentingan yang sama antar kedua elah pihak bahkan lebih. Sehingga mencptakan kesepkatan-kesepakatan yang akan menciptakan keuntungan bagi beberapa pihak yang bersangkutan. Serta komitmen dalam menjalankan perjanjiyang telah diratifikasi juga sebagai salah satu unsur dalam keberhasilan perjanjian internasional.

REFERENSI

- <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat Penempatan-TKI-429.872-Orang5>
- <http://www.crnhq.org/files/66138/files/CR%2012%20Skills%20TM/PDFs/O%2010.%20Negotiation%202nd%20Ed.pdf>
- <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo->
- <http://www.lensaindonesia.com/2014/04/05/ini-lika-liku-satinah-lolos-hukuman-mati-terima-kasih-pak-sby.html>
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368875-MK-Johannes%20Natanael%20S.pdf>
- <http://repository.unand.ac.id/21861/3/bab%201.pdf>
- <http://www.stekpi.ac.id/informasi/datas/users/1/negosiasi.pdf>
- jakarta/documents/publication/wcms_168888.pdf

ANALISIS KRITIS POLITIK LUAR NEGERI RUSIA MODERN

Muchammad Farid

Republik Federasi Rusia menjadi salah satu wilayah yang terluas di dunia. Membentang dari Benua Eropa dan Benua Asia wilayah Republik Federasi Rusia¹ diperkirakan memiliki total luas wilayah 17.098.242 km². Luas wilayah daratan sebesar 16.377.742 km² dan luas wilayah lautan sebesar 720.500 km². Dengan luas wilayah tersebut pemerintah Republik Federasi Rusia dalam merumuskan pola kebijakan politik baik dalam dan luar negeri haruslah sesuai dengan kepentingan nasional Republik Federasi Rusia.

Bubarnya Uni Soviet setelah perang dingin membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri Republik Federasi Rusia. Diawal lahir dan berdirinya Republik Federasi Rusia pembuatan arah kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri mengacu kepada empat doktrin karakteristik Republik Federasi Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet². Empat hal tersebut ialah:

¹ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html>.

² Wicaksana, Wahyu. 2015. Understanding Russian: Russian Foreign Policy. Dalam perkuliahan Masyarakat Budaya Politik Rusia, Eropa Timur, Asia

1. Doktrin bahwa Republik Federasi Rusia merupakan pewaris utama Uni Soviet. Republik Federasi Rusia ingin mengembalikan kejayaan pada masa Uni Soviet sebagai negara Super Power di dunia. Doktrin tersebut kemudian berkembang dari generasi ke generasi dan menjadi hal yang paling mendasar disetiap pola pikir rakyat Republik Federasi Rusia. Sebagian besar rakyat Republik Federasi Rusia sadar pengalaman masa lalu yang pernah mengalami kejayaan dan keruntuhan pasca runtuhnya rezim Komunisme telah berkomitmen dan menjadi sebuah modal yang sangat berharga untuk menjadikan Republik Federasi Rusia menjadi negara pesaing utama Amerika Serikat di dunia.
2. Doktrin Republik Federasi Rusia menganggap politik wilayah yang telah diwariskan oleh Uni Soviet adalah hal yang sangat menentukan di dalam perumusan kebijakan luar negeri negaranya. Uni Soviet mewariskan sebuah gagasan kepada Republik Federasi Rusia mengenai Primacy of Geopolitical Consideration, gagasan ini timbul sebagai buah pemikiran masyarakat Uni Soviet pada saat itu yang menganggap bahwa Republik

Tengah. Pada hari Jumat, 10 April 2015. Departemen Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Airlangga.

Federasi Rusia saat ini sebagai wilayah *Center of International System*, warisan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Republik Federasi Rusia berupa sebuah doktrin pemahaman Geopolitical Consideration dalam membangun sebuah area pertahanan guna melindungi wilayah kedaulatan Republik Federasi Rusia dengan negara lain.

3. Doktrin bahwa sistem internasional tidak bisa dikelola oleh satu negara saja. Perlu adanya sebuah keseimbangan distribusi kekuatan yang merata. Doktrin ini menekankan perlunya keseimbangan kekuatan dan mencegah Republik Federasi Rusia menjadi kekuatan tunggal di dunia.
4. Doktrin yang menekankan pada pemerintah Republik Federasi Rusia sangat menghindari perang terbuka. Uni Soviet dan Republik Federasi Rusia memiliki pandangan bahwa perang terbuka bersifat merugikan dan justru berdampak buruk kepada Republik Federasi Rusia itu sendiri. Uni Soviet mewariskan sebuah paham peperangan secara diam-diam (tertutup) dengan mengandalkan kemampuan intelejen yang sangat baik. Dengan mengandalkan kemampuan intelejen yang diwariskan oleh Uni Soviet, Republik Federasi Rusia pada saat ini dapat mengurangi kerugian

yang ditimbulkan dari perang terbuka dan dapat memperhitungkan kalkulasi untung rugi dalam merumuskan kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri.

Keempat doktrin warisan Uni Soviet terhadap Republik Federasi Rusia tersebut secara tidak langsung telah membentuk kebijakan Luar Negeri Republik Federasi Rusia yang terdiri dari tiga elemen penting yakni ide kebijakan luar negeri, mayoritas perumusan kebijakan dan pilihan strategi internasional.

Selain keempat doktrin warisan Uni Soviet, Republik Federasi Rusia memiliki banyak faktor pendukung dalam menentukan perumusan kebijakan luar negeri Republik Federasi Rusia yaitu *National Power*. *National Power* yang dimiliki oleh Republik Federasi Rusia antara lain: Geografi, Sumber Daya Alam, Populasi atau Penduduk, Kemampuan Industri, Kesiagaan Militer, Karakter Nasional, Moral Nasional, Kualitas Diplomasi, Kualitas Pemerintah³.

Dengan memiliki *National Power* dan keempat doktrin warisan Uni Soviet, Republik Federasi Rusia

³ Hans. J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, 2010, *Politik Antar Bangsa*, terj. S. Maimoen, at al, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal.135-173.

berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev, Republik Federasi Rusia telah mampu mengimbangi dan menjadi pesaing utama bagi Amerika Serikat yang pada saat ini menjadi negara Adi Daya. Banyak kerja sama yang terjalin dengan negara lain sebagai akibat dari kebijakan yang telah dibuat oleh Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev. Kerjasama tersebut antara lain kerjasama bilateral, multilateral, regional dan internasional. Sejumlah kerjasama yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah Republik Federasi Rusia berdasarkan pada tujuan kepentingan nasional Republik Federasi Rusia.

Kajian Pustaka.

Marcel De Haas telah mengkaji lebih dalam tentang Kebijakan Keamanan dan Politik Luar Negeri Republik Federasi Rusia. Di dalam karya bukunya yang berjudul *Russia Foreign Security Policy*, Marcel De Haas mencoba menganalisis sejumlah kebijakan keamanan dan politik luar negeri Republik Federasi Rusia yang telah dibuat oleh Vladimir Putin dan pengimplementasiannya, sejumlah kebijakan keamanan dan politik luar negeri Republik Federasi Rusia yang telah dibuat oleh Dmitry Medvedev dan pengimplementasiannya, konflik dan perang yang terjadi di Georgia, mengevaluasi penilaian tentang

kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia dari awal pembuatannya sampai dengan periode selanjutnya⁴.

Gagasan dalam buku ini menjelaskan mengenai kondisi politik domestik Republik Federasi Rusia, kondisi perpolitikan dalam negeri Republik Federasi Rusia sangat unik. Menganggap bahwa demokrasi versi barat sebagai hambatan pemerintahan yang efektif. Yang ingin dibangun oleh para pemimpin Republik Federasi Rusia adalah sebuah pemerintahan yang makmur, bermartabat, kuat dan menggunakan demokrasi versi Rusia tanpa harus mengikuti aturan baku dari demokrasi barat.

Bagian selanjutnya dari buku ini ialah mengkaji dan menganalisis politik luar negeri Republik Federasi Rusia dengan komponen utamanya ialah kebijakan keamanan kawasan dan melakukan banyak kegiatan kerjasama internasional dengan negara manapun di dunia sebagai sumber pembuatan kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia. Mengenai kebijakan keamanan kawasan, Republik Federasi Rusia yang merupakan bagian dari wilayah Uni Soviet pada masa Komunisme menaruh perhatian yang sangat serius dalam menjaga wilayah kedaulatannya. Baik terhadap wilayah bekas Uni Soviet dan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara

⁴ De Haas, Marcel. *Russian Foreign Policy*. Routledge. New York.2010.

Republik Federasi Rusia. Mengenai kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Federasi Rusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasional negara.

Sebagai negara pewaris utama rezim Komunisme, Republik Federasi Rusia tetap menjalankan fungsi demokrasi pada roda pemerintahannya. Akan tetapi dalam kenyataannya Republik Federasi Rusia dalam masa transformasi dari era Komunisme menuju era Demokrasi masih tetap sebagian menerapkan paham Komunisme. Sebagai contoh diaturnya kebebasan berpendapat, partai yang berkuasa ialah partai yang mendukung calon presiden dan calon kepala pemerintahan. Semua lawan politik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan diredam. Akan tetapi rakyat justru sangat puas dengan kinerja dan kemajuan yang dialami oleh Republik Federasi Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev walaupun tetap menerapkan paham Komunisme dan otoriter di dalam pemerintahan Republik Federasi Rusia. Hal tersebut bertujuan agar mengembalikan kembali kejayaan Uni Soviet sebagai negara Super Power dan ingin menjadi penyeimbang bagi eksistensi Amerika Serikat sebagai negara Adidaya.

Marcel De Haas dalam mengkaji kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia mengacu kepada tiga model pembuatan keputusan Graham T. Allison. Model yang digunakan ialah model aktor rasional⁵. Marcel De Haas beranggapan bahwa Republik Federasi Rusia sebagai aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Republik Federasi Rusia dinilai sebagai negara yang sangat unik. Karena sebagai negara pusat lahirnya paham Komunisme pada masanya dan menganut paham demokrasi ketika berubah menjadi Republik Federasi Rusia, Republik Federasi Rusia masih tetap menggunakan cara otoriter dan komunisme disetiap roda pemerintahannya. Justru mendapatkan kepuasan dan apresiasi tertinggi dari rakyatnya karena telah membawa kemajuan bagi Republik Federasi Rusia.

Keunikan Republik Federasi Rusia tersebut dikemas dalam Marketing Foreign Policy, karena Republik Federasi Rusia mampu mengakumulasikan perhitungan untung rugi ketika menggunakan demokrasi versi Rusia yang mengadopsi demokrasi barat dan mampu menggabungkan kedua paham baik demokrasi maupun komunisme kedalam satu pemerintahan Republik Federasi Rusia. Hasil pengkajian dan analisis yang terdapat di

⁵ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 234.

dalam buku Marcel De Haas mengenai kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia dapat dijadikan sebuah pedoman dalam memahami kondisi perpolitikan yang terjadi di negara tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas perpolitikan di dunia internasional pada umumnya.

Buku hasil karya Marcel De Haas yang berjudul *Foreign Policy Russia* sangat berbeda dengan buku hasil karya Andrew C. Kuchins and Igor A. Zevelev yang berjudul *Russian Foreign Policy: Continuity in Change*. Buku hasil Karya Marcel De Hass lebih menitikberatkan peran Pemimpin negara seperti Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev sebagai tokoh sentral pembuatan kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia. Buku hasil karya Andrew C. Kuchins and Igor A. Zevelev yang berjudul *Russian Foreign Policy: Continuity in Change*⁶ lebih menitikberatkan peran Vladimir Putin yang mendapatkan dukungan penuh dari pihak Kremlin dalam menjalankan roda pemerintahannya dan membuat kebijakan politik luar negeri yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi perpolitikan yang terjadi pada masa

⁶ Anders Aslund and Andrew C. Kuchins, *The Russia Balance Sheet* (Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2009); and Andrei P. Tsygankov and Pavel A. Tsygankov, "A Sociology of Dependence in International Relations Theory: A Case of Russian Liberal IR," *International Political Sociology* 1 (2007), pp. 307—324.

tersebut. Tentunya kedua buku tersebut menjadi buku acuan yang sangat cocok bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, peneliti masalah Eropa Timur dan Rusia, dan para akademisi yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tata cara pembuatan kebijakan politik luar negeri.

Pembahasan.

Sebagai pewaris utama Uni Soviet, Republik Federasi Rusia dari awal berdirinya hingga sampai saat ini selalu mengalami gejolak perpolitikan yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan oleh sebuah proses transformasi politik yang sangat panjang dan sangat memerlukan proses adaptasi yang sangat lama dari sebuah paham komunisme menuju kedalam paham demokrasi. Sejak Vladimir Putin menggantikan Boris Yeltsin, banyak persoalan yang belum banyak terselesaikan dengan baik. Hal tersebut mulai diselesaikan satu persatu oleh Vladimir Putin yang menegaskan bahwa Republik Federasi Rusia pasca Komunisme ialah Republik Federasi Rusia bukan Uni Soviet, memberikan kesadaran kepada rakyat Republik Federasi Rusia bahwa di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Putin mampu membawa kembali era kejayaan Uni Soviet yang pernah menjadi negara Super Power, Republik Federasi Rusia dalam menjalankan roda

pemerintahannya menggunakan demokrasi versi Rusia yang tentunya mengadopsi dari paham demokrasi pada umumnya, Vladimir Putin sebagai individu yang nasionalis yang mampu menjadikan Republik Federasi Rusia sebagai negara eks Komunis pertama yang menerapkan sistem liberalis di negaranya dan menjadikan Republik Federasi Rusia sebagai penyeimbang di tengah hegemoni Amerika Serikat sebagai negara Adidaya

Lahirnya Republik Federasi Rusia menjadi negara maju bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, di lain sisi bagi negara Republik Federasi Rusia hal ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri karena tercapai tujuan kepentingan nasional. Akan tetapi di lain sisi bagi negara lain khususnya negara pesaing hal tersebut merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata. Banyak negara yang tidak suka dengan kebangkitan Republik Federasi Rusia menjadi negara yang maju khususnya Amerika Serikat. Berbagai macam bentuk intimidasi, tindakan provokatif dan tindakan yang negatif di tunjukkan kepada negara Republik Federasi Rusia. Tindakan intimidasi dan provokatif tersebut dengan mengirim sekutu mereka yaitu NATO untuk mengganggu stabilitas keamanan dan perpolitikan di kawasan Eropa Timur dengan cara membujuk negara-negara eks Uni Soviet untuk bergabung menjadi negara anggota NATO. Sudah pasti hal tersebut

sangat mengganggu usaha Republik Federasi Rusia untuk memperluas pengaruh dan hegemoninya di negara-negara eks Uni Soviet. Tindakan negatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Republik Federasi Rusia yaitu memasang instalasi sistem penangkis rudal⁷ di Republik Ceko dan di Polandia, melakukan persaingan yang tidak sehat di bidang bisnis persenjataan, melemparkan beberapa isu internasional seperti isu invasi Rusia ke negara Georgia dan Chechen yang bertujuan untuk menyudutkan posisi Republik Federasi Rusia.

Respon yang dilakukan oleh para pemimpin Republik Federasi Rusia yakni Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev terhadap tindakan intimidasi, provokatif dan negatif yang ditunjukkan oleh negaranya ialah menjadikan kekayaan sumber daya alam (gas alam) yang dimiliki oleh Rusia sebagai alat untuk berdiplomasi, menjadikan senjata nuklir yang dimiliki Republik Rusia sebagai *deterrence*, menjadikan senjata nuklir yang dimiliki oleh negara Republik Federasi Rusia sebagai senjata yang bersifat defensif, menjadikan ekspor persenjataan yang dihasilkan oleh perusahaan persenjataan milik pemerintah Republik Federasi Rusia sebagai cara untuk menghasilkan sejumlah devisa bagi negara dan mengikuti sejumlah kerjasama

⁷ Nation, C. R. *US Interest in The New Eurasia*. Strategic Studies. 2007

internasional untuk memperluas pengaruh rusia di dunia internasional.

Dengan mewarisi sejumlah persenjataan dan senjata nuklir yang berasal dari Uni Soviet, Vladimir Putin menggunakan instrumen persenjataan dan senjata nuklir sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan politik luar negerinya. Walaupun senjata nuklir yang dibuat dan dikembangkan hanya sebagai efek deterrence dan bersifat defensif setidaknya negara lain yang ingin bersitegang dengan Republik Federasi Rusia akan berfikir ulang dan menghitung kalkulasi untung ruginya.

1. Karakteristik pembuatan keputusan.

Karakter pembuatan keputusan di negara Republik Federasi Rusia sangat menganut pendekatan holistik. Di mana dilakukannya hasil penghitungan jumlah suara berdasarkan pada sebab, akibat, dampak, kalkulasi untung dan rugi dari sebuah kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia. Ciri khas pendekatan holistik ialah tipe pengambilan keputusannya melibatkan banyak orang. Termasuk sebagian besar rakyat biasa maupun perwakilan rakyat yang berada di Kremlin. Proses pembuatan keputusan menjadi sebuah konsumsi berita bagi sebagian besar rakyat Republik Federasi Rusia. Rakyat tidak perlu khawatir dengan adanya pembatasan mendapatkan

informasi. Karena Demokrasi versi Rusia benar-benar membuat rakyat Federasi Rusia sangat puas dengan kinerja pemerintahannya.

Pada tanggal 12 Desember 1993 di setuju dan disahkan konstitusi Federasi Rusia yang mendeklarasikan Rusia sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi menekankan pada pemisahan kekuasaan Yudikatif, Esekutif dan Legislatif yang masing masing berdiri sendiri. Kekuasaan pemerintahan dalam lingkup negara dipegang oleh Presiden, Dewan Federasi, Pemerintah dan Kehakiman, sedangkan dalam ruang lingkup subjek Federasi Rusia terdapat Kray dan Oblast (organ-organ kekuasaan setempat). Federasi Rusia adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 83 entitas konstituen. Ada enam kategori entitas federal yang konstituen, agak berbeda dalam klasifikasi, secara konstitusional didefinisikan sebagai anggota yang sama dari federasi. 21 republik (sesuai dengan tanah air dari berbagai kelompok etnis) menetap di tingkat tertentu dalam otonomi daerah. Federasi ini selanjutnya dibagi ke dalam 47 oblasts (daerah), salah satu oblast otonom (daerah otonom), dan sembilan krais (wilayah) di mana empat okrugs otonom (kabupaten otonom, juga digambarkan untuk berbagai

kelompok etnis) berada. Moskow dan St Petersburg diklasifikasikan sebagai kota federal⁸.

Pada tahun 2000, kemudian Rusia dipisahkan lebih lanjut ke dalam tujuh distrik federal khusus dengan tujuan memastikan pengawasan federal dalam urusan daerah lokal. Setiap entitas konstituen dari federasi memiliki piagam sendiri, lembaga politik dan peraturan lokal. Sekitar setengah entitas konstituen telah menandatangani perjanjian bilateral yang mengatur hubungan antara daerah dan federal pemerintah. Kemajuan yang signifikan telah dibuat konsistensi yang lebih besar antara hukum sistem regional dan federal. Namun, ketika melakukan transaksi bisnis pada ketentuan perjanjian tingkat daerah harus waspada dikarenakan dapat menetapkan hak dan keistimewaan yang sedikit berbeda dengan entitas konstitusional, Presiden Federasi Rusia dipilih untuk jangka empat tahun (Terbatas pada dua istilah dalam suksesi) dan diberikan wewenang kekuasaan yang luas, melayani sebagai kepala negara, komandan-in-chief dari angkatan bersenjata, dan jabatan tertinggi otoritas eksekutif federasi. Kantor Presiden juga mencakup kekuatan keputusan dan memveto legislatif, dan

⁸ Fahrudji, A. Rusia Baru Menuju demokrasi. Dalam *Pengantar sejarah dan latar belakang budayanya* (hal. 140). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.

kekuasaan untuk mengangkat dan membubarkan kabinetnya.

Terutama bertanggung jawab untuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri serta mewakili Rusia dalam hubungan internasional. Selain itu, karena pada Desember 2004 Presiden diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung para pemimpin regional Rusia, tunduk pada konfirmasi dari legislatif daerah. Prosedur diubah pada Desember 2008: menurut undang-undang baru, partai politik yang memperoleh mayoritas mandat di legislatif daerah dapat mengajukan tiga pencalonan untuk Presiden . Perdana Menteri mengawasi kegiatan pemerintah dan berfungsi sebagai Presiden ketika Presiden berhalangan dan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Otoritas Perdana Menteri sebagai pejabat Presiden berakhir pada pemilihan presiden baru, yang biasanya diberi jangka waktu tiga bulan setelah mantan Kewenangan Presiden berakhir. Sejak pemilihan Vladimir Putin ke kursi kepresidenan Rusia di Mei 2000, Negara telah mengalami sejumlah reformasi politik yang bertujuan menyapu sentralisasi kekuasaan dalam eksekutif federal. Vladimir Putin terpilih kembali pada Maret 2004. Pada bulan Maret 2008 Pengganti Putin ditunjuk, Dmitry Medvedev, memenangkan pemilihan umum dengan besar mayoritas. Pada Mei 2008 Vladimir Putin diangkat Perdana Menteri.

Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Majelis federal bikameral, yang terdiri dari Federasi Dewan (majelis tinggi) dan Duma (Gedung pemerintah yang lebih rendah)⁹.

Sejak Januari 2002, Dewan Federasi ini terdiri dari dua wakil dari setiap entitas federal konstituen, salah satu dari cabang eksekutif yang ditunjuk oleh daerah gubernur, dan satu dari legislatif yang dicalonkan oleh majelis regional. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya, dimana para pemimpin dari legislatif regional dan cabang eksekutif bertugas di dewan *ex officio*. Duma terdiri dari 450 anggota yang dipilih nasional oleh perwakilan proporsional daftar partai sekalipun. Sebelumnya 225 dari 450 anggota terpilih pada pemilihan anggota tunggal; Namun, pada bulan Desember 2004 pemilu pertama di bawah aturan baru tapi akan diadakan pada bulan Desember 2007. Selain itu, aturan baru diperkenalkan yang mengatur partai politik nasional, meminimalisir partai yang diperlukan untuk pendaftaran anggota (dari 10.000 sampai 50.000) dan batas untuk keamanan kursi di Dumai (dari 5% sampai 7% dari suara nasional). Tingkat pemerintahan terendah di Federasi Rusia adalah pemerintahan lokal.

⁹ Sunaryono, B. *Politik dan Pemerintahan Rusia*. Yogyakarta: Fisipol UMY. 2007.

2. Marketing Foreign Policy

Republik Federasi Rusia mampu mensejajarkan diri dan menjadi penyeimbang dengan Amerika Serikat sebagai negara Adidaya. Kemajuan segala bidang tersebut di dukung oleh beberapa macam point National Power yang di miliki oleh Republik Federasi Rusia dan menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sebuah kebijakan politik luar negeri yang sudah dibuatnya. Sebagai negara yang maju dalam segala bidang Vladimir Putin dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dan berjasa dalam membawa kemajuan bagi Rusia.

Kemajuan dibidang peningkatan kemampuan militer ditandai dengan terjadinya peningkatan anggaran militer yang fluktuatif setiap tahun. Peningkatan anggaran militer ini disebabkan karena terjadinya ketidakstabilan keamanan baik regional maupun interasional. Hal tersebut disikapi oleh pemerintah Republik Federasi Rusia dengan membuat rencana anggaran belanja militer secara cermat dan detail. Peningkatan anggaran militer akan berdampak pada: Peningkatan jumlah kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki oleh Republik Federasi Rusia, peningkatan sejumlah program kerjasama militer yang telah disepakati bersama (SCO dan CSTO) berupa latihan gabungan armada tempur yang dimiliki oleh masing-masing negara

anggota SCO dan CSTO, perjanjian militer dan transfer teknologi alutsista¹⁰.

Kemajuan dibidang perekonomian ditandai dengan banyaknya sejumlah program kerjasama ekonomi yang terjadi antara Republik Federasi Rusia dengan negara lain dan banyaknya sejumlah perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara Republik Federasi Rusia dengan negara lain.

Kemajuan dibidang kerjasama internasional ditandai dengan banyaknya kesepakatan yang terjadi antara Republik Federasi Rusia dengan negara lain. Sebagai contoh Rusia sebagai negara pendiri dan anggota BRICS. bergabungnya Rusia ke dalam anggota G8. Bergabungnya Rusia menjadi salah satu negara anggota Opec. Bergabungnya Republik Federasi Rusia ke dalam anggota WTO, bergabungnya Republik Federasi Rusia menjadi anggota PBB dan Dewan Keamanan tetap PBB.

Sikap aktif Republik Federasi Rusia dalam berbagai bidang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pertimbangan, gambaran umum, acuan tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Federasi Rusia yang lebih mengutamakan senjata Nuklir yang bersifat defensif, kemampuan militer yang berkualitas, diplomasi damai

¹⁰ Nichol, J. Russian Military Reform and Defence Policy. 2011

dan Gas Alam terhadap negara lain yang ingin melakukan kerjasama ataupun konflik dan meningkatkan posisi tawar Republik Federasi Rusia di dunia internasional¹¹.

Kesimpulan.

Republik Federasi Rusia telah mengalami proses transformasi politik yang sangat panjang. Transformasi politik yang sangat cukup panjang tersebut sangat berdampak pada proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Pola proses pembuatan kebijakan politik luar negeri dimulai pada masa kepemimpinan Vladimir Putin yang secara langsung menandai masa berakhirnya kepemimpinan Boris Yeltsin yang dianggap telah gagal dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri yang terlalu menjadikan Barat (Amerika Serikat) menjadi acuan dan sekutunya. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan ideologi, kultur dan budaya, dan semangat kebangsaan sebagian besar rakyat Republik Federasi Rusia.

Karakter pembuatan keputusan di negara Republik Federasi Rusia sangat menganut pendekatan holistik. Di mana dilakukannya hasil penghitungan jumlah suara

¹¹ Lucas, E. *The New Cold War: Putin's Russia and Threat to the West*. New York: Palgrave Macmillan. 2008

berdasarkan pada sebab, akibat, dampak, kalkulasi untung dan rugi dari sebuah kebijakan politik luar negeri Republik Federasi Rusia. Ciri khas pendekatan holistik ialah tipe pengambilan keputusannya melibatkan banyak orang. Termasuk sebagian besar rakyat biasa maupun perwakilan rakyat yang berada di Kremlin. Proses pembuatan keputusan menjadi sebuah konsumsi berita bagi sebagian besar rakyat Republik Federasi Rusia. Rakyat tidak perlu khawatir dengan adanya pembatasan mendapatkan informasi. Karena Demokrasi versi Rusia benar-benar membuat rakyat Federasi Rusia sangat puas dengan kinerja pemerintahannya.

Sikap aktif Republik Federasi Rusia dalam berbagai bidang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pertimbangan, gambaran umum, acuan tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Federasi Rusia yang lebih mengutamakan senjata Nuklir yang bersifat defensif, kemampuan militer yang berkualitas, diplomasi damai dan Gas Alam terhadap negara lain yang ingin melakukan kerjasama ataupun konflik dan meningkatkan posisi tawar Republik Federasi Rusia di dunia internasional

REFERENSI

- Wicaksana, Wahyu. 2015. *Understanding Russian: Russian Foreign Policy*. Dalam perkuliahan Masyarakat Budaya Politik Rusia, Eropa Timur, Asia Tengah. Pada hari Jumat, 10 April 2015. Departemen Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Hans. J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, 2010, *Politik Antar Bangsa*, terj. S. Maimoen, at al, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal.135-173.
- De Haas, Marcel. 2010. *Russian Foreign Policy*. Routledge. New York.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", LP3S, Jakarta,
- Anders Aslund and Andrew C. Kuchins, *The Russia Balance Sheet* (Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2009); and Andrei P. Tsygankov and Pavel A. Tsygankov, "A Sociology of Dependence in International Relations Theory: A Case of Russian Liberal IR," *International Political Sociology* 1 (2007), pp. 307—324.
- Nation, C. R. (2007). *US Interest in The New Eurasia*. Strategic Studies.
- Fahrurodji, A. (2005). *Rusia Baru Menuju demokrasi. Dalam Pengantar sejarah dan latar belakang budayanya* (hal. 140). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

- Sunaryono, B. (2007). *Politik dan Pemerintahan Rusia*. Yogyakarta: Fisipol UMY.
- Nichol, J. (2011). *Russian Military Reform and Defence Policy*.
- Lucas, E. (2008). *The New Cold War: Putin's Russia and Threat to the West*. New York: Palgrave Macmillan.

**RELEVANSI POLITIK LUAR NEGERI BARAT
DALAM ISLAM
Syuryansyah**

Pada praktek Ilmu Hubungan Internasional kontemporer, dengan semakin banyaknya Scholar dari Asia dan Timur Tengah yang begitu bersemangat dalam menganalisis pengaruh Islamic Studies dalam Ilmu Hubungan Internasional. Elemen Studi Islam juga merupakan salah satu konsep yang begitu penting dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, sebagaimana pada sejarahnya Islam begitu berjaya pada masa kekaisaran Ottoman di Eropa dan begitu berpengaruh pada perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, semakin berkembangnya Studi Islam dalam Ilmu Hubungan Internasional memunculkan perdebatan baru antara Scholar negara-negara Barat dan dari Asia juga Timur Tengah.

Kemudian, sebagai salah satu konsep dalam Internasional Teori termasuk Hubungan Internasional, Hukum Internasional, dan Pilosofi, konsep Negara-Bangsa memainkan peranan penting dalam perkembangan Studi ini. Karena konsep ini mengalami perubahan yang signifikan pada era Westphalia 1648, sebelum era Westphalia Negara merupakan satu kesatuan masyarakat

yang memiliki entitas bahasa dan budaya yang sama. Begitu simpelnya konsep Negara-Bangsa pada era sebelum Westphalia, selanjutnya pada era Westphalia konsep tersebut berubah menjadi lebih teratur dan jelas dimana yang namanya Negara-Bangsa itu terdiri dari Autoriti, Teritorial, Nationaliti dan Kedaulatan.

Ketika konsepsi tersebut muncul dari pandangan orang-orang barat, dunia Islam juga memiliki perspektif lain mengenai konsep dari Negara-Bangsa seperti kosep Ummah, dar al-Islam, dar al-Harb, dar al-Ahd yang kemudian dijadikan landasan dalam praktek Hubungan Internasional dalam perspektif Islam dan juga pengaruhnya pada konsepsi Ilmu Hubungan Internasional dan Dunia Islam modern (Adiong 2013).

Selanjutnya pemahaman dan interpretasi konsep Negara-Bangsa menjadi fokus perdebatan dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional dan Studi Islam. Selain itu beberapa Scholar juga banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana konsep Negara-Bangsa terbentuk dan dioperasikan pada Ilmu Hubungan Internasional dan Studi Islam, juga meneliti tentang persamaan dan perbedaan pada Ilmu Hubungan Internasional dan Studi Islam mengenai pemahaman tentang konsep Negara-Bangsa.

Dalam pemahaman teori dalam Ilmu Hubungan Internasional Barat, terbagi menjadi dua bagian yang begitu berbeda, yang pertama yaitu pemahaman teori positivis yang begitu dominan di United State of America dan pemahaman reflektivis lembut yang begitu dominan di Eropa. Kebanyakan orang Eropa memakai teori untuk segala sesuatu yang secara sistematis terorganisir, kemudian kebanyakan orang Amerika beranggapan bahwa teori itu terbentuk untuk menjelaskan fenomena sebab-akibat. Perbedaan ini begitu terlihat dalam pemaham dan explanasi dari teori Hubungan Internasional itu sendiri.

Selain itu, dominasi Barat dalam konsepsi Teori Hubungan Internasional memiliki dua faktor yang membuatnya begitu dominan dalam dunia Hubungan Internasional. Yang pertama yaitu kebanyakan teori dalam Hubungan Internasional berasal dari Pilosofi barat dan Sejarahnya, yang kedua yaitu bentuk Eoruseritik dalam sejarah dunia yang begitu berpengaruh dalam penyusunan teori Hubungan Internasional.

Menurut Acharya dan Buzan dalam bukunya yang berjudul *Non-Western International Relations Theory: Perspective on and Beyond Asia*, dijelaskan bahwa Non-Western teori dalam Hubungan Internasional atau kontribusi orang-orang non-Western dalam penyusunan

teori Hubungan Internasional itu selalu ada dan akan selalu efektif karena penyusunannya harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa perspektif untuk memahami suatu fenomena sosial. Acharya berasumsi bahwa kemungkinan teori Hubungan Internasional non-Western itu ada, akan tetapi disembunyikan dari dunia barat dan tidak banyak diperdebatkan antar Scholar dalam skala yang lebih luas sama seperti kebanyakan teori Hubungan Internasional yang berasal dari barat. Salah satu alasan lainnya yaitu bahwa kurangnya kontribusi dari teori non-Western diakibatkan oleh kepercayaan Ethnosentris dari kebanyakan pemikir Barat yang menganggap bahwa budayanya merupakan superior daripada budaya yang lainnya.

Selain itu, dalam buku Archarya dilakukan beberapa penelitian tentang bagaimana perspektif dan kontribusi Amerika Latin dalam teori Hubungan Internasional. Hubungan Internasional Anglo-Saxon berpendapat bahwa penggunaan bahasa Inggris harus lebih dimudahkan dalam segala akses, karena kebanyakan negara di Amerika Latin menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesekian dan bukan merupakan bahasa nomor satu. Oleh karenanya hal ini dianggap sebagai hambatan beberapa scholar yang berasal dari Amerika Latin.

Walaupun masih banyak keterbatasan, menggunakan Islam sebagai sumber teorisasi dalam studi hubungan internasional sangatlah dimungkinkan. Salah satu yang ditawarkan oleh Tadjbakhsh sebagai sumber kerangka teoretik Islam dalam Hubungan Internasional adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw:

“A primary foundation for the classical understanding of IR in Islam is based on the original sources of the Qur’an, the Hadith (Sayings of the Prophet), the Sunnah (the conduct of the Prophet) or ijtihad (interpretation), which could correspond to what Acharya and Buzan call classical ideas, traditions and thinking contributing to „localist exceptionalism“

Sementara dalam hal sifat, Tadjbakhsh menyatakan bahwa teori Islam tentang Hubungan Internasional adalah normatif.

“The nature of the Islamic theory on international relations is decisively normative, in the Aristotelian sense of sciences as not only a reflection on what is, but also on what should be/what must be done. It is based fundamentally not on empirical observations of behaviours between states and predictions of what behaviour would be, but on how institutions reflect the essence of an idea, a norm, a morality.”

Untuk memahami dan menjelaskan tentang dimana letak kontsibusi non-Barat dalam teori Hubungan Internasional Diperlukan sebuah upaya mengkaji berbagai

perspektif dari luar Barat agar dapat memahami fenomena internasional terutama di ruang yang berbeda misalnya di dunia Islam seperti di kawasan Timur Tengah. Acharya dan Buzan mempertanyakan jika terdapat ketidaksesuaian antara teori hubungan internasional Barat dan universalitas pengalaman manusia, tidak bisakah kita menggunakan pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) sebagai basis generalisasi yang bisa menyediakan lensa alternatif dalam teorisasi studi Hubungan Internasional (Amitav Archarya 2010).

Dalam hubungan antar negara diperlukan hubungan dan kerjasama antar Negara, oleh karenanya banyak para pemikir Barat seperti Rossenau, Coplin, dan Hudson menganggap betapa pentingnya melakukan Politik Luar Negeri demi tercapainya kepentingan Nasional. Tapi bukan hanya itu saja, pemikiran barat yang sudah berabad-abad diterima di masyarakat harus punya hubungan dan relevansi dalam menyelesaikan banyak kasus yang terjadi di dunia, dan sebagian kasus yang terjadi di dunia ini kebanyakan melibatkan negara yang mayoritas Islam. Sehingga diperlukan relevansi Politik Luar Negeri barat dengan Politik Luar Negeri dalam Islam. Dalam melakukan politik luar negeri Islam memandang hubungan internasional adalah sebagai hubungan antar manusia. Oleh karenanya terikat oleh nilai-nilai

kemanusiaan dan hukum muamalat seperti yang terkandung dalam Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam surah itulah menjadi dasar saya betapa pentingnya dalam kehidupan bernegara kita perlu melakukan kerjasama baik itu kerjasama anatar umat manusia maupun sebagai negara.

Kajian Pustaka

Penulisan ini pernah disinggung Adiong dalam jurnalnya yang berjudul "*Journal of Islamic State Practice in International Law*" dalam jurnal tersebut adiong menjelaskan konsep negara bangsa, dan di dalam jurnal itu juga Adiong menjelaskan asal usul konsep Barat dan beberapa konsep negara Islam dalam hukum internasional yang bersumber dari qur'an dan as-sunnah.

Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Indah Ariesanti secara umum politik luar negeri Islam bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara,

keamanannya, serta menjaga kepentingan ekonominya. Di dalam literature yang ditulis Indah Ariesanti politik Luar Negeri dalam Islam, menurut Ali Halim Mahmud (1998), terdiri atas dasar-dasar kuat yang mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan-tujuan itu adalah: (1) mengamankan penyebaran dakwah kepada manusia, sehingga suara dakwah itu dapat sampai ke seluruh manusia. (2) Mengamankan batas-batas territorial negara Islam dan umat Islam.

Dalam penulisan ini juga penulis menggunakan literature dari Dr., Afzal Iqbal yang berjudul "Diplomasi Islam" yang sedikit menyinggung tentang bagaimana Islam berdiplomasi. Penulis menggunakan buku ini karena diplomasi adalah bagian dari politik luar negeri. Sehingga dari itu melalui buku ini penulis bisa memahami bagaimana konsep dasar Politik Luar Negeri Islam.

Pembahasan

Yang pertama dalam membentuk teori itu adalah Ontologi. Pembentukan teori Politik luar Negeri barat adalah berdasarkan kepentingan nasional yang menjadi dasar acuan yang membentuk teori ini adalah Kepentingan Nasional, kepentingan nasional suatu negara akan menentukan bagaimana negara itu berperilaku dan mengambil tindakan politik Luar Negeri.ada beberapa

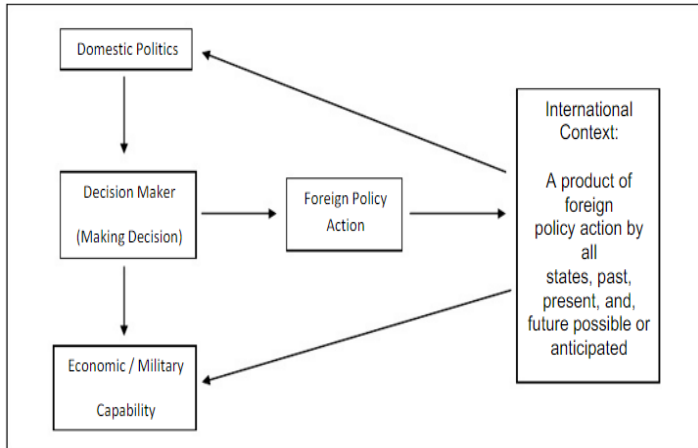
dasar yang mempengaruhi Politik Luar Negeri suatu negara diantaranya adalah keamanan Nasional, Kepentingan Ekonomi, Ideologis dan Historis suatu Negara, dan sarana serta Prosedur Politik Luar Negeri.

Selanjutnya adalah Epistemologi. Dalam perkembangannya politik luar negeri ini banyak memunculkan teoritis Hubungan Internasional. Salah satunya Hudson. Hudson menyatakan bahwa pengertian politik luar negeri adalah sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dengan negara tersebut. Menurut (Rosenau: 1978) kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. (James 1976).

Sedangkan menurut pakar yang lain, William D. Coplin, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari politik domestik, serta melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian memengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. Kita dapat melihat bagan dibawah ini untuk

memahami pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin

Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri



Dari diagram pembuatan kebijakan Politik Luar Negeri William D Coplin diatas, dijelaskan bagaimana hubungan antara Politik dalam Negeri, Pengambil Kebijakan, serta Ekonomi dan Kapabilitas Militer mempengaruhi kebijakan luar negara. Sedangkan dalam Buku Alex Mintz pengambil kebijakan itu juga dipengaruhi oleh faktor psikologis sang pembuat keputusan tersebut. Jadi, kita dapat menyimpulkan sebenarnya tujuan dilakukan Politik Luar Negeri. Tujuan Politik Luar Negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri tersebut

menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional

Yang ketiga dalam logika pembentukan teori adalah Aksiologi. Aksiologi berarti manfaat, manfaatnya dalam perkembangan teori politik Luar negeri ini terjadi bergeser kearah yang lebih luas, misalnya dalam menjalankan politik luar negeri sebuah negara tidak hanya dilakukan oleh G to G (*Government to Government*) akan tetapi aktor dalam pengambilan keputusan luar negeri ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya masyarakat, NGO, INGO dll. Dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional.

Teori Politik Luar Negeri dalam Islam

Ontologi dasar pembentuk teori dalam Islam bersumber dari Aqidah Islam (*Syahadatain*) yang maksudnya adalah dasar *mabda'* (ideologi) Islam, sehingga dengan dasar Aqidah ini juga yang mengharuskan Khilafah Islamiyah menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Hal lain yang menjadi dasar dalam pembentukan teori ini adalah melalui Dalil *Al-Qur'an*: Wajib taat pada pemimpin yang taat pada Allah dan Rosulnya (QS 4: 59), Wajib memutuskan perkara berdasar yang diturunkan Allah (QS 5: 48) selanjutnya as Sunnah Dalil As Sunnah:

Hadits2 tentang Khalifah, bai'at, Lihat Shahih Bukhori dlm pasal Al Ahkam dan lihat Shahih Muslim dlm pasal Al Imarah. Yang ketiga adalah Dalil Ijma' Shahabat: adalah segala sesuatu yang dilakukan para shahabat setelah wafatnya Rosul, dan yang ke empat adalah Kaidah Syari'at: *Maa lam yatimmul wajiba illa bihi fahuwa waajibun*. Menurut al-Ghazali dalam melakukan Politik Luar Negeri kerjasam memungkinkan yang dilakukan kedua belah pihak akan mendatangkan keuntungan, mempertukarkan sumber daya secara efektif. Nalar berfikir ini dapat dianalisa dalam surat al-Maidah ayat ke 2:

تَابِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ
 نَفْسًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمُنَّكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungai baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerdhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." Melalui ayat diatas sangat jelas ditekankan bagaimana umat manusia seharusnya melakukan Politik Luar Negeri dengan cara saling tolong menolong dalam melakukan hal yang baik, bukan dalam hal melakukan keburukan.

Selanjutnya Logika dalam pembentukan teori adalah Epistemologi. Epistemologis teori Politik Luar Negeri dalam Islam ini dianggap logis karena mempunyai dalil yang kuat. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan nilai nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi hubungan internasional salah satunya adalah Kerjasama Kemanusiaan (*Ta'awun Insani*) berdasarkan prinsip *ta'awun insani*, Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarangnya kita membantu didalam kejelekan (dosa) dan permusuhan. Allah juga memerintahkan pengembangan kerjasama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai. Semua prinsip tersebut bertumpu pada satu prinsip pokok

yaitu prinsip tauhid. Dari pengertian diatas dapat di simpulkan Politik Luar Negeri dalam Islam dapat di ambil dari nilai awal manusia yaitu tentang kerjasama antar manusia. Karena pengertian negara adalah sekumpulan banyak orang yang membentuk koalisi dan mempunyai tujuan sama karena negara itu terdiri dari banyak orang, sehingga Prinsip *Ta'awun Insani* bisa digunakan untuk menjelaskan Politik Luar negeri dalam Islam. Sehingga Politik Luar Negeri dalam Islam itu bertujuan untuk mengembangkan kerjasama, saling membantu dalam lingkungan manusia dan menghindari tipu daya.

Selanjutnya Aksiologi, ada dua manfaat teori Politik Luar Negeri dalam Islam yang saya baca dari power point Siti Muslikhati (dosen Hubungan Internasional UMY) yang pertama adalah Melangsungkan kehidupan Islam di alam semesta dalam rangka meninggikan Kalimat Allah. Maksudnya adalah dalam melakukan politik luar negeri dalam Islam itu harus memenuhi prinsip dasar manusia dalam Islam. Yang kedua tujuan dari politik Luar negeri Islam itu bertujuan untuk mewujudkan *Rahmatan lil 'alamin* jika diterapkan menyeluruh dan sempurna (Syamil dan kamil).

Kesimpulan

Dalam Penulisan ini dapat kita simpulkan bagaimana relevansi Politik Luar Negeri Barat ini tidak lagi relevan karena menurut pengertian Politik Luar Negeri Barat Politik luar negeri itu dapat kita simpulkan hanya mementingkan kepentingan Nasional, sedangkan Politik Luar Negeri dalam Islam itu mementingkan kerjasama yang bersih dan berimbang dan mementingkan kepentingan umat manusia dan harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagan di bawah ini saya simpulan tentang komparasi antara Politik Luar Negeri Barat dengan Politik Luar Negeri Islam:

Tata Nalar	Politik Luar Negeri Barat	Politik Luar Negeri Islam
Intensi	Memperkuat Diri	Memperkuat Sistem
Aktualisasi Intensi	Siapa Kuat Siapa Dapat (<i>Unilateralisme</i>)	Berabagi Kekuatan, Pengetahuan untuk membangun Kebersamaan (<i>universalime</i>)

Tujuan	Kekuasaan <i>An-Sich</i>	Kemuliaan Kemanusiaan dan Ketuhanan
--------	--------------------------	---

REFERENSI

Adiong, Nassef Manabilang. "Nation-State in IR and Islam." *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 2013: 47.

Adolf, Huala. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Agency, Central Intelligence. *Western Sahara*. March 23, 2009. The 2008 World Fact Book (accessed November 16, 2015).

Amitav Archarya, Barry Buzan. *Non-Western International Relations Theori: Perspective on and Beyond Asia*. New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2010.

Chinkin, Christine. *Laws of occupation. In: Conference on Multilateralism and International Law with Western Sahara as a case study hosted*. pretoria: the South African Department of Foreign Affairs and the University of Pretoria, 2008.

Cistero Bahima, Josep Maria y Frexies Sanjuan, Maria Teresa. *Sahara. Una Leccion de Historia*. Barcelona: imerenta Algraf, 1987.

Curtis, and Paul Taylor. "The United Nations", dalam *John Baylis and Steve Smith The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition)*. New York: oxford University press, 2005.

dickson. *Ilmu pengetahuan Umum*. March 6, 2014. ilmupengetahuanumum.com (accessed Oktober 25, 2015).

Fhiqar. *West Sahara Case*. Maret 26, 2012. <http://fhiqar.blogspot.co.id/2012/03/west-sahara-case.html> (accessed Oktober 4, 2015).

Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict Development and Civilization*. oslo: Sage Publications, 1996.

Garnered, Bryan A. *Black's Law Dictionary* . Vol. Book I. ST Paul, minn: West Group, 1999.

Grant, Parry and. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*. Newyork: Oceana Publication Inc, 1986.

Hammoudi, Abdellah. *Master and Disciple: The Cultural Foundations of Moroccan Authoritarianism*. Chicago: University Chcago Press, 1997.

Holsti, K.J. *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis Edisi Keempat*. Translated by M.Tahir Azhary. Jakarta: Erlangga, 1988.

Holzgreffe, J.L. *Humanitarian Intervention "Ethical, Legal, and Political Dilemmas"*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

inarah, siti farahiyah. *future delegate*. juni 21, 2015. siti-farahiyah-inarah-fisip14.web.unair.ac.id (accessed november 14, 2015).

Ismimujahidah. *Catatan Singkat anak Hubungan Internasional*. Desember 11, 2010. <https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/peacekeeping/> (accessed Juli 12, 2015).

James, N. Rosenau. *World Politics, an Introduction*. New York: The Free Press, 1976.

Jamil, M. Mukhsin. *Mediasi dan resolusi Konflik*. Semarang: walisongo Mediation Center(WMC) & IAIN Walisongo, 2007.

Loss, Julika. *Intervention Concepts in Prevention*. November 26, 2005. http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4020-5614-7_1864 (accessed September 29, 2015).

Mauna, Boer. *Hukum internasional: pengertian dan fungsi dalam era dinamika global*. Jakarta: alumni, 2000.

— . *Hukum Internasional: pengertian peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: PT Alumni, 2005.

mauna, boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2002.

McClelland, David. *The achieving Society*. Edited by Ramlan Surbakti. New York: The Free Press, 1967.

Morgenthau, Hans J. *Politik antar bangsa*. Translated by A. M., Fatwan, Cecep Sudrajat S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

— . *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Mulia, T.S.G. *Perserikatan Bangsa-Bangsa buku penuntun*. Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.

Nations, United. *Secretary- General Appoints Major General Muhammad Tayyab Azam of Pakistan United Nations Mission for Referendum in Western Sahara Force Commander*. September 4, 2015. <http://www.un.org/press/en/2015/sga1592.doc.htm> (accessed November 25, 2015).

— . *Secretary-General Appoints Kim Bolduc of Canada Special Representative, Head of United Nations Mission for Referendum in Western Sahara*. mei 12, 2014. <http://www.un.org/press/en/2014/sga1469.doc.htm> (accessed november 25, 2015).

— . *Secretary-General Appoints Major General Muhammad Tayyab Azam of Pakistan United Nations Mission for Referendum in Western Sahara Force Commander*. September 4, 2015. <http://www.un.org/press/en/2015/sga1592.doc.htm> (accessed November 25, 2015).

NATIONS, UNITED. *Security Council*. April 30, 2008. [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1813\(2008\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1813(2008)) (accessed November 24, 2015).

Omar, Sid M. *Mapping of The Conflict in Western Sahara*. September 10, 2009. http://www.gees.org/articulos/mapping_of_the_conflict_in_western_sahara_6705 (accessed November 16, 2015).

Oxfam. *Western Sahara*. 2015. (accessed November 25, 2015).

Pomerance, Michla. *Self-determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations*. Martinus Nijhoff Publishers, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono. *azaz-azaz hukum publik internasional*. Jakarta: PT pembimbing masa , 1967.

Ramsbotham, Oliver, and Tom Woodhouse. *Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict*. Cambridge: Polit Press, 1996.

Robert T. Vance, Jr.,. *Recognition as an Affirmative Step in the Decolonization Process: The Case of Western Sahara*. Chocago: 7 Yale Journal of World Public Order, 1980-81.

Roy, S.L. *Diplomasi*. Translated by Harwanto dan Mirsawati. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.

Sastroamidjojo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Batara, 1971.

Service, Sahara Press. *NAM reiterates Support to right of Sahrawa people to determination*. agustus 30, 2012. Saharapressservice.com (accessed November 17, 2015).

Singhan, Arif Frastiawan. *Tugas Uas Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik*. Februari 2, 2013. ayiephfrastia.blogspot.co.id (accessed november 14, 2015).

Suharsono. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996.

UNHCR. *UNHCR ALGERIA FACTSHEET*. August 2010. <http://www.unhcr.org/4c9085bf9.html> (accessed November 24, 2015).

UNHCR. "United Nations High Commissioner for Refugees." *UNHCR/CBM Western Sahara FACT SHEET*, 2014.

UNIC-JAKARTA. *Dewan Keamanan memperpanjang misi PBB di Sahara Barat hingga April 2016*. April 28, 2015. <http://unic-jakarta.org/2015/04/30/dewan-keamanan-memperpanjang-misi-pbb-di-sahara-barat-hingga-april-2016/#more-8691> (accessed November 24, 2015).

Wahono, Subur. *Peacebuilding*. November 06, 2010. kapotha.blogspot.co.id (accessed November 16, 2015).

wasp, r. *Frente, Polisario Gerakan Perdamaian*. April 5, 2012. <http://www.re-tawon.com/2012/04/frente-polisario-gerakan-pejuang.html> (accessed Juli 27, 2015).



KOMOJOYO PRESS

Jl. Komojoyo 21A, Sleman, Yogyakarta



9 786026 723017